



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2023



REFORMASI
HUKUM





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
Website jogja.kemenkumham.go.id

Nomor : W.14.PR.03- 198 5 Januari 2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Segera
Hal : Pengantar Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah (LKjIP)
Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Cq. Kepala Biro Perencanaan

Di – Yogyakarta

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester I Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta (terlampir).

Demikian atas perhatiannya di sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Para Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM RI.



KATA PENGANTAR

Agung Rektono Seto, S.E., M.Si.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warrahmatullah
Wabarakatuh,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam hal pelaksanaan Visi, Misi, dan Tujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja dari tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023. Disamping itu, LKjIP dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.



Laporan Kinerja ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, sekaligus sebagai bahan *self assessment* atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2023 yang dapat digunakan oleh internal untuk melakukan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dari setiap unit pelaksana teknis yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta. Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan akan mendatangkan masukan dan saran sebagai umpan balik untuk perbaikan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dalam semangat Reformasi Birokrasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 ini diharapkan mampu memenuhi harapan dan bermanfaat bagi semua pihak serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dimasa mendatang.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Thariq,

Wassalamuálaikum Warrahmatullah Wabarakatuh.



Yogyakarta, 8 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Agung Rektono Seto
NIP 197012021999031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
PRESTASI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B DASAR HUKUM	2
C TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1) DIVISI ADMINISTRASI	5
2) DIVISI PEMASYARAKATAN	7
3) DIVISI KEIMIGRASIAN	9
4) DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	11
5) UNIT PELAKSANA TEKNIS	16
6) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	18
7) KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA	18
D MAKSUD DAN TUJUAN	24
E ASPEK STRATEGIS	25
F ISU STRATEGIS	25
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	27
1. DIVISI ADMINISTRASI	28
2. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	43
3. DIVISI PEMASYARAKATAN	100
4. DIVISI KEIMIGRASIAN	105
G SISTEMATIKA LAPORAN	107
BAB II	110
PERENCANAAN KINERJA	110
A RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2020-2024	110
1 VISI, MISI, DAN TATA NILAI	110
2 TUJUAN	113
3 SASARAN STRATEGIS	115
4 ALOKASI ANGGARAN BELANJA	128
5 TATA NILAI	130
5 SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN ANGGARAN	130
I Sasaran Strategis	132

II	Program dan Anggaran	136
III	Indikator Kinerja Sasaran	137
B	PERJANJIAN KINERJA	137
BAB III		146
AKUNTABILITAS KINERJA		146
A	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	146
I	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Biaya Dan Sumber Daya Manusia	147
II	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sarana/Prasarana	151
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2023	152
2	Capaian Program Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2023	154
3	Capaian Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2023	162
4	Capaian Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun Anggaran 2023	221
5	Capaian Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2023	230
6	Capaian Program Fasilitasi Pembentukan Program Hukum Tahun Anggaran 2023	239
7	Capaian Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023	246
8	Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2023	254
9	Capaian Program Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengembangan Hukum dan Ham Tahun Anggaran 2023	267
B	REALISASI ANGGARAN	271
C	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	273
1)	Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA	273
2)	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)	276
D	CAPAIAN KINERJA LAINNYA	281
1)	<i>E-performance</i> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	281
2)	Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	282
3)	E-Monev BAPPENAS	287
4)	Kegiatan Prioritas Nasional	290
BAB IV		327
A	KESIMPULAN	327
B	SARAN	330
LAMPIRAN		333
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	
	PETIKAN DIPA TAHUN 2023	



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1	Realisasi Perjanjian Kinerja	Xxi
Tabel 1.2	Alamat Unit Pelaksana Teknis	16
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT berdasarkan Golongan	19
Tabel 1.4	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	20
Tabel 1.5	Jumlah pegawai Kantor Wilayah dan UPT berdasarkan Eselon	22
Tabel 1.6	Jumlah Pegawai JFT Kantor Wilayah	23
Tabel 1.7	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Administrasi	28
Tabel 1.8	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	43
Tabel 1.9	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pemasarakatan	100
Tabel 1.10	Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Keimigrasian	105
Tabel 2.1	Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya	116
Tabel 2.2	Sasaran Kegiatan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	116
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	123
Tabel 2.4	Sasaran Kegiatan Program Administrasi Hukum Umum	123
Tabel 2.5	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	124
Tabel 2.6	Program Pembentukan Hukum	125
Tabel 2.7	Program Pemajuan HAM	125
Tabel 2.8	Program Pembinaan Hukum Nasional	126
Tabel 2.9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	127
Tabel 2.10	Alokasi Anggaran masing-masing progam	128
Tabel 2.11	Faktor Internal Kekuatan dan Kelemhan yang di hadapi Kantor Wilayah	132
Tabel 2.12	Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemhan yang di hadapi Kantor Wilayah	133
Tabel 2.13	Kekuatan Vs Peluang dan Kelemahan Vs Peluang yang di hadapi Kantor Wilayah	134
Tabel 2.14	Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang di hadapi Kantor Wilayah	134
Tabel 2.15	Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah	135
Tabel 2.16	Progam dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah	136
Tabel 2.17	Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah	140
Tabel 3.1	Analisa atas Efisiensi Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah	149
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen	152
Tabel 3.3	Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen	152
Tabel 3.4	Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan	152
Tabel 3.5	Perbandingan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal	153
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum	154



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.7	Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum	156
Tabel 3.8	Perbandingan peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	156
Tabel 3.9	Jumlah Pengaduan MPD Kota Yogyakarta	157
Tabel 3.10	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Sleman	157
Tabel 3.11	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Bantul	158
Tabel 3.12	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Gunungkidul	158
Tabel 3.13	Jumlah Pengaduan MPD Kab. Kulonprogo	159
Tabel 3.14	Hasil Keputusan Rapat MKN Wilayah D.I. Yogyakarta	159
Tabel 3.15	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris	160
Tabel 3.16	Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	160
Tabel 3.17	Perbandingan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris	161
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2022 dan 2023	162
Tabel 3.19	Perhitungan Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah D.I. Yogyakarta	169
Tabel 3.20	Perbandingan Indeks penyelenggaraan pemasarakatan di wilayah	169
Tabel 3.21	Penghuni dan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara di Wilayah D.I. Yogyakarta	170
Tabel 3.22	Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Overstaying di Wilayah D.I. Yogyakarta	170
Tabel 3.23	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	171
Tabel 3.24	Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta	171
Tabel 3.25	Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	172
Tabel 3.26	Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	172
Tabel 3.27	Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	173
Tabel 3.28	Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta	173
Tabel 3.29	Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	174
Tabel 3.30	Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	174
Tabel 3.31	Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	175
Tabel 3.32	Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	176
Tabel 3.33	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	176



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.34	Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	177
Tabel 3.35	Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	177
Tabel 3.36	Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	178
Tabel 3.37	Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	178
Tabel 3.38	Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	179
Tabel 3.39	Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	179
Tabel 3.40	Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	180
Tabel 3.41	Perbandingan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	180
Tabel 3.42	Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	181
Tabel 3.43	Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	181
Tabel 3.44	Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	182
Tabel 3.45	Narapidana yang Bekerja dan Produktif	182
Tabel 3.46	Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	183
Tabel 3.47	Perbandingan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	183
Tabel 3.48	Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)	184
Tabel 3.49	Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya	184
Tabel 3.50	Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	185
Tabel 3.51	Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	185
Tabel 3.52	Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Basan baran yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	185
Tabel 3.53	Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	186
Tabel 3.54	Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	186
Tabel 3.55	Perhitungan Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	187
Tabel 3.56	Perbandingan Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	187
Tabel 3.57	Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	188
Tabel 3.58	Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	188
Tabel 3.59	Perbandingan Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	189
Tabel 3.60	Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	190



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.61	Perhitungan Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	190
Tabel 3.62	Perbandingan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	190
Tabel 3.63	Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	191
Tabel 3.64	Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	191
Tabel 3.65	Perbandingan Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	191
Tabel 3.66	Anak yang memperoleh hak integrasi	192
Tabel 3.67	Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	192
Tabel 3.68	Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	192
Tabel 3.69	Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	193
Tabel 3.70	Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	193
Tabel 3.71	Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	194
Tabel 3.72	Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	194
Tabel 3.73	Perhitungan Kinerja Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	194
Tabel 3.74	Perbandingan Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	195
Tabel 3.75	Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	195
Tabel 3.76	Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	195
Tabel 3.77	Perbandingan Persentase pengaduan yang diselesaikan	196
Tabel 3.78	Pencegahan gangguan kamtib	196
Tabel 3.79	Perhitungan Kinerja pencegahan gangguan kamtib	197
Tabel 3.80	Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib	198
Tabel 3.81	Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	198
Tabel 3.82	Perhitungan Kinerja kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	199
Tabel 3.83	Perbandingan Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	199
Tabel 3.84	Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	200
Tabel 3.85	Perhitungan Kinerja Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	201
Tabel 3.86	Perbandingan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	201
Tabel 3.87	Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	202
Tabel 3.88	Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	202
Tabel 3.89	Perbandingan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	203
Tabel 3.90	Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	203
Tabel 3.91	Perhitungan Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	204



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.92	Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah	202
Tabel 3.93	Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	205
Tabel 3.94	Perhitungan Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	206
Tabel 3.95	Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	206
Tabel 3.96	Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	207
Tabel 3.97	Perhitungan Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	208
Tabel 3.98	Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	208
Tabel 3.99	Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	209
Tabel 3.100	Perhitungan Kinerja Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	210
Tabel 3.101	Layanan Kesehatan (Preventif) bagi Tahanan /Narapidana/Anak Secara Berkualitas	210
Tabel 3.102	Perhitungan Kinerja Persentase layanan kesehatan (preventif) bagi Tahanan /Narapidana/Anak secara berkualitas	211
Tabel 3.103	Layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan /Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	212
Tabel 3.104	Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan /Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)	213
Tabel 3.105	Layanan Penanganan Gangguan Mental Bagi Tahanan /Narapidana/Anak	213
Tabel 3.106	Perhitungan Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Mental Bagi Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental	214
Tabel 3.107	Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana Lansia sesuai standar	215
Tabel 3.108	Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana Lansia sesuai dengan standar	215
Tabel 3.109	Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas)	216
Tabel 3.110	Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sesuai dengan standar	217
Tabel 3.111	penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	217
Tabel 3.112	Perhitungan Kinerja Persentase Penanganan penyakit menular bagi Tahanan /Narapidana/ Anak (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	217
Tabel 3.113	Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	218
Tabel 3.114	Perhitungan Kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	219
Tabel 3.115	Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2023	221



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.116	Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022	221
Tabel 3.117	Target Capaian Indeks kepuasan masyarakat	222
Tabel 3.118	Target Capaian Indeks pengamanan Keimigrasian	223
Tabel 3.119	Rekapitulasi Indeks	223
Tabel 3.120	Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat	224
Tabel 3.121	Kategorisasi mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat	224
Tabel 3.122	Kategorisasi mutu pelayanan Indeks Pengamanan Keimigrasian	225
Tabel 3.123	Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian	227
Tabel 3.124	Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian	227
Tabel 3.125	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	227
Tabel 3.126	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi	228
Tabel 3.127	Perhitungan Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian	229
Tabel 3.128	Perbandingan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	229
Tabel 3.129	Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2023	230
Tabel 3.130	Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022	230
Tabel 3.131	Perhitungan Kinerja Pemohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	232
Tabel 3.132	Perbandingan Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	232
Tabel 3.133	Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah	233
Tabel 3.134	Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah	234
Tabel 3.135	Perbandingan Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	234
Tabel 3.136	Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah	234
Tabel 3.137	Perhitungan Kinerja Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2023	235
Tabel 3.138	Perbandingan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	235
Tabel 3.139	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah	236
Tabel 3.140	Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	236
Tabel 3.141	Perbandingan Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	237
Tabel 3.142	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual	237
Tabel 3.143	Perhitungan Kinerja Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023	238
Tabel 3.144	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	238
Tabel 3.145	Capaian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 dan 2023	239
Tabel 3.146	Judul Rancangan Perda Kantor Wilayah	239



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.147	Perhitungan Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	244
Tabel 3.148	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	244
Tabel 3.149	Perhitungan Kinerja Jumlah Perancang Peraturan Perundang- undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	245
Tabel 3.150	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	245
Tabel 3.151	Capaian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan 2023	246
Tabel 3.152	Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM	247
Tabel 3.153	Perhitungan Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	248
Tabel 3.154	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	248
Tabel 3.155	Kab/kota peduli HAM	249
Tabel 3.156	Perhitungan Kinerja Jumlah kab/kota peduli HAM	249
Tabel 3.157	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	250
Tabel 3.158	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	250
Tabel 3.159	Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM	252
Tabel 3.160	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	252
Tabel 3.161	Perhitungan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	253
Tabel 3.162	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	253
Tabel 3.163	Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023	254
Tabel 3.164	Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022	254
Tabel 3.165	Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	256
Tabel 3.166	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	256
Tabel 3.167	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	257
Tabel 3.168	Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	258
Tabel 3.169	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	259
Tabel 3.170	Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	259
Tabel 3.171	Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	261



NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
Tabel 3.172	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	261
Tabel 3.173	Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	263
Tabel 3.174	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	263
Tabel 3.175	Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	264
Tabel 3.176	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	264
Tabel 3.177	Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN	265
Tabel 3.178	Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif	266
Tabel 3.179	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	266
Tabel 3.180	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023	267
Tabel 3.181	Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022	267
Tabel 3.182	Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi	268
Tabel 3.183	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	268
Tabel 3.184	Perhitungan Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	270
Tabel 3.185	Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	270
Tabel 3.186	Perbandingan realisasi anggaran	271
Tabel 3.187	Nilai SMART Kantor Wilayah	274
Tabel 3.188	Capaian nilai IKPA	279
Tabel 3.189	Rekapitulasi Nilai Target Kinerja Kantor Wilayah	284
Tabel 3.190	Daftar Nama Bantuan Hukum Litigasi	291
Tabel 3.191	Daftar Nama Bantuan Hukum Non Litigasi	315
Tabel 3.192	Capaian Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi	324



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah D.I. Yogyakarta serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sampai dengan 31 Desember 2023 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 31.776.114.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 36.646.619.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.518.526.406 atau sebesar 99,65% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dilakukan pada 4 program dengan menggunakan 22 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 59 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun nilai kinerja organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 mencapai 227,32% yang diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada 59 indikator kinerja kegiatan. Sedangkan nilai kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 99,65%. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui 22 inovasi layanan publik, yaitu :

SIEMON : Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (SIEMON) merupakan Aplikasi Pemantauan dan Pelaporan Notaris Online di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibawah Naungan dari MPD Notaris Yogyakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

KUMHAMJOGJA.ID PORTAL : Merupakan Portal daftar aplikasi inovasi yang dikembangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.



- E-OFFICE** : Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan nomer surat secara digital.
- TAMUKU** : Aplikasi Pencatatan Pengunjung di Ruang Pelayanan Terpadu (RPT) di Kantor Wilayah. TAMUKU mencatat Data Tamu, Pelayanan yang diinginkan serta Sistem Antrean di Kantor Wilayah. TAMUKU memetakan data pelayanan KANWIL sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik.
- ANGKRINGAN** : Angkringan merupakan Portal Pelayanan Kantor Wilayah dalam Satu portal Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pemasyarakatan dan Imigrasi terintegrasi dalam satu website yang dapat diakses oleh masyarakat Umum.
- WICARANA** : E-Journal sebagai wadah publikasi hasil penelitian pegawai, dosen, peneliti, mahasiswa, dan praktisi di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Wicarana menyambut baik kontribusi Anda berupa karya-karya inovatif dan belum pernah diterbitkan.
- SIPASTA** : Layanan Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan publik, khususnya bagi kalangan akademisi atau masyarakat yang berkepentingan dalam pengajuan surat izin pra penelitian, penelitian, kunjungan, kemitraan dan PKL.
- SIMONAS** : Layanan publik berbasis Teknologi Informasi yang menginformasikan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan dengan POKMAS dan BAPAS naungan Kantor Wilayah DIY.
- KI PROJO** : Kinerja Produktif Jogjakarta (KI PROJO) merupakan Web Jurnal kegiatan Pegawai Kantor Wilayah dalam Pelaksanaan tugas di masa pandemi Covid-19. Kantor



Wilayah Kemenkumham DIY tetap berkinerja produktif dengan mekanisme kerja yang jelas, transparan & akuntabel.

- SEPTA-YOGYA** : Sistem E-Voting Pegawai Teladan untuk Agen Perubahan Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta. Pegawai dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Pegawai Teladan Kanwil Kemenkumham DIY. Sistem ini merupakan upaya mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan peningkatan kinerja.
- SURVEI IKM** : Aplikasi Penghimpunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan Poin-Poin dari KEMENPAN-RB dan Balitbang KUMHAM. Aplikasi ini membantu Kantor Wilayah dalam evaluasi pelayanan, Survei mandiri ini dilaksanakan dengan sistem akuntabel dan transparan.
- SIKAP** : SIKAP (Sistem Kehadiran Apel) adalah Aplikasi Untuk pencatatan kehadiran apel Pegawai dan Kegiatan di Lingkungan Kantor Wilayah dengan menggunakan Teknologi Barcode dan QRCode yang tercetak pada kartu Pegawai Kanwil. Sistem Ini merupakan salah satu pelaksanaan integritas pegawai.
- HADIR** : HADIR adalah Aplikasi Untuk pencatatan kehadiran Kegiatan Virtual di Lingkungan Kantor Wilayah baik pegawai Kanwil maupun pegawai UPT di jajaran Kantor Wilayah. Sistem Ini merupakan salah satu pelaksanaan integritas pegawai dalam melaksanakan tugas.
- JALINANMIN** : JALINANMIN (Jadwal Informasi Layanan Divisi Administrasi) adalah Aplikasi Pencatatan kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY guna mempermudah Peliputan Kegiatan, Pendataan Tamu Protokoler dan Layanan Pengaduan Internal.



- SIMONEV** : SIMONEV adalah aplikasi monitoring dan evaluasi yang berisi serangkaian proses monitoring dan evaluasi baik secara virtual maupun secara klasikal. SIMONEV memiliki prinsip hybrid application yang mana dapat dilakukan monev secara tim maupun mandiri.
- SAPA HUKUM** : Aplikasi Integrasi Kegiatan dan Pelaporan Perancang Undang-Undang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Fungsional Tertentu (JFT) Perancang. Semua kegiatan dapat dipantau oleh masyarakat.
- OPINI** : Merupakan aplikasi yang mengakomodir dalam acara maupun seminar yang diadakan oleh Kemenkumham, peserta dapat mendownload sertifikat pada aplikasi berbasis web ini.
- E-LAPYANKOMAS** : Aplikasi e-Lapyankomas merupakan salah satu aplikasi berbasis jaringan internet yang dapat digunakan untuk menyampaikan komunikasi oleh masyarakat. Dalam aplikasi ini, Penyampai Komunikasi juga dapat secara online memperoleh informasi mengenai kemajuan dalam penanganan permasalahan HAM yang dikomunikasikannya. Hal ini tentu saja akan menghemat waktu dan biaya bagi Penyampai Komunikasi.
- MONDAY** : Monday merupakan salah satu inovasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dalam mempermudah penyelenggaraan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan ketugasan sekaligus bentuk pelayanan kepada publik.
- KALANDRA** : Kalandra adalah Aplikasi Kalurahan/Kelurahan Anubhawa Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi yang digunakan sebagai Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka



pembentukan Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta.

TEBAS BMN : Merupakan aplikasi berbasis web yang mengatur pengelolaan barang BMN di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY, terdapat fitur daftar barang BMN beserta penanggung jawab setiap barang BMN, terdapat juga fitur peminjaman mobil Dinas.

KLAP KLIP : Merupakan aplikasi yang digunakan sebagai system database pemberitaan jajaran kanwil kemenkumham DIY pada aplikasi klap – klip terdapat fungsi untuk menrekap berita secara otomatis yang nantinya akan menjadi atensi generator otomatis.

Ke dua puluh dua inovasi tersebut tersebut dirancang untuk memudahkan pegawai dan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Pegawai dan masyarakat dapat berkomunikasi dan mengirimkan dokumen secara langsung kepada petugas pelayanan dengan cukup melakukan chat atau percakapan tertulis dan mengunggah dokumen yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya dapat dilakukan dari rumah dan dari manapun melalui komputer, laptop, maupun handphone.



Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 yaitu:



Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY memperoleh penghargaan Terbaik III Pengelola Media Sosial pada Kantor Wilayah Tahun 2022.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto dalam acara Penguatan Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal Kemenkumham dan Public Relations Briefing 2023 di Graha Pengayoman, Jumat (17/2/2023).



Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan Terbaik I atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022. Prestasi ini diraih Kanwil Kemenkumham DIY untuk kategori Kantor Wilayah dengan Pagu Kecil atau di bawah Rp 250 miliar dengan nilai IKPA sebesar 98,64. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Biro Keuangan Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Penyerahan Piagam Penghargaan IKPA Tahun 2022 di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Bogor, Rabu (23/2/2023)



Kanwil Kemenkumham DIY Kembali memperoleh penghargaan di tahun 2023 ini. Pada Selasa (28/2/23), Kanwil Kemenkumham DIY mendapatkan anugerah penghargaan Terbaik III dalam melakukan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Anugerah penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Kepala KPKNL Yogyakarta, Jati Wiryawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi satuan kerja yang telah melaksanakan pengelolaan BMN dengan baik di tahun 2022.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY kembali menorehkan prestasi di bidang kinerja anggaran. Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan Peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Sedang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta. Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Sosialisasi PMK Nomor 178/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Penetapan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Secara Elektronik dan Arah Kebijakan IKPA 2023 di Kantor KPPN Yogyakarta, Selasa (7/3/2023).



Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan penghargaan berhasil diraih dalam kontestasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award Semester II Tahun 2022. Kontestasi IKPA Award ini diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu memacu satuan kerja dapat menyajikan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan berkualitas serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, Selasa (14/3/2023). Penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham DIY peringkat terbaik 1 IKPA Award kategori pagu besar.



Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan penghargaan berhasil diraih dalam kontestasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Award Semester II Tahun 2022. Kontestasi IKPA Award ini diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY. Tujuannya yaitu memacu satuan kerja dapat menyajikan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan berkualitas serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, Selasa (14/3/2023). Penghargaan yang berhasil diraih Kanwil Kemenkumham DIY Peringkat terbaik ke 2 pagu kecil.



Kanwil Kemenkumham DIY berhasil menjadi juara dalam Turnamen Komisi Yudisial Cup Tahun 2023. Turnamen ini dilaksanakan di Lapangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 10-20 Maret 2023.

Tim Kemenkumham DIY diperkuat oleh para pemain gabungan dari Unit Pelaksana Teknis. Usia para pemain yang berlaga pada turnamen ini adalah di atas 27 tahun sesuai dengan persyaratan.

Pada laga final Senin (20/3/23), Kemenkumham DIY berhasil mengalahkan Universitas Aisyiyah Yogyakarta.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY meraih penghargaan di bidang hukum dan kerja sama dari Badan Narkotika Nasional (BNN) di momen peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2023. Kanwil Kemenkumham DIY menjadi satu-satunya satuan kerja Kemenkumham yang meraih penghargaan ini.

Penghargaan diserahkan oleh Kepala BNN Komjen Pol Petrus R Golose pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Garuda Wisnu Kencana Cultural Park, Badung, Bali, Senin (26/6/2023) malam.



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY turut hadir dalam kegiatan Stakeholder Day Triwulan III yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta. Kanwil Kemenkumham DIY memborong sejumlah penghargaan dalam kegiatan ini. Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan penghargaan untuk capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023. Kanwil Kemenkumham DIY meraih Peringkat I Pagu



Besar DIPA Setjen, Peringkat II Pagu Kecil DIPA KI, dan Peringkat II Pagu Mikro DIPA Imigrasi.

Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan Peringkat I Nilai IKPA Semester I Tahun 2023 kategori Pagu Besar. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto dan Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti. Penghargaan diserahkan dalam Penganugerahan IKPA Award Semester I Tahun 2023 dan LKKL Award Tahun 2022 dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Yogyakarta.



Kanwil Kemenkumham DIY kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Kanwil Kemenkumham DIY meraih penghargaan Peringkat II LKKL Award Tahun 2022 kategori Satker Besar. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto dan Kepala Divisi Administrasi Rahmi Widhiyanti. Penghargaan diserahkan dalam Penganugerahan IKPA Award Semester I Tahun 2023 dan LKKL Award Tahun 2022 dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Yogyakarta.



Kanwil Kemenkumham DIY meraih Terbaik II Pelaksanaan Program Unggulan One Village One Brand dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam puncak acara Merek Festival di Lapangan Merah Kemenkumham, Rabu (25/10/2023).



Kanwil Kemenkumham DIY meraih prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB). Kanwil Kemenkumham DIY menjadi satu dari lima Kantor Wilayah Kemenkumham yang menerima penghargaan ini. Penghargaan diserahkan langsung oleh Insektur Jenderal Kemenkumham, Razilu dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B12) di Hotel Harper Malioboro, Selasa (5/12/2023).



Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pembina KKPHAM yang memenuhi sejumlah kriteria penilaian, yakni nilai murni KKPHAM tertinggi, mendapatkan penghargaan KKPHAM selama tiga kali berturut-turut, konsisten melaporkan aksi HAM dengan capaian minimal 80 pada tahun sebelumnya, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran ham yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten/Kota hingga 17 September 2023.



Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menganugerahkan penghargaan Kinerja Reformasi Birokrasi dan Kantor Wilayah dengan Kinerja Terbaik kepada Kanwil Kemenkumham DIY.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Yasonna Laoly pada penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Kanwil Kemenkumham DIY meraih Terbaik I Kinerja Terbaik kategori Kantor Wilayah Kecil dan Peringkat Pertama Pelaksanaan Kinerja Reformasi Birokrasi tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menganugerahkan penghargaan Kinerja Reformasi Birokrasi dan Kantor Wilayah dengan Kinerja Terbaik kepada Kanwil Kemenkumham DIY.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Yasonna Laoly pada penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Kanwil Kemenkumham DIY meraih Terbaik I Kinerja Terbaik kategori Kantor Wilayah Kecil dan Peringkat Pertama Pelaksanaan Kinerja Reformasi Birokrasi tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



Demikian penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.



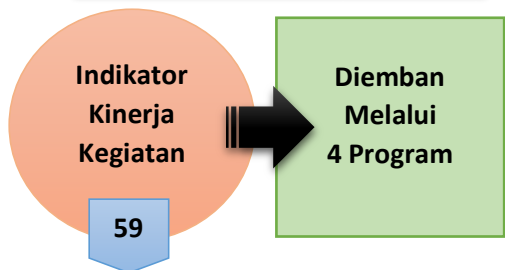
Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta untuk membantu pencapaian Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 yang terdiri dari:

SASARAN KEGIATAN

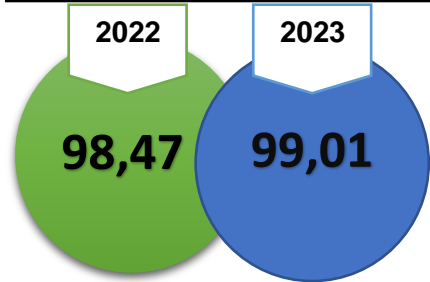
1. Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum;
3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD;
4. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
5. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal;
6. Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah;
7. Terasiliasinya rancangan produk hukum di daerah;
8. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;
9. Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah;
10. Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah;
11. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM;
12. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah;
13. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemyarakatan yang berkualitas di wilayah;
14. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar;
15. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi;
16. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar;
17. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar;
18. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar;
19. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban;
20. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar;
21. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah;
22. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah



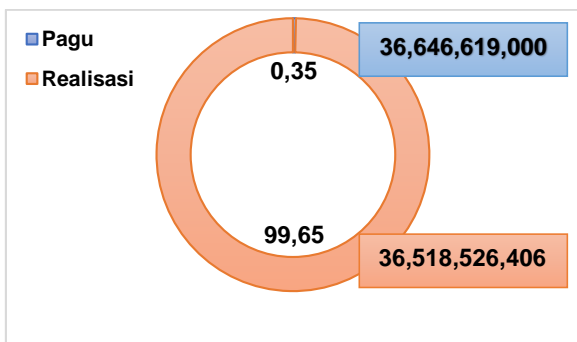
INDIKATOR KINERJA



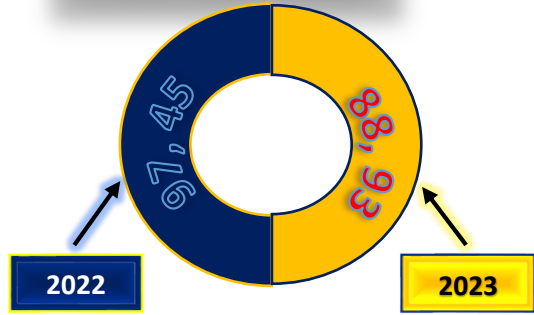
PENILAIAN IKPA 2023



Kinerja Keuangan 2023



PENILAIAN SMART



Pencapaian Sasaran Program tersebut diukur melalui 22 (dua puluh dua) Sasaran Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta sebagai berikut:



Tabel 1.1 Realisasi Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (dalam ribuan rupiah)
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1 Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,94 Indeks	127%	25.790.951.000
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1 Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-8.2%	-163.8%	2.429.950.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1 Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	100 %	116%	
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1 Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	732 Layanan	10.606 Layanan	1449%	2.272.303.000
	2 Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1 Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	2.272.303.000
	2 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100%	
	3 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan	5 Laporan	100%	
Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1 Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%	261.246.000
	2 Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	5 Buku	500%	
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1 Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	117%	146,25%	320.000.000
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	27 Orang	108%	
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	1 Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	



Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	272,09%	331,81%	2.562.781.000
	2	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	518,18%	647,72%	
	3	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75%	95,09	123,89%	
	4	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	140,81%	201,15%	
	5	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	600%	3000%	
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	200%	239.895.000
	2	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	167%	
	3	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	900%	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133%	
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	1	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks	96 Indeks	117%	
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	100%	11%	869.208.000
	2	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	111%	
	3	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	100%	111%	
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	98%	141%	
	2	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%	
	3	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	118%	



	4	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	100%	100%
	5	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	60%	193%
	6	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	100%	139%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%
	2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	79%	132%
	2	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	82%	149%
	3	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	82%	234%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%
	2	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
	3	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111%
	4	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	98%	109%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	100%	118%
	2	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	100%	126%
	3	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	100%	116%
	4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	126%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	100%	118%
	2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	126%
	3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	116%



	4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	100%	125%	
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%	
	2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%	
	3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	100%	100%	
	4	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	100%	125%	
	5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%	
	6	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	118%	
	7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	100%	127%	
	8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	100%	370%	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,88 Indeks	119%	1.900.285.000
	3	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	3,86 Indeks	123%	



BAB I

Pendahuluan

**Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaporan kinerja merupakan salah satu sub sistem SAKIP yang akan menghasilkan suatu laporan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat pada organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam pelaporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.



B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

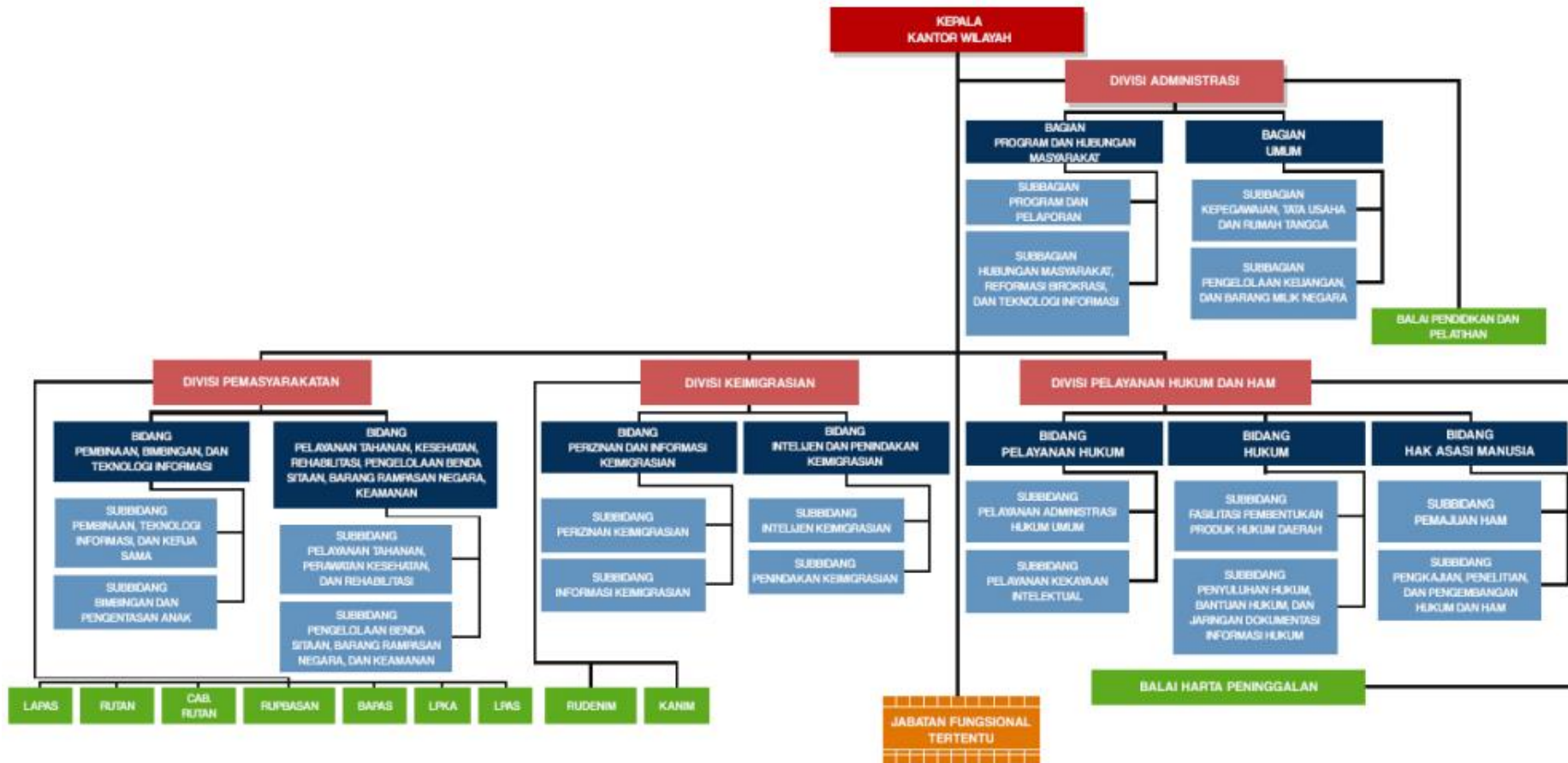
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang- undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Pemasyarakatan;
5. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta





Kepala Kantor Wilayah dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu oleh para koordinator yaitu Koordinator Administrasi, Koordinator Masyarakat dan Koordinator Keimigrasian. Pada saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia istilah Koordinator dirubah menjadi Divisi masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Kepala Divisi. Divisi-divisi tersebut terdiri dari:

1. DIVISI ADMINISTRASI

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan laporan;
- c. Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik Negara;
- e. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- f. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran, fasilitas, penataan organisasi, tata laksana dan reformasi



birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- 2) penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 3) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- 4) pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- 5) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- 2) Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- 2) penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- 3) pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- 4) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.



Bagian Umum, terdiri atas:

- 1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Sub Bagian Kepegawaian , TU dan Rumah Tangga;
- 2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dann pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda barang sitaan dan barang rampasan Negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara, serta keamanan dan ketertiban;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasarakatan, dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,



pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama; dan
 - 2) Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
- b. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas



melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Bidang ini menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi;
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

3. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, penindakan keimigrasian;



- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelejen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d. Pengoodinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari:

a. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan



Keimigrasian;

- 2) Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

b. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- 2) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

- 1) Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan persiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- 2) Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan persiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

4. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan di wilayah. Dalam



melaksanakan tugasnya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- a. Bidang Pelayanan Hukum



Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 2) Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

b. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan



fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah;
- 2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi



informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Pemajuan HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia, dan



pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia;

- 2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

5. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pengertian Unit Pelaksana Teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Divisi Terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta terdiri atas 16 (enam belas) Unit Pelaksana Teknis diantaranya:

Tabel 1.2 Alamat Unit Pelaksana Teknis

No	Unit Pelaksana Teknis	Eselon	Alamat
1	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	IIIA	Jalan Solo Km 10 Yogyakarta. Po.Box. 10 YKAP Telp (0274) 487130, 489165 Email : kanim_yogyakarta@imigrasi.go.id
2	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	IIIA	Jalan Tamansiswo Nomor 6 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 376126-375802 Fax (0274) 376126 Email : lapasjogja86@yahoo.com
3	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	IIIA	Jalan Kaliurang Km. 17 Yogyakarta Telp. (0274) 895433 Faksimili : (0274) 895422 Email : lapas_narkotika_jogja@yahoo.co.id
4	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	IIIB	Alamat Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman 55288 Yogyakarta Telp/Fax : (0274) 867585 Email : lapas_sleman@yahoo.co.id Website : www.lapassleman.com



5	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	IIIB	Jalan Tamansiswo Nomor 6 Yogyakarta 55111 Email : lppjogja2016@yahoo.co.id
6	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	IIIA	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : lpkajogja@gmail.com
7	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	IIIA	Jalan Godean KM. 9,2 Senoko, Sidoagung, Godean, Sleman, Yogyakarta 55564 Telepon : (0274) 2823661 Laman : www.kemenkumham.go.id Surel : bps.yogyakarta@kemenkumhamgo.id
8	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	IV	Jalan Taman Siswa No. 6A Yogyakarta Telp. (0274) 450247 Fax. (0274) 450248 Email : rutanjogja@gmail.com
9	RUTAN KELAS IIB WATES	IV	Jalan Suparman No. 03 Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773051 Fax (0274) 773015 Email : rutanwates@yahoo.co.id
10	RUTAN KELAS IIB BANTUL	IV	Jalan Guwosari Pajangan Bantul Telp. (0274) 6462012 Faks : 6461011 Email : rutan.bantul@yahoo.co.id
11	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	IIIB	Jalan Mgr. Sugiyopranoto 35 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 391310 Email : www.wonosarirutan@gmail.com
12	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	IV	Jalan Tamansiswa No. 8 Yogyakarta 55111 Telp. (0274) 419435 – 389170 Email : rupbasanyk@gmail.com , rupbasanyk@yahoo.com Website : www.rupbasanjogja.com
13	RUPBASAN KELAS II WATES	IV	Jalan Sugiman Gang Bispa No. 1 Wates Telp./Fax : (0274) 7496799, 775322 Email : rupbasanwates@gmail.com
14	RUPBASAN KELAS II BANTUL	IV	Jalan Srandakan Pandak Wijirejo Pandak Bntul 55761 Telp/Faksimile : (0274) 6462376 Email : rupbasanbantul@yahoo.com
15	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	IV	Jalan Ki Ageng Giring No. 10 Wonosari, Gunungkidul 55813 Telp./Fax : (0274) 394185 Email : rupbasan_wonosari@yahoo.com
16	BAPAS KELAS II WONOSARI	IVA	Jalan Mgr. Sugiyopranoto No. 37 Wonosari 55811 Telp./Fax : (0274) 392929 Email : bapaswonosari@yahoo.com



6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta :

1. Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama;
2. Fungsional Perancang Peraturan perundang-undangan Muda;
3. Fungsional Penyuluh Hukum Pertama;
4. Fungsional Penyuluh Hukum Muda;
5. Fungsional Penyuluh Hukum Madya;
6. Fungsional Analis Hukum Pertama;
7. Fungsional Analis Hukum Muda;
8. Fungsional Analis Hukum Madya;
9. Fungsional Analis Keimigrasian Madya;
10. Fungsional Analis Keimigrasian Muda;
11. Fungsional Analis Kepegawaian Pertama;
12. Fungsional Analis Kepegawaian Muda;
13. Fungsional Arsiparis Ahli Pertama;
14. Fungsional Arsiparis Ahli Muda;
15. Fungsional Analis Anggaran Pertama;
16. Fungsional Paranata Komputer Pertama;
17. Fungsional Paranata Komputer Muda;
18. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan JAsa Pertama;
19. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan JAsa Muda;
20. Fungsional Pranata Humas Pertama;
21. Fungsional Pranata Keuangan APBN Trampil;
22. Fungsional Pembimbing kemasyarakatan Madya.

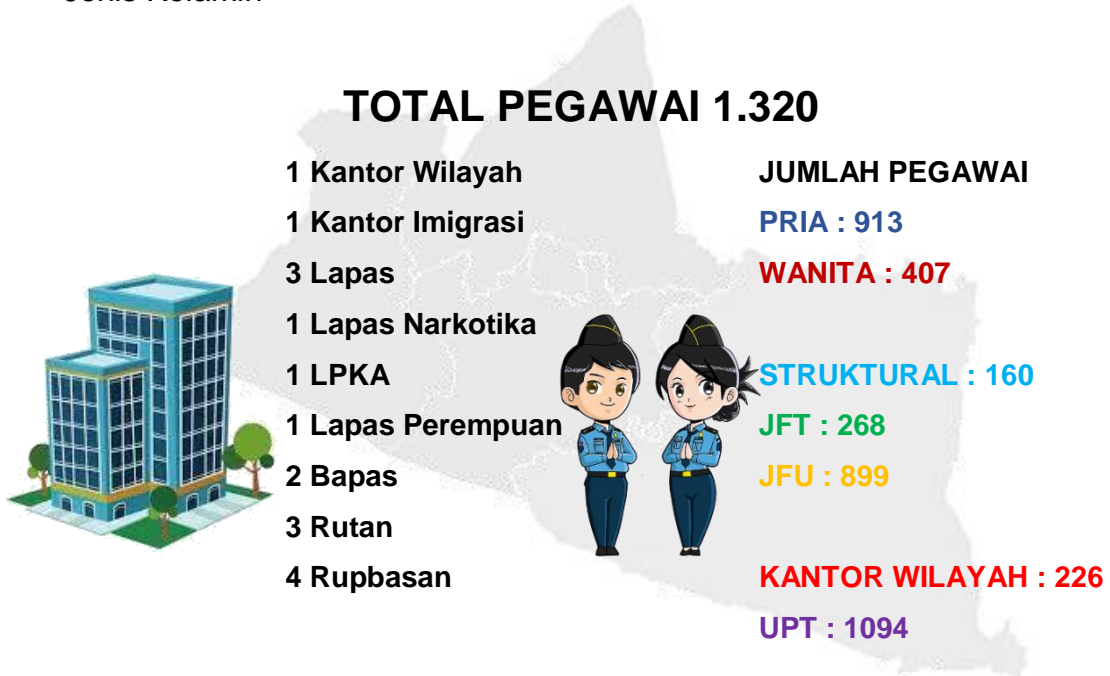
7. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugastugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta dan Unit Pelaksana Teknis



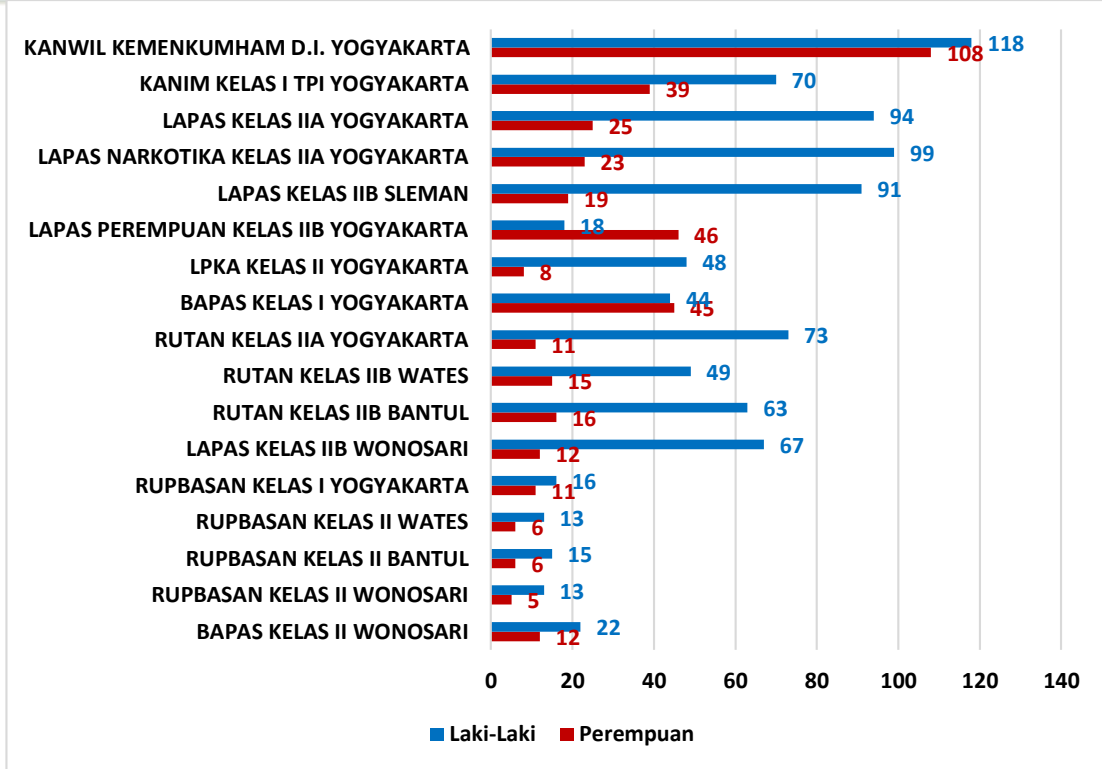
dibawahnya, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2023:

a. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT berdasarkan Golongan

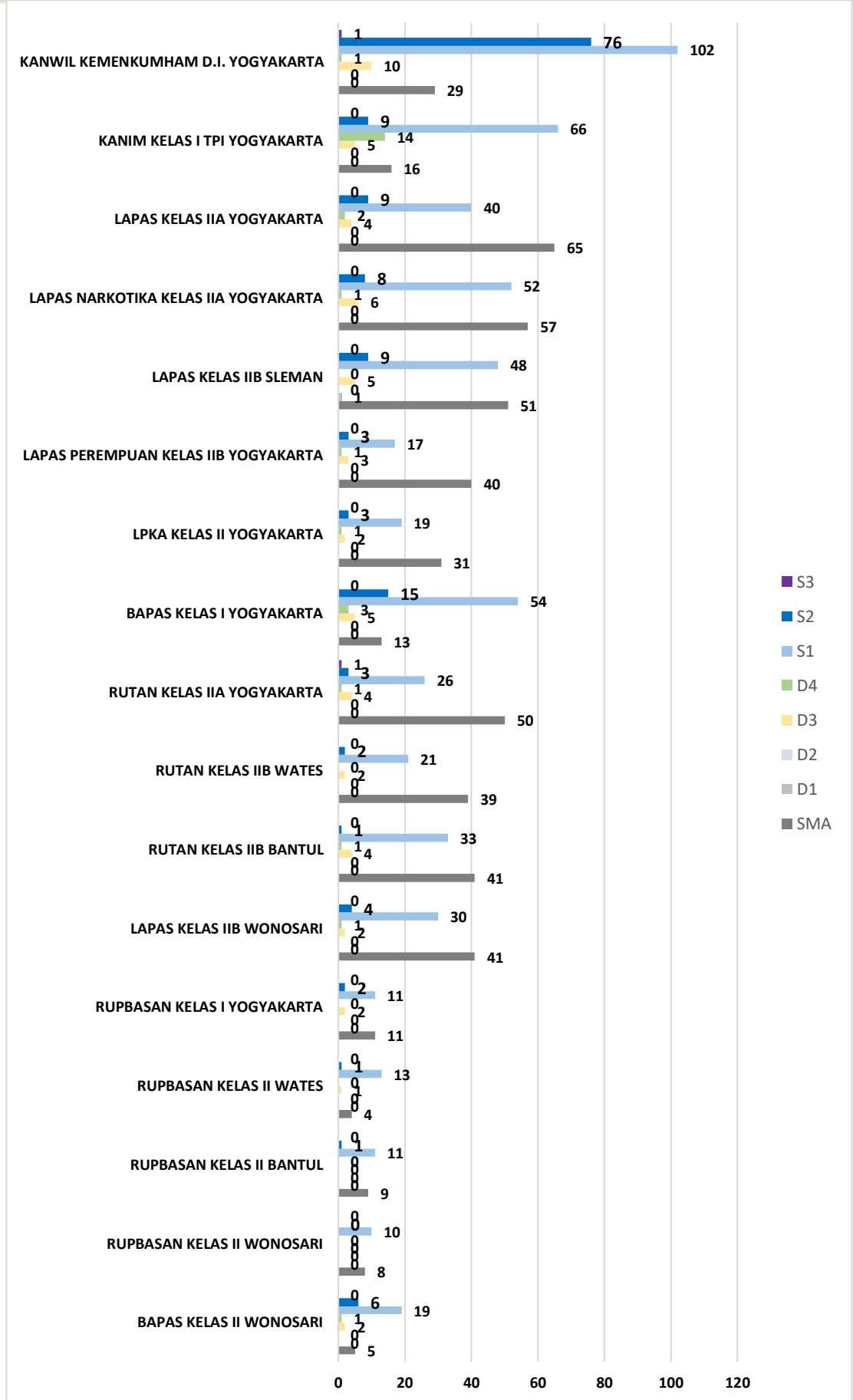
NO	SATUAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	118	108	226
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	70	39	103
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	94	25	109
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	99	23	122
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	91	19	110
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	18	46	64
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	48	8	56
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	44	45	89
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	73	11	84
10	RUTAN KELAS IIB WATES	49	15	64
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	63	16	79
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	67	12	79
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	16	11	27
14	RUPBASAN KELAS II WATES	13	6	19
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	15	6	21
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	13	5	18
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	22	12	34
TOTAL		913	407	1.320



b. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	SATUAN KERJA	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I.Y	29			10	1	102	76	1
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	16			5	14	66	9	
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	65			4	2	40	9	
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YK	57			6	1	52	8	
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	51	1		5		48	9	
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YK	40			3	1	17	3	
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	31			2	1	19	3	
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	13			5	3	54	15	
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	50			4	1	26	3	1
10	RUTAN KELAS IIB WATES	39			2		21	2	
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL	41			4	1	33	1	
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	41			2	1	30	4	
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	11			2		11	2	
14	RUPBASAN KELAS II WATES	4			1		13	1	
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL	9					11	1	
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	8					10		
17	BAPAS KELAS II WONOSARI	5			2	1	19	6	
TOTAL		509	1		57	27	570	154	2

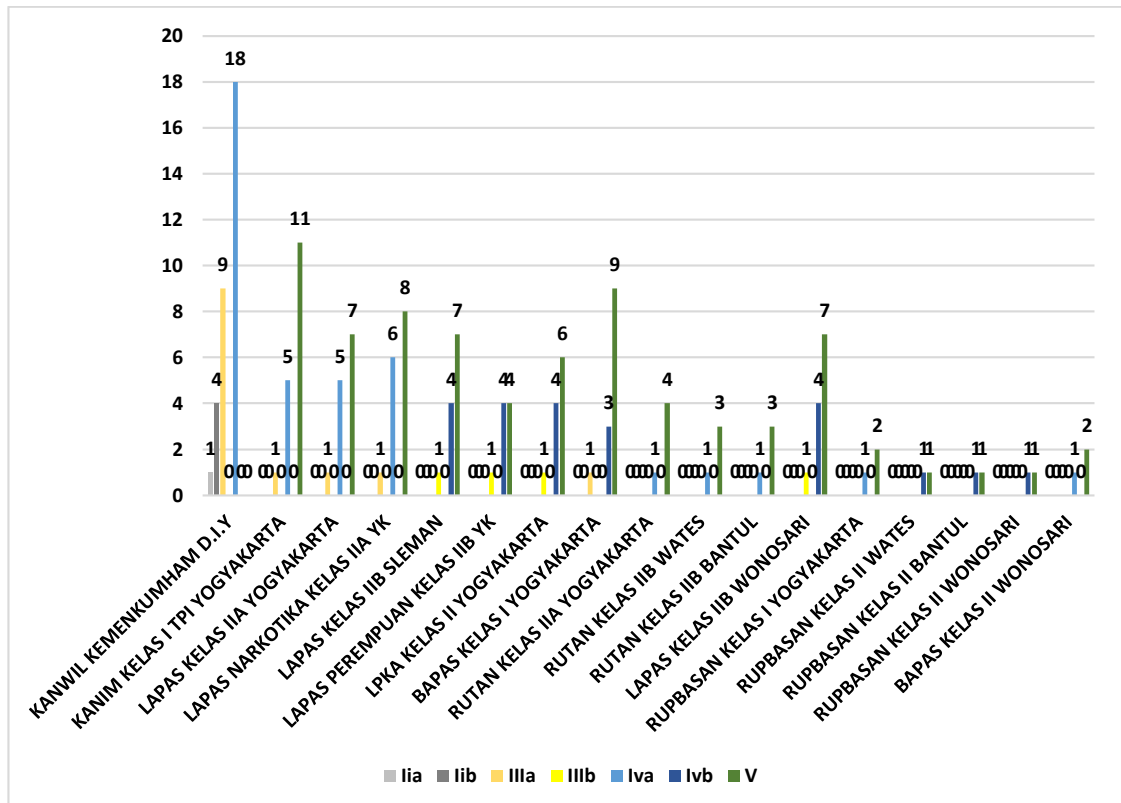




c. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah dan UPT D.I. Yogyakarta Berdasarkan Eselon

Tabel 1.5 Jumlah pegawai Kantor Wilayah dan UPT berdasarkan Eselon

NO	SATUAN KERJA	Ila	Iib	IIla	IIlb	IVa	IVb	V
1	KANWIL KEMENKUMHAM D.I.Y	1	4	9		18		
2	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA			1		5		11
3	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA			1		5		7
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YK			1		6		8
5	LAPAS KELAS IIB SLEMAN				1		4	7
6	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YK				1		4	4
7	LPKA KELAS II YOGYAKARTA				1		4	6
8	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA			1			3	9
9	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA					1		4
10	RUTAN KELAS IIB WATES					1		3
11	RUTAN KELAS IIB BANTUL					1		3
12	LAPAS KELAS IIB WONOSARI				1		4	7
13	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA					1		2
14	RUPBASAN KELAS II WATES						1	1
15	RUPBASAN KELAS II BANTUL						1	1
16	RUPBASAN KELAS II WONOSARI						1	1
17	BAPAS KELAS II WONOSARI					1		2
TOTAL		1	4	13	4	39	22	76

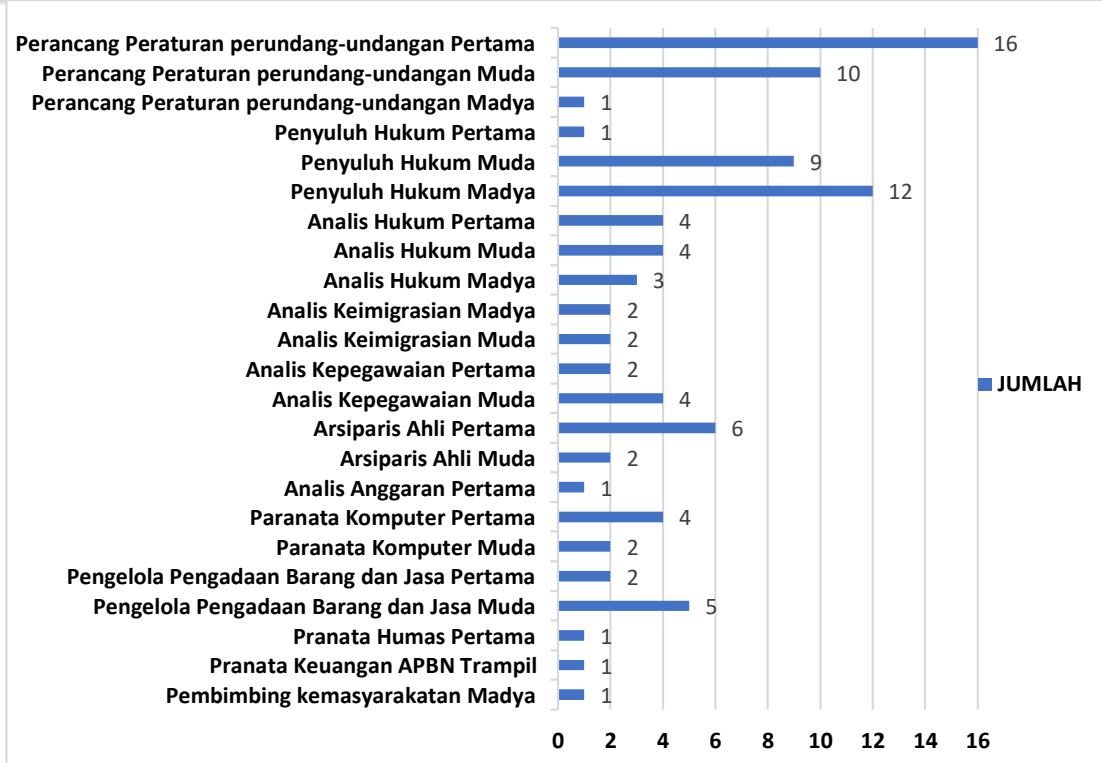




d. Jumlah pegawai JFT Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta berjumlah 94 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6 JFT Kantor Wilayah

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH
1	Perancang Peraturan perundang-undangan Pertama	16
2	Perancang Peraturan perundang-undangan Muda	10
3	Perancang Peraturan perundang-undangan Madya	1
4	Penyuluh Hukum Pertama	1
5	Penyuluh Hukum Muda	9
6	Penyuluh Hukum Madya	12
7	Analisis Hukum Pertama	4
8	Analisis Hukum Muda	4
9	Analisis Hukum Madya	3
10	Analisis Keimigrasian Madya	2
11	Analisis Keimigrasian Muda	2
12	Analisis Kepegawaian Pertama	2
13	Analisis Kepegawaian Muda	4
13	Arsiparis Ahli Pertama	6
14	Arsiparis Ahli Muda	2
15	Analisis Anggaran Pertama	1
16	Paranata Komputer Pertama	4
17	Paranata Komputer Muda	2
18	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama - Sekjend	2
19	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda - Sekjend	5
20	Pranata Humas Pertama	1
21	Pranata Keuangan APBN Trampil	1
22	Pembina Keamanan Pemasarakatan Madya	1
TOTAL		94



- e. Penambahan dan Pengurangan Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Jumlah pegawai pada Desember 2022 : 221 orang
 Jumlah pegawai pada Desember 2023 : 226 orang (7JF Barjas Sekjend)



Penambahan pegawai sebanyak 12 orang
 Pegawai Pensiun 2023: 3 Orag

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini adalah untuk melaporkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dalam pencapaian atas perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. penyediaan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;



2. penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang datang;
3. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, serta
4. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu selain sebagai sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dalam upaya untuk memperbaiki kinerja perencanaan dan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

E. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di wilayah D.I. Yogyakarta. Keberadaan organisasi ini sangat penting untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah. Adapun aspek strategis yang menjadikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta menjadi penting keberadaanya adalah:

1. Memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
2. Memfasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
3. Perlunya komando dalam pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
4. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

F. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tentu saja terdapat beberapa isu strategis yang dianggap dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut beberapa isu strategis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta:



1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian kerja pegawai, karena sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat mendukung dalam proses kegiatan perkantoran. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai, pegawai akan lebih mudah dan efektif dalam menyelesaikan tugasnya dan kepuasan kerja pun akan tercapai. Selain dalam hal pencapaian kerja, sarana dan prasarana yang ada akan membuat pegawai nyaman dalam bekerja. Untuk itu, sarana dan prasarana kantor merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar. Selain itu, hal tersebut juga mampu menunjang kebutuhan dalam melayani masyarakat. Adapun kondisi sarana dan prasarana saat ini di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta belum *representative* dikarenakan ada beberapa sarana dan prasarana belum tersedia antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman unit kerja terkait dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana baik pemanfaatan, pemeliharaan, maupun penghapusan, dan rencana kebutuhan Barang milik negara dengan perlunya pengadaan sarana dan prasarana melalui renovasi dan rehabilitasi gedung kantor serta keterkaitan dengan prioritas kebutuhan maupun sasaran yang ingin dicapai;
- b. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai) tidak dilandasi oleh hasil Analisa beban kerja dan analisa kebutuhan pegawai, tidak diimbangi dengan kebutuhan sarana peralatan kinerja dan prasarana ruang kerja;
- c. Perubahan regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah, khususnya dalam pengharmonisasian peraturan di daerah tidak diikuti dengan kebutuhan prasarana ruang rapat maupun sarana fasilitas pendukung lainnya;
- d. Semakin meningkatnya tuntutan kualitas layanan publik, baik di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, akses layanan pengaduan masyarakat;
- e. Meningkatnya Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. Peningkatan kualitas layanan keimigrasian, Kekayaan Intelektual, dan Pemasyarakatan.



2. Struktur organisasi Kanwil yang cukup luas

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit terkecil Kantor Wilayah, terdapat tugas pekerjaan yang berbeda menjadi tugas dan fungsi tanggungjawab pada satu unit kerja, sebagai contoh pada Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga, demikian pula pada Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, sehingga dapat mengurangi optimalisasi capaian kinerja.

3. Belum terfasilitasinya formasi untuk jabatan fungsional tertentu

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaannya masih di level eselon I, tingkat Kantor Wilayah belum dilaksanakan dengan baik . Selain itu peluang inpasing Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) bagi pegawai sudah ditutup tahun 2021, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadi kesenjangan antara pegawai lama dengan pegawai baru yang langsung diangkat menjadi JFT. Dalam pelaksanaan tugasnya JFT juga memiliki kecenderungan hanya melaksanakan tugas JFT, sedangkan untuk melaksanakan tugas yang lain cenderung diabaikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjalankan tugas dan fungsi di bidang hak asasi manusia, bidang peraturan perundang-undangan, bidang administrasi hukum umum, bidang kekayaan intelektual, bidang pemasyarakatan, dan bidang keimigrasian.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Permasalahan/ Hambatan, Upaya dan Saran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi/ Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta antara lain :



1. DIVISI ADMINISTRASI

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2023

Tabel 1.7 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Administrasi

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SAKTI sering lama dalam penggunaannya mulai dari login hingga tahap pemrosesan transaksi keuangan. Hal ini memberikan dampak tertundanya pekerjaan seperti pengajuan SPM, penginputan pendetailan persediaan dan aset. 2. Aplikasi OMSPAN sering lama dalam penggunaannya mulai dari login hingga tahap pemrosesan transaksi. Hal ini memberikan dampak tertundanya pekerjaan seperti penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan capaian IKPA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan secara tepat waktu; 2. terselesaikannya pagu minus belanja pegawai pada Kanwil dengan cepat; 3. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai secara tepat waktu; 4. Pengamanan BMN pemasangan papan nama untuk Tanah Negara dan Rumah Negara di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya seluruh target kinerja sub bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN Tahun 2023; 2. Tercapainya pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal; 3. Terlaksananya pembayaran gaji, gaji ke-13, THR, tunjangan kinerja, uang makan, lembur, dan gaji susulan; 4. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran bulan Januari sampai Desember 2023; 5. Laporan capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bulan Januari sampai Desember 2023; 6. Surat Hasil Rekonsiliasi Bulan Januari sampai November 2023; 7. Laporan realisasi anggaran; 8. Laporan pertanggungjawaban tunjangan kinerja bulan Januari sampai Desember 2023; 9. SE Kepala Kanwil kepada seluruh UPT apabila melakukan revisi anggaran belanja modal harus melalui persetujuan Kantor Wilayah; 10. Laporan Analisis usulan revisi belanja modal Satuan Kerja; 11. Terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Selama Tahun 2023 12. Terlaksananya Revisi Anggaran Selama Tahun 2023 13. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (SK) yaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W14-237.KU.02.03



			<p>Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-238.KU.02.03 Tahun 2022 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>c. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W14-259.KU.02.03 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pemberian Honorarium Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>d. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-240.KU.04.02 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi</p>
--	--	--	---



			<p>Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-243.PB-04.05 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Tim Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-1361.KU.02.03 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Penetapan Pengelola Keuangan Sebagai Verifikator Surat Perintah Membayar Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.</p> <p>g. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-245.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409180);</p> <p>h. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-247.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	--	--	--



			<p>dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409181);</p> <p>i. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-248.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409182);</p> <p>j. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-249.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409183);</p> <p>k. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-251.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409184);</p> <p>l. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-253.KU.03.03</p>
--	--	--	---



			<p>Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409185);</p> <p>m. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-254.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409186);</p> <p>n. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-256.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409187);</p> <p>o. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor:W14-257.KU.03.03 Tahun 2023 Tanggal 3 Januari 2023 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum</p>
--	--	--	---



			<p>dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta (409188);</p> <p>p. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W14-1371.KU.02.03 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Dan Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>q. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor W14-1366.KU.02.03 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>r. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor W14-1368.KU.02.03 Tahun 2023 Tanggal 5 Januari 2023 Tentang Perubahan Kesatu Atas Pemberian Honorarium Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023;</p> <p>14. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:</p> <p>a. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan</p>
--	--	--	---



			<p>HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>b. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.03.0400.409180.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>c. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.05.0400.409182.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Pemasarakatan.</p> <p>d. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.06.0400.409183.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Imigrasi.</p> <p>e. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>f. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>g. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.09.0400.409186.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen HAM.</p> <p>h. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.10.0400.409187.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA BPHN.</p> <p>i. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Satuan Kerja [013.11.0400.409188.000KD] Kantor</p>
--	--	--	---



			<p>Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Balitbang HAM.</p> <p>15. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM:</p> <p>a. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Wilayah [013.06.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Imigrasi.</p> <p>b. Laporan Keuangan TA 2022 <i>Unaudited</i> Tingkat Wilayah [013.05.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Ditjen Pemasarakatan.</p> <p>16. Hasil Pelaksanaan Monev ke UPT terkait pelaksanaan anggaran dan capaian IKPA:</p> <p>17. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>18. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.03.0400.409180.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>19. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.05.0400.409182.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Pemasarakatan.</p> <p>20. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.06.0400.409183.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Imigrasi.</p> <p>21. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor</p>
--	--	--	---



			<p>Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>22. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>23. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.09.0400.409186.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen HAM.</p> <p>24. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.10.0400.409187.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA BPHN.</p> <p>25. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.11.0400.409188.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Balitbang HAM.</p> <p>26. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Wilayah [013.06.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Imigrasi.</p> <p>27. Laporan Keuangan Semester I TA 2023 Tingkat Wilayah [013.05.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Ditjen Pemasarakatan.</p> <p>28. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.01.0400.409181.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Sekretariat Jenderal.</p> <p>29. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.03.0400.409180.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Administrasi Hukum Umum.</p> <p>30. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023</p>
--	--	--	---



			<p>Tingkat Satuan Kerja [013.05.0400.409182.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Pemasarakatan.</p> <p>31. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.06.0400.409183.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Imigrasi.</p> <p>32. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.07.0400.409184.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Kekayaan Intelektual.</p> <p>33. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.08.0400.409185.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen Perundang Undangan.</p> <p>34. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.09.0400.409186.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Ditjen HAM.</p> <p>35. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.10.0400.409187.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA BPHN.</p> <p>36. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Satuan Kerja [013.11.0400.409188.000KD] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIPA Balitbang HAM.</p> <p>37. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Wilayah [013.06.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Imigrasi.</p> <p>38. Laporan Keuangan Triwulan III TA 2023 Tingkat Wilayah [013.05.0400] Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta DIPA Ditjen</p>



			<p>Pemasyarakatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 39. terselesaikannya pagu minus belanja pegawai pada Kanwil dan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta. 40. terselesaikannya administrasi pergeseran antar belanja (Revisi DIPA) pada Kanwil dan UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta; 41. Penyetoran sisa UP/TUP ke kas negara tepat waktu. 42. Terlaksananya pengelolaan, penatausahaan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta. 43. Peminjaman kendaraan dinas terlaksananya secara tertib; 44. Pajak kendaraan dinas dibayarkan tepat waktu; 45. <i>Stock opname</i> barang persediaan terlaksananya dengan tertib dan optimal 46. Hasil Pelaksanaan Monev ke UPT terkait BMN
<p>Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkendala waktu pelaksanaan kegiatan workshop/sosialisasi/pelatihan mengingat banyaknya kegiatan yang ada di Subbagian Kepegawaian; 2. Jumlah diklat / pelatihan yang disediakan oleh penyelenggara diklat Kemenkumham belum mampu mengakomodir kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham DIY; 3. Pengelolaan kinerja dan penegakan disiplin pegawai belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Administrasi; 4. Proses penilaian angka kredit untuk Pejabat Fungsional mengalami perubahan; 5. Unit Pelaksana Teknis belum secara penuh menerapkan dan mempedomani 4 Pilar Kearsipan dalam pengelolaan arsip dinamis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelayanan publik di subbag kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga; 2. terselesaikannya proses kenaikan pangkat tepat waktu; 3. Penyelesaian administrasi surat masuk dan keluar pada subbag kepegawaian secara tepat waktu; 4. terselesaikannya pengusulan pencantuman gelar pegawai jajaran Kanwil Kemenkumham DIY; 5. Terselenggaranya pelaksanaan rekrutmen CPNS dan CATAR Kemenkumham TA 2023 yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY; 6. terselesaikannya Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Kanwil Kemenkumham DIY; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggaranya pelayanan publik dengan penggunaan Aplikasi berbasis <i>paper less</i> (internal dan eksternal) di subbag kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga seperti ijin belajar, ijin penelitian/ magang, penghargaan pegawai, dll; 2. terselesaikannya proses mutasi pegawai (seperti Kenaikan Pangkat, Pencantuman Gelar, Pensiun, dll) tepat waktu dengan penggunaan aplikasi berbasis <i>paper less</i> 3. Terlaksananya ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, penilaian kompetensi pegawai, dan ujian bagi JF sesuai ketentuan; 4. Penyelesaian administrasi surat masuk dan keluar pada subbag kepegawaian;



	<p>6. Pejabat dan Pengelola Arsip belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan peraturan terkait pengelolaan arsip dinamis</p> <p>7. Masih kurangnya pemahaman tentang Pengelolaan Kearsipan di Unit Pelaksana Teknis.</p>	<p>7. Terselenggaranya diklat / pelatihan yang dilaksanakan secara mandiri oleh Kanwil Kemenkumham DIY dengan menghadirkan narasumber yang berkomepeten bagi Pegawai Jajaran Kanwil kemenkumham DIY;</p> <p>8. Terselenggaranya pengusulan promosi dan mutase bagi Pegawai Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY;</p> <p>9. Tersusunnya penilaian kinerja pegawai secara periodik bagi seluruh pegawai di Kaniwl Kemenkumham DIY;</p> <p>10. Tersusunnya data kebutuhan pegawai yang kemudian diusulkan ke Sekretariat Jenderal;</p> <p>11. Terselenggaranya reward dan punishment bagi pegawai Kanwil Kemenkumham DIY;</p> <p>12. Terselenggarakannya pengusulan pension bagi Pegawai Jajaran Kanwil Kemenkumham DIY secara tepat waktu.</p>	<p>5. Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan workshop, sosialisasi, internalisasi, maupun pelatihan bagi pegawai;</p> <p>6. Terlaksananya penegakan disiplin bagi pegawai sesuai ketentuan;</p> <p>7. Terlaksananya digitalisasi arsip Vital di lingkungan Kanwil sejumlah 78 Arsip yang terdiri dari Arsip MoU dan Arsip Bukti Kepemilikan Aset</p> <p>8. Terlaksananya pembinaan kearsipan melalui kegiatan bimbingan teknis kearsipan bagi Pejabat dan pengelola arsip di Jajaran Kantor Wilayah tanggal 21 Februari 2023 dengan peserta pengelola arsip dari masing-masing Divisi dan 16 Unit Pelaksana Teknis sebanyak 75 Orang.</p> <p>9. Terlaksananya Monitoring terkait digitalisasi arsip di 16 Unit Pelaksana Teknis (100%).</p> <p>10. Terlaksananya pengusulan daftar arsip usul musnah 2023 kantor wilayah ke Biro Umum sejumlah 4.939 Arsip yang terdiri dari 956 Arsip Substantif dan 3.983 Arsip Fasilitatif</p>
<p>Subbagian Program dan Pelaporan</p>	<p>1. Koordinasi Unit Eselon I terkait Penyusunan, Pengelolaan anggaran serta Laporan Perencanaan Anggaran belum terstruktur</p> <p>2. Sering terjadi revisi yang menyesuaikan dengan kebutuhan</p> <p>3. Perubahan Postur anggaran yang berdampak pada penyusunan RKA-K/L;Ketidakpastiannya waktu penganggaran;</p> <p>4. Belum adanya SOP penyelesaian TLHP Audit Itjen maupun Pemeriksaan BPK</p> <p>5. Kurangnya koordinasi satker yang terdapat temuan dalam kesesuaian pemenuhan rekomendasi penyelesaian</p> <p>6. Kurang optimalnya peran satgas SPIP dalam melakukan pemantauan pengawasan kegiatan pengendalian</p> <p>7. Terdapat ketidaksesuaian Format</p>	<p>1. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. Kantor Wilayah yang dipimpin Imam Jauhari itu berhasil meraih penghargaan Terbaik II atas Kinerja Berdasarkan Parameter IKPA, SMART, Nilai SAKIP, Nilai WBK/WBBM, dan Target Kinerja.</p> <p>2. Perjanjian kinerja tahun 2022;</p> <p>3. Analisa kebutuhan Anggaran dan Rencana Kerja TA 2023;</p> <p>4. Penandatanganan Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas serta Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas;</p> <p>5. Penelitian Pagu Indikatif TA 2023;</p> <p>6. Supervisi RKAKL Pagu Anggaran TA 2023;</p> <p>7. Rapat Evaluasi Semester II TA 2022;</p>	<p>1. Sepanjang tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY yang dipimpin oleh Agung Rektono Seto meraih berbagai prestasi membanggakan dan prestisius, diantaranya</p> <p>1) Terbaik III Pengelola Media Sosial Tahun 2022</p> <p>2) Terbaik I atas Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM T.A. 2022</p> <p>3) Terbaik III Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta</p> <p>4) Peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori</p>



	<p>penyusunan laporan sesuai dengan Permenkumham yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Belum adanya pendampingan dalam penyusunan Penilaian Lembar Kerja Evaluasi SPIP pada satuan kerja dikarenakan belum terdapat petunjuk teknis dalam penyusunan di tingkat Unit Pelaksana Teknisi 9. LHE penilaian Mandiri Maturitas SPIP belum dapat diterapkan secara menyeluruh pada UPT di Ingkungan Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta 10. Kurangnya kordinasi Penyelenggaraan SPIP di kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta 11. Permasalahan Program dan Anggaran (Yoga) <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan anggaran masih berdasarkan kemauan, belum memperhitungkan kebutuhan riil. 2) Realisasi anggaran tahun sebelumnya belum menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran. 3) Belum adanya standarisasi juknis penyusunan KAK. 4) Usulan belanja modal belum sesuai RKBMN. 5) Timeline pelaksanaan kegiatan dalam KAK belum sinkron atau menjadi acuan dalam penyusunan Kalender Kerja. 6) RPD belum disusun sesuai perkiraan SP2D. 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Menyusun DB, PP, dan kalender kerja; 9. Terlaksananya Supervisi analisa Kebutuhan Tahun 2023; 10. Tersusunnya berbagai Laporan pada Kantor Wilayah (Rencana Strategis Kantor Wilayah Tahun 2022, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Target Kinerja); 11. Terlaksananya Monitoring Penginputan pelaporan SMART, E Monev, dan E Performance 12. Terlaksananya monitoring dan evaluasi evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022. 13. Terlaksananya pelaporan Target Kinerja Tahun 2022 secara tepat waktu. 	<p>Pagu Sedang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Peringkat terbaik I IKPA Award kategori Pagu Besar dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY 6) Penghargaan di bidang hukum dan kerja sama pada Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) dari Badan Narkotika Nasional 7) Peringkat I Pagu Besar DIPA Setjen, Peringkat II Pagu Kecil DIPA KI, dan Peringkat II Pagu Mikro DIPA Imigrasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta 8) Peringkat I Nilai IKPA Semester I Tahun 2023 kategori Pagu Besar dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY 9) Peringkat II LKKL Award Tahun 2022 kategori Pagu Besar dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY 10) Predikat "Informatif" dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik D.I. Yogyakarta Tahun 2023 11) Terbaik II Pelaksanaan Program Unggulan One Village One Brand 12) Penghargaan atas partisipasi pelaksanaan verifikasi dan pemenuhan data dukung RKT RB 13) Penghargaan keberhasilan mendorong pemerintah daerah melaksanakan P5HAM di wilayah 14) Peringkat pertama pelaksanaan kinerja reformasi birokrasi tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 15) Terbaik I kinerja terbaik kategori Kantor Wilayah Kecil 16) Terbaik I Penyusun Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023
--	---	---	---



			<ol style="list-style-type: none"> 2. Kanwil Kemenkumham DIY telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2023. 3. Kanwil Kemenkumham DIY telah menyusun Pagu Kebutuhan TA 2024. 4. Dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham DIY telah melaksanakan penandatanganan dokumen Komitmen Bersama pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas. 5. Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran T.A. 2024, telah dilakukan supervisi penyusunan anggaran dengan tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian Pagu Indikatif b. Supervisi Belanja Modal UPT c. Penelitian Pagu Anggaran TA 2024 d. Tindak Lanjut CHP APIP RKA-K/L e. Penyusunan DP, KK, dan PP f. Supervisi ABT 6. Kanwil DIY melakukan supervisi LKJIP tahun 2022 sebagai bagian dari penyempurnaan pelaporan kinerja. 7. Laporan Evaluasi Semester II tahun 2023 8. Penilaian Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 pada jajaran Kanwil DIY 9. Kanwil DIY melakukan supervisi Pagu Kebutuhan TA 2025 10. Terlaksananya Reviu SOP. 11. Tersusunnya laporan-laporan tahun 2023: <ol style="list-style-type: none"> a. Renja Kanwil DIY b. PK 2023 c. Laporan Kinerja d. Laporan Target Kinerja 12. Terlaksananya monitoring penginputan pelaporan kinerja (SMART, E-Monev Bappenas, dan E-Performance). 13. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. 14. Tersusunnya laporan Target Kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu.
--	--	--	---



<p>Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SDM tidak sebanding dengan beban kerja yang ada 2. Beberapa aplikasi masih menunggu persetujuan penyelenggaraan aplikasi dari SIMDATIN untuk mendapatkan hosting dari Kemenkumham 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengelolaan Website, Videotron, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta; 2. Terlaksananya berbagai kegiatan <i>teleconference</i> sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah terutama selama masa Pandemi Covid 19; 3. Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengelolaan Website, Videotron, Media Sosial, Penanganan Pengaduan dan Pencetakan Spanduk maupun banner sebagai sarana dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta; 2. Terlaksananya pengelolaan Teknologi Informasi dan SPBE Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta (pengelolaan jaringan, instalasi file server, dll) 3. Terlaksananya program Reformasi Birokrasi serta terpenuhinya data dukung yang dibutuhkan
---	--	--	--



2. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2023

Tabel 1.8 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Notaris yang belum paham dalam pengisian SRA, CDD dan EDD. Sehingga resiko Notaris menjadi tinggi dan sangat tinggi. 2. Masih adanya Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran sehingga banyak Notaris yang dipanggil oleh MPD, MPW, MKN dan aparat penegak hukum. 3. Terdapat masyarakat yang belum memahami penggunaan aplikasi AHU Online dalam pendaftaran Perseroan Perorangan, Beneficial Ownership, Pewarganegaraan, kewarganegaraan dan Apostille. 4. Kaitan Perseroan Perorangan masih banyak pelaku usaha yang tidak mau mendaftar PP karena kurangnya pemahaman terhadap pengenaan pajak. 5. Kurangnya data Anak Berkewarganegaraan Ganda dari Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota, sehingga menyulitkan sosialisasi pasal 3A. 6. Pengarsipan Database PPNS yang belum maksimal sehingga kesulitan dalam pencarian data. 7. Masih adanya ketidaksinkronan data pada aplikasi monitoring kanwil, data dari KPU dan Bawaslu terkait data Alamat dan kepengurusan Parta Politik, terutama Partai Politik baru, dikarenakan ada alamat Parpol yang tidak mempunyai kantor perwakilan di D.I. Yogyakarta dan masih adanya Partai Politik yang menggunakan alamat fiktif atau pindah kantor tanpa melakukan pembaharuan data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAGU Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 2.113.000.000 dengan Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2022 Sebesar Rp. 2.111.772.473 atau 99,94 % 2. Target Penerimaan PNPB tahun 2022 Rp 6.633.466.875 dan realisasi Penerimaan PNPB sebesar Rp. 8.753.100.000 atau 131,9 % 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendampingan dan pengawasan Penerapan PMPJ bagi 156 Notaris yang beresiko tinggi dan sangat tinggi di wilayah D.I. Yogyakarta. 2. Melakukan pengawasan dan persidangan terhadap Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran, dengan hasil akhir membuat surat permohonan arahan atas permasalahan Notaris kepada Ditjen AHU. 3. Melakukan Rakor penguatan terhadap tugas pokok dan fungsi MPD,MPW dan MKN. 4. Melakukan Publikasi/ Pameran /Sosialisasi/ Helpdesk layanan Perseroan perorangan, Pewarganegaraan, Kewarganegaraan, Apostille, dan Beneficial Ownership dengan membuka booth layanan AHU, membuat jingle layanan AHU, Membuat nomor layanan AHU, membuat video layanan AHU, melakukan pencetakan sertifikat Apostille. 5. Melakukan penguatan PPNS. 6. Melakukan Pelantikan Notaris, Notaris Pengganti, Anak Berkewarganegaraan Ganda dan PPNS dengan Jumlah 64 Notaris dan Notaris pengganti, 1 anak berkewarganegaraan ganda dan 22 PPNS. 7. Koordinasi dengan Ditjen AHU dan instansi lain terkait layanan AHU. 8. Melakukan Verifikasi data Anak Berkewarganegaraan Ganda. 9. Melakukan Verifikasi data Alamat dan kepengurusan Partai Politik di Wilayah.



<p>Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum merata pemahaman masyarakat tentang perlindungan kekayaan intelektual di wilayah. 2. Belum adanya mediator dalam penanganan pengaduan kasus pelanggaran kekayaan intelektual; 3. Belum memadainya jumlah SDM pada subbidang Pelayanan dikarenakan jumlah permohonan dan kegiatan implementasi kerjasama yang semakin meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal dengan tema “Mendorong Potensi Indikasi Geografis di DIY : Tantangan dan Rencana Aksi” berjumlah 60 orang 2. Koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman ini dilaksanakan sebagai langkah awal terkait penilaian potensi Jambu Dalhari untuk didaftarkan sebagai produk Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Rabu-Jumat, 2-4 Februari 2022 Pukul 08.00 WIB s/d selesai 3. Pelaksanaan sosialisasi dan audensi potensi Indikasi Geografis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Bappeda Kabupaten Sleman pada tanggal 7 April 2022. 4. Berdasarkan pengamatan dilapangan pada pusat perbelanjaan yang telah diberikan kuesioner dan penilaian hasil kuesioner yang masuk menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) Mall sebagai pusat perbelanjaan yang memenuhi persyaratan layak serta dan dapat dikategorikan mendapatkan sertifikasi pusat perbelanjaan, sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Jogja City Mall 2) Hartono Mall Yogyakarta 3) Malioboro Mall 4) Plaza Ambarrukmo 5) Sleman City Hall 5. Pelaksanaan koordinasi persiapan Mobile IP Clinic dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2022 dengan stakeholder Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual DIY 6. Pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Advokasi Hak Kekayaan Intelektual Tahun 2022 bertempat di Hotel Lynn Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2022. 7. Hasil analisa menunjukkan dan merekomendasikan 7 (tujuh) Mall tersebut patut dan layak mendapatkan sertifikat pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah Kemenkumham DIY telah berhasil menyelenggarakan pelayanan kekayaan intelektual dengan jumlah permohonan KI yang difasilitasi sejumlah : <p><i>Hak cipta : 7.771</i></p> <p><i>Merek : 2304</i></p> <p><i>Desain Industri : 147</i></p> <p><i>Paten: 381</i></p> <p><i>DTLST : 1</i></p> <p><i>Rahasia Dagang : 1</i></p> <p><i>Indikasi geografis : 1</i></p> <p><i>Total permohonan KI : 10606</i></p> 2. Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual dilaksanakan sebanyak 10 kali dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) One village one brand di kab. Kulon progo, pada tanggal 23 Februari 2023 di Hotel Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta. b) One village one brand di kab. Gunung kidul, pada tanggal 08 Februari 2023 di Hotel Santika Yogyakarta. c) Geographical Indication drafting camp DIY, pada tanggal 12 – 14 Maret 2023 di Hotel Griya Persada Yogyakarta. d) Layanan Kekayaan Intelektual di
--	--	---	--



		<p>perbelanjaan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jogja City Mall 2) Hartono Mall Yogyakarta 3) Malioboro Mall 4) Plaza Ambarrukmo 5) Sleman City Hall 6) Lippo Plaza Jogja 7) Galeria Mall <p>8. Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> (MIC) / Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 8-12 Agustus 2022 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Hotel Dafam Fortuna dan Hotel Mutiara Malioboro Yogyakarta</p> <p>9. Kegiatan Edukasi dan Advokasi Kekayaan Intelektual sebagai implementasi Perjanjian Kerjasama antara DJKI dengan Pemda DIY pada pasal 2 terkait Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi di bidang Kekayaan Intelektual bertempat di Hotel Satoria Yogyakarta pada tanggal 20 September 2022</p> <p>10. Koordinasi dengan stakeholder terkait diantaranya Bappeda Kabupaten Sleman dan MPIG Jambu Air Dalhari pada tanggal 22 September 2022</p> <p>11. Implementasi perjanjian Kerjasama di bidang pemanfaatan kekayaan intelektual tahun 2023 mengacu pada Sasaran Strategis Perencanaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggandeng 13 Perguruan Tinggi dan 1 Pemerintah Daerah yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2) Universitas Gajah Mada 3) Universitas Negeri Yogyakarta 4) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 5) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta 6) Universitas Alma Ata 7) UPN Veteran Yogyakarta 	<p>Pusat Perbelanjaan, pada tanggal 10 – 14 April 2023 di Plaza Ambarrukmo Yogyakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> e) Kegiatan Mobile IP Clinic, bagi UMKM di Kota Yogyakarta, pada tanggal 15 Mei 2023 di Gedung Pusat Desain Industri Nasional. f) Kegiatan Mobile IP Clinic, bagi UMKM di Kab. Sleman, pada tanggal 19 Mei 2023 di Bappeda Kabupaten Sleman. g) Kegiatan Mobile IP Clinic, bagi UMKM di Kab. Bantul, pada tanggal 08 Juni 2023 di Gedung Perpusda Kabupaten Bantul. h) Kegiatan Mobile IP Clinic, bagi UMKM di Kab. Gunungkidul, pada tanggal 13 Juni 2023 di Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul. i) Workshop KI tema identifikasi Kandidat Karya Cipta di DIY, pada tanggal 19 Juni 2023 di El Hotel Yogyakarta. j) Bimtek penelusuran dan pemanfaatan paten bagi perguruan tinggi, litbang di DIY, pada 23 Juni 2023 El Hotel Yogyakarta. <p>3. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pelanggaran hak cipta buku telegram b) Pelanggaran merek kedai grafis c) Pelanggaran hak cipta buku tumbuh kembang anak d) Pelanggaran merek komunitas motor AHPC PCX e) Pelanggaran merek sel sapi bon f) Pelanggaran merek Avoskin <p>4. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan</p>
--	--	--	---



		<p>8) Universitas Atma Jaya Yogyakarta 9) Institut Seni Indonesia Yogyakarta 10) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 11) Politeknik Kesehatan Yogyakarta 12) Universitas Amikom Yogyakarta 13) Universitas Janabadra Yogyakarta 14) Universitas Mercubuana Yogyakarta</p> <p>12. Penanganan aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dilaksanakan baik secara langsung oleh pemohon kepada PPNS bidang kekayaan intelektual dan permohonan saksi ahli oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada kasus pelanggaran hak cipta dan merek diantaranya permintaan mediasi kasus pelanggaran merek “Ndalem” pada tanggal 26 April 2022 dan permintaan mediasi kasus pelanggaran hak cipta buku “LovRinz” pada tanggal 8 Desember 2022.</p> <p>13. Kerjasama Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema “<i>Sertifikasi Pusat Perbelanjaan sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</i>” oleh Kantor Wilayah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 bertempat di Hotel Indoluxe Yogyakarta. Narasumber kegiatan ini berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari: 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; 2) Kepolisian Daerah DIY; 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY; 4) Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DIY.</p> <p>Sedangkan peserta berjumlah 100 orang yang terdiri dari :</p> <p>1) Kepolisian Daerah DIY 2) Kepolisian Resort se-DIY 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan se-DIY 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-DIY 5) Dinas Pariwisata se-DIY 6) Manajemen Pusat Perbelanjaan se-DIY</p>	<p>Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gunung kidul • Kulon progo <p>5. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Merek sebanyak 2 x b) IG drafting camp c) Membangun kesadaran 2 x d) Intelektual di pusat e) MIC kab. Bantul f) MIC kab. Gunung kidul g) Workshop KKC h) Workshop desain industry i) Kerjasama pengawasan KI j) Pemanfaatan informasi paten <p>6. Berdasarkan pengamatan dilapangan pada pusat perbelanjaan yang telah diberikan kuesioner dan penilaian hasil kuesioner yang masuk menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) Mall sebagai pusat perbelanjaan yang memenuhi persyaratan layak serta dan dapat dikategorikan mendapatkan sertifikasi pusat perbelanjaan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lotte Mart Jogja b. Indogrosir c. Transmart Maguwoharjo
--	--	---	---



		<p>7) PPNS Kanwil Kemenkumham DIY</p> <p>14. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan tema “<i>Urgensi Pelindungan Kekayaan Intelektual Pada Sektor Properti</i>” oleh Kantor Wilayah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 di Hotel Eastparc Yogyakarta. Narasumber kegiatan ini berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI 2) DPP APERSI DIY 3) Akademis dari Universitas Janabadra Yogyakarta <p>Peserta berjumlah 80 orang yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Real Estate Indonesia DIY 2) Apersi DIY 3) Appernas DIY 4) APSI DIY 5) Ikatan Arsitek DIY 6) Dinas Pemukiman dan Pekerjaan Umum DIY 7) Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 8) Dinas Koperasi dan UKM DIY 9) Kepolisian DIY 10) Korwas PPNS Polda DIY 11) Kejaksaan Tinggi DIY 12) PPNS Kanwil Kemenkumham DIY <p>15. Penyerahan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual.</p> <p>16. Penyerahan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 14 September 2022 bertempat di Hotel Eastparc Yogyakarta kepada 7 (tujuh) pusat perbelanjaan diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lippo Plaza Jogja 2) Malioboro Mall 3) Hartono Mall 4) Ambarrukmo Plaza 5) Sleman City Hall 	
--	--	--	--



		<p>6) Galeria Mall 7) Jogja City Mall</p> <p>17. Pemantauan produk kekayaan intelektual wilayah Pelaksanaan kegiatan diarahkan pada pengelola pusat perbelanjaan, pengelola tempat karaoke, pengelola tempat wisata/rekreasi, hotel, pengelola cafe dan restoran, manajemen TV/radio oleh PPNS Bidang Kekayaan Intelektual, dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya Hotel Dafam Signature, Hotel Santika Wonosari, Sleman City Hall, Jogja City Mall dan sebagainya.</p> <p>18. Koordinasi dengan Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai instansi pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan upaya kerja sama dalam rangka penanganan kasus pelanggaran kekayaan intelektual serta menghimpun data-data terkait kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang telah ditangani penyidik Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022.</p>	
<p>Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum</p>	<p>1. Belum terpenuhinya target evaluasi terhadap 150 Kalurahan dan kelurahan sadar hukum se DIY dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia di DIPA hanya untuk 3 Kalurahan / kelurahan sadar hukum per kabupaten per tahun, hal ini telah dicarikan solusi dengan efisiensi anggaran sehingga bisa digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap 6 sampai 7 Kal / Kel sadar hukum per kabupaten sehingga untuk DIY pada TA 2022 dapat melaksanakan evaluasi terhadap 39 Kalurahan/Kelurahan, mohon kiranya target kinerja BPHN disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan dapat dilakukan secara bertahap agar evaluasi yang dilakukan terhadap KSH berjalan maksimal dan akuntabel sesuai peraturan yang telah ditetapkan</p> <p>2. Kurangnya maksimalnya serapan anggaran bantuan hukum oleh salah satu OBH Pemberi Bantuan Hukum.</p>	<p>1. Kegiatan Penyusunan Hasil Evaluasi Desa Sadar Hukum Berdasarkan Syarat Administratif berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.04-04 Tanggal 18 Januari 2022 Perihal Pelaksanaan Monitoring/ Evaluasi serta Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilaksanakan pada Senin, 6 Juni 2022 Pukul 09.00 – 12.00 WIB Ruang Rapat Kantor Wilayah</p> <p>2. Telah dilakukan penyerasian database Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan database Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari sejumlah 168 (sembilan puluh sembilan) desa/kelurahan yang ada di database sebanyak 84 (delapan puluh empat) sudah diresmikan pada tanggal 23 Juni 2022. Adapun rincian dari sebanyak 84 (delapan puluh empat) Desa/Kelurahan yang sudah</p>	<p>1. Penandatanganan Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2023 oleh Direktur OBH Pemberi Bantuan Hukum dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY pada tanggal 19 Januari 2023 di Aula Kanwil kementerian Hukum dan HAM DIY</p> <p>2. Dilaksanakan analisis dan evaluasi atas produk hukum daerah terkait penyelenggaraan pariwisata di wilayah DIY</p> <p>3. Dilaksanakan evaluasi atas 39 kalurahan/kelurahan sadar hukum se-DIY</p> <p>4. Dilaksanakan penyuluhan hukum di JogjaTV dengan tema Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu pada tanggal 11 Mei 2023</p> <p>5. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dirangkaikan dengan Penyuluhan Hukum Sosialisasi Aplikasi</p>



		<p>diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 32 (tiga puluh dua) desa/kelurahan diresmikan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 03.KP.07.05 Tahun 2011 pada tanggal 12 Februari 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 182/KEP/2010 tanggal 31 Juli 2010; dan 2) 52 (lima puluh dua) desa/kelurahan diresmikan seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH- 13.KP.07.05 Tahun 2013 pada tanggal 22 Agustus 2013 dan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95/KEP/2013 tanggal 27 Maret 2013. 3. Adapun 69 (enam puluh Sembilan) desa/kelurahan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2022 tanggal 24 Januari 2022 dan Menteri Hukum dan HAM dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.KP.05.03 Tahun 2022. 4. Adapun 11 (sebelas) desa/kelurahan belum dilakukan pembinaan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum 5. Penandatanganan prasasti peresmian kalurahan/kelurahan sadar hukum secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta disaksikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Para Kepala Divisi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta serta mewakili Kepala BPHN Penyuluh Hukum Ahli Madya merangkap Koordinator Pembudayaan Hukum dan JFU Analisis Hukum. 6. Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana 	<p>Kalandra pada tanggal 14 Juli 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Dilaksanakan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dalam rangka peringatan HDKD pada tanggal 2 Agustus 2023 di 7 titik kalurahan/kelurahan se-DIY 7. Dilaksanakan Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon PBH Periode Tahun 2025-2027 dan Asistensi Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum pada tanggal 21 Maret 2023 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY 8. Dilaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIH di Wilayah pada tanggal 23 Februari 2023 di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY 9. Dilaksanakan pemantauan dan evaluasi atas kinerja Pemberi Bantuan Hukum dengan melakukan wawancara terhadap klien Penerima Bantuan Hukum dan pembinaan kepada Pemberi Bantuan Hukum selama TA 2023 10. Dilaksanakan koordinasi dan penjaringan terkait integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap Perguruan Tinggi di wilayah DIY pada bulan April tahun 2023 11. Dilaksanakan rapat pembentukan kalurahan/kelurahan sadar hukum se-DIY tahun 2023 pada tanggal 23 Agustus 2023 12. Dilaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi periode kontrak tanggal 19 Januari 2023 s.d. tanggal 8 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dilaksanakan 468 kegiatan bantuan hukum litigasi oleh 22 OBH Terakreditasi Periode 2022-2024 yang berupa kegiatan bantuan hukum litigasi perkara pidana dan perkara perdata pada
--	--	--	--



		<p>Kalurahan / Kelurahan berupa piagam kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diwakili Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) Bupati Bantul; 3) Bupati Sleman; 4) Bupati Gunungkidul; dan 5) Walikota Yogyakarta. <p>7. Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana Kalurahan / Kelurahan berupa medali kepada 13 (tiga belas) Mantri Pamong Praja beserta 21 (dua puluh satu) Panewu se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan;</p> <p>8. Penyerahan penghargaan Anubhawa Sasana Kalurahan / Kelurahan berupa medali kepada 69 (enam puluh sembilan) Lurah se-Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan</p> <p>9. Penyerahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.KP.05.03 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Panewu/Mantri, beserta Lurah yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan</p> <p>10. Pemberian hadiah kepada 69 (enam puluh sembilan) Lurah yang Kalurahan/Kelurahannya ditetapkan sebagai Kalurahan/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2022.</p>	<p>tahap penyidikan dan persidangan;</p> <p>2) Telah dilaksanakan 114 kegiatan bantuan hukum non litigasi oleh 22 OBH Terakreditasi Periode 2022-2024 yang berupa kegiatan penyuluhan hukum, penelitian hukum, pendampingan di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat, negosiasi, mediasi, konsultasi hukum, investigasi kasus, dan drafting dokumen.</p>
<p>Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana khususnya kendaraan dinas/operasional bagi Perancang yang melaksanakan rapat pra harmonisasi, harmonisasi dan fasilitasi di luar Kanwil (Pemda/DPRD) tidak mencukupi; 2. Anggaran dan jumlah ruang rapat di Kanwil tidak dapat mencukupi kebutuhan rapat harmonisasi JF Perancang, yang mana dalam sehari dapat melaksanakan 5 kali 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Harmonisasi Raperda / Raperkada 2022: <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda Kota Yogyakarta tentang Perlindungan Toko Rakyat, 11 Januari 2022 2. Raperda Kota Yogyakarta tentang Reklame, 14 Januari 2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Harmonisasi Raperda / Raperkada 2023: <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2023-2043, 2 Januari 2023



	<p>rapat;</p> <p>3. Keterbatasan SDM JFU sebagai pengadministrasi proses harmonisasi dari awal sampai akhir.</p>	<p>3. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pembangunan Kepemudaan, 14 Januari 2022</p> <p>4. Raperda Kota Yogyakarta tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kebencanaan Daerah, 14 Januari 2022</p> <p>5. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, 04 Februari 2022</p> <p>6. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 04 Februari 2022</p> <p>7. Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 15 Februari 2022</p> <p>8. Raperda Kab. Bantul tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, 01 Maret 2022</p> <p>9. Raperda Kab. Bantul tentang Perubahan Perda Kab. Bantul Nomor 5 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, 01 Maret 2022</p> <p>10. Raperda Kab. Bantul tentang Penyertaan Modal BUMD, 01 Maret 2022</p> <p>11. Raperda Kab. Bantul tentang Kabupaten Layak Anak, 01 Maret 2022</p> <p>12. Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 01 Maret 2022</p> <p>13. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pasar, 17 Maret 2022</p> <p>14. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, 16 Maret 2022</p> <p>15. Raperda Kota Yogyakarta tentang Kerja sama Daerah, 17 Maret 2022</p> <p>16. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Pembangunan Kepemudaan, 16 Maret 2022</p> <p>17. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah, 13 April 2022</p> <p>18. Rancangan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas</p>	<p>2. Raperda Kabupaten Sleman tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sembada, 3 Januari 2023</p> <p>3. Raperda Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, 5 Januari 2023</p> <p>4. Raperda Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 6 Januari 2023</p> <p>5. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, 9 Januari 2023</p> <p>6. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan Perda Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan, 10 Januari 2023</p> <p>7. Raperda Kabupaten Sleman tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, 10 Januari 2023</p> <p>8. Raperda Kabupaten Sleman tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika, 10 Januari 2023</p> <p>9. Raperda Kabupaten Sleman tentang Penguatan Pendidikan Karakter, 10 Januari 2023</p> <p>10. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan, 10 Januari 2023</p>
--	--	---	---



		<p>Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, 18 April 2022</p> <p>19. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, 18 April 2022</p> <p>20. Raperbup Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, 21 April 2022</p> <p>21. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan, 11 Mei 2022</p> <p>22. Raperda Kab. Bantul tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 20 Mei 2022</p> <p>23. Raperbup Bantul tentang Pengelolaan keuangan Kalurahan, 27 Mei 2022</p> <p>24. Raperda Kab. Bantul tentang Perubahan atas Perda Kab. Bantul Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 13 Juni 2022</p> <p>25. Raperda Kab. Bantul tentang Kabupaten Layak Anak, 13 Juni 2022</p> <p>26. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, 13 Juni 2022</p> <p>27. Raperda Kab. Gunungkidul tentang Pengelolaan Kebudayaan, 13 Juni 2022</p> <p>28. Raperda Kota Yogyakarta tentang Rencana Pembangunan Industri, 13 Juni 2022</p> <p>29. Raperda Kab. Bantul tentang Penyelenggaraan Perumahan, 13 Juni 2022</p> <p>30. Raperda Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, 27 Juni 2022</p> <p>31. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, 28 Juni 2022</p> <p>32. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Perubahan atas Perda Kab. Kulon Progo Nomor 18 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter, 20 Juli 2022</p>	<p>11. Rapergub tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, 11 Januari 2023</p> <p>12. Raperwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 11 Januari 2023</p> <p>13. Raperwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemitraan dan Kelurahan, 11 Januari 2023</p> <p>14. Raperwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah, 11 Januari 2023</p> <p>15. Raperwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Inspektorat dan Tata Kerja Badan Daerah, 11 Januari 2023</p> <p>16. Raperwal tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, 11 Januari 2023</p> <p>17. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, 12 Januari 2023</p> <p>18. Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026, 13 Januari 2023</p> <p>19. Raperda DIY tentang Perubahan atas Perda DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, 16 Januari 2023</p>
--	--	--	--



		<p>33. Raperda Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, 22 Juli 2022</p> <p>34. Raperda Kota Yogyakarta tentang Kerja Sama Daerah, 22 Juli 2022</p> <p>35. Raperda Kab. Kulonprogo tentang Rencana Pembangunan Industri Kulonprogo tahun 2022-2042, 19 Juli 2022</p> <p>36. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 19 Juli 2022</p> <p>37. Raperda Kota Yogyakarta tentang Reklame, 19 Agustus 2022</p> <p>38. Raperda Kab. Bantul tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, 05 September 2022</p> <p>39. Raperwal Yogyakarta tentang Pengelolaan Barang Hasil Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 05 September 2022</p> <p>40. Raperda Kab. Bantul tentang Kawasan Tanpa Rokok, 05 September 2022</p> <p>41. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Pesantren, 27 Oktober 2022</p> <p>42. Raperwal Yogyakarta tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif, 17 November 2022</p> <p>43. Raperwal Yogyakarta tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif, 17 November 2022</p> <p>44. Raperwal Yogyakarta tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 17 November 2022</p> <p>45. Raperwal Yogyakarta tentang Persetujuan Lingkungan, 18 November 2022</p> <p>46. Raperwal Yogyakarta tentang SOTK Setda dan Setwan, 21 November 2022</p> <p>47. Raperwal Yogyakarta tentang SOTK Inspektorat dan Badan Daerah, 21 November 2022</p> <p>48. Raperwal Yogyakarta tentang SOTK Kemantren dan Kalurahan, 21 November 2022</p>	<p>20. Raperwal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil, 17 Januari 2023</p> <p>21. Raperwal tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, 17 Januari 2023</p> <p>22. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta dan PT Jogjatama Vishesa (Perseroda), 17 Januari 2023</p> <p>23. Raperwal tentang Tata Cara Penegakan Hukuman Disiplin Pegawai, 18 Januari 2023</p> <p>24. Raperbup Sleman tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan, Rumah Makan, Restoran, dan Hotel pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, 18 Januari 2023</p> <p>25. Raperwal tentang Batas Wilayah Kemantren dan Kelurahan di Kemantren Umbulharjo, Kotagede, dan Mergangsan Kota Yogyakarta, 19 Januari 2023</p> <p>26. Raperwal tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik, 20 Januari 2023</p> <p>27. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043, 202 Januari 2023</p> <p>28. Raperwal tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah, 24 Januari 2023</p> <p>29. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2022-2026, 24 Januari 2023</p>
--	--	--	---



		<p>49. Raperwal Yogyakarta tentang SOTK Dinas Daerah, 21 November 2022</p> <p>50. Raperwal Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif telekomunikasi, 22 November 2022</p> <p>51. Raperwal Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, 23 November 2022</p> <p>52. Raperwal Yogyakarta tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 24 November 2022</p> <p>53. Raperwal Yogyakarta tentang Perubahan atas Perwal Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, 24 November 2022</p> <p>54. Raperwal Yogyakarta Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, 25 November 2022</p> <p>55. Raperwal Yogyakarta tentang Tatacara Pembatalan Ketetapan Pajak, 30 November 2022</p> <p>56. Raperwal Yogyakarta tentang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan, 01 Desember 2022</p> <p>57. Raperwal Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, 01 Desember 2022</p> <p>58. Raperwal Yogyakarta tentang Perubahan Kedua Atas Perwal Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian</p>	<p>30. Raperwal tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, 25 Januari 2023</p> <p>31. Raperwal tentang Tata Cara Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 25 Januari 2023</p> <p>32. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, 25 Januari</p> <p>33. Rapergub tentang Jaminan Kesehatan Semesta, 26 Januari 2023</p> <p>34. Raperda Kota Yogyakarta tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, 27 Januari 2023</p> <p>35. Raperwal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja RSUD pada Dinas Kesehatan, 27 Januari 2023</p> <p>36. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, 27 Januari 2023</p> <p>37. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender, 30 Januari 2023</p> <p>38. Raperwal tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian, 30 Januari 2023</p> <p>39. Raperwal tentang Sistem Kerja pada Pemkot Yogyakarta, 30 Januari 2023</p> <p>40. Raperwal tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas, 31 Januari 2023</p> <p>41. Raperbup Gunungkidul tentang Pengendalian dan Evaluasi</p>
--	--	---	--



		<p>Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Swasta, 02 Desember 2022</p> <p>59. Raperwal Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2022-2026, 02 Desember 2022</p> <p>60. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat (berkas dikembalikan), 06 Desember 2022</p> <p>61. Raperwal Yogyakarta tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, 19 Desember 2022</p> <p>62. Raperwal Yogyakarta tentang Perubahan Atas Perwal Yogyakarta Nomor.122 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, 20 Desember 2022</p> <p>63. Raperwal Yogyakarta tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, 21 Desember 2022</p> <p>64. Raperwal Yogyakarta tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, 21 dan 29 Desember 2022</p> <p>65. Raperwal Yogyakarta tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, 26 Desember 2022</p> <p>66. Raperwal Yogyakarta tentang Pengaduan Masyarakat, 27 Desember 2022</p> <p>67. Raperwal Yogyakarta Penggunaan BMD, 28 Desember 2022</p> <p>68. Rapergub DIY tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pendidikan Menengah dan Khusus, 28 Desember 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri rapat koordinasi, fasilitasi penyusunan Raperda/Raperkada, FGD yang diadakan oleh Pemda/DPRD 	<p>Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, 31 Januari 2023</p> <p>42. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penanaman Modal, 31 Januari 2023</p> <p>43. Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan, 31 Januari 2023</p> <p>44. Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa, Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa, Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa, 1 Februari 2023</p> <p>45. Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 2 Februari 2023</p> <p>46. Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, 2 Februari 2023</p> <p>47. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, 7 Februari 2023</p> <p>48. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Kabupaten</p>
--	--	--	---



			<p>Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, 7 Februari 2023</p> <p>49. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, 7 Februari 2023</p> <p>50. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, 8 Februari 2023</p> <p>51. Raperda Kota Yogyakarta tentang Perubahan atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, 9 Februari 2023</p> <p>52. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat, 10 Februari 2023</p> <p>53. Raperbup Kulon Progo tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 17 Februari 2023</p> <p>54. Raperwal tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemkot Yogyakarta, 20 Februari 2023</p> <p>55. Raperbup Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, 20 Februari 2023</p>
--	--	--	--



			<p>56. Rapergub tentang Strategi Pengembangan Wilayah Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten Tahun 2023-2043, 21 Februari 2023</p> <p>57. Raperwal tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren, 21 Februari 2023</p> <p>58. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame, 22 Februari 2023</p> <p>59. Raperda Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 23 Februari 2023</p> <p>60. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamata Kota Yogyakarta, 28 Februari 2023</p> <p>61. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, 1 Maret 2023</p> <p>62. Raperwal tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas, 1 Maret 2023</p> <p>63. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 1 Maret 2023</p> <p>64. Raperbup Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penugasan sebagian Urusan Keistimewaan, 1 Maret 2023</p> <p>65. Raperwal tentang Whistleblowing System pada Pemkot Yogyakarta, 2 Maret 2023</p>
--	--	--	---



			<p>66. Raperda Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 3 Maret 2023</p> <p>67. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Lurah, 8 Maret 2023</p> <p>68. Raperbup Gunungkidul tentang Administrasi Pemerintahan Kalurahan, 8 Maret 2023</p> <p>69. Raperda DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027, 10 Maret 2023</p> <p>70. Raperda DIY tentang Pengelolaan Sampah Regional, 13 Maret 2023</p> <p>71. Raperbup Kulon Progo tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 14 Maret 2023</p> <p>72. Raperbup Kulon Progo tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Kapanewon, 14 Maret 2023</p> <p>73. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 16 Maret 2023</p> <p>74. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023, 17 Maret 2023</p> <p>75. Raperwal tentang Perizinan dan Nonperizinan, 21 Maret 2023</p> <p>76. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Daerah, 24 Maret 2023</p> <p>77. Rapergub tentang Rencana Aksi Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik</p>
--	--	--	--



			<p>Sosial di DIY Tahun 2023-2025, 27 Maret 2023</p> <p>78. Rapergub tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, 27 Maret 2023</p> <p>79. Rapergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, 28 Maret 2023</p> <p>80. Rapergub tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 28 Maret 2023</p> <p>81. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran serta Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Kota Yogyakarta, 28 Maret 2023</p> <p>82. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Pendidikan, 30 Maret 2023</p> <p>83. Raperda Kabupaten Sleman tentang Kawasan Tanpa Rokok, 3 April 2023</p> <p>84. Rapergub tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas, 4 April 2023</p> <p>85. Rapergub DIY tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 107 Tahun 2018 tentang Penulisan Nama Perangkat Daerah, 4 April 2023</p> <p>86. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, 4 April 2023</p> <p>87. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2042, 5 April 2023</p>
--	--	--	---



			<p>88. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 5 April 2023</p> <p>89. Raperbup Bantul tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, 10 April 2023</p> <p>90. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 11 April 2023</p> <p>91. Raperwal tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah Kota Yogyakarta, 12 April 2023</p> <p>92. Raperwal tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi, 13 April 2023</p> <p>93. Raperbup Gunungkidul tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, 17 April 2023</p> <p>94. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 3 Mei 2023</p> <p>95. Rapergub tentang Standar Harga Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Semesta Pada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan DIY, 4 Mei 2023</p> <p>96. Raperda Kabupaten Bantul tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 5 Mei 2023</p> <p>97. Rapergub tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2023, 9 Mei 2023</p> <p>98. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan</p>
--	--	--	---



			<p>Tarif Retribusi Jasa Umum, 11 Mei 2023</p> <p>99. Rapergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 122Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha, 11 Mei 2023</p> <p>100. Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari, 12 Mei 2023</p> <p>101. Repergub DIY tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 15 Mei 2023</p> <p>102. Raperbup Kabupaten Bantul tentang SOTK, 15 Mei 2023</p> <p>103. Raperbup Kabupaten Bantul tentang SOTK, 15 Mei 2023</p> <p>140. Raperbup Gunungkidul tentang Masterplan Smart City Kabupaten Gunungkidul, 17 Mei 2023</p> <p>141. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, 17 Mei 2023</p> <p>142. Rapergub DIY tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan, 22 Mei 2023</p> <p>143. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 22 Mei 2023</p> <p>144. Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, 23 Mei 2023</p>
--	--	--	---



			<p>145. Rapergub tentang Formasi Jabatan Fungsional dan Peta Jabatan, 24 Mei 2023</p> <p>146. Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, 24 Mei 2023</p> <p>147. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemkot Yogyakarta, 25 Mei 2023</p> <p>148. Rapeda Kab. Sleman tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan, 25 Mei 2023</p> <p>149. Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, 26 Mei 2023</p> <p>150. Raperda Kab. Sleman tentang PDRD, 26 Mei 2023</p> <p>151. Raperwal tentang Pemberian Keringanan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, 29 Mei 2023</p> <p>152. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, 29 Mei 2023</p> <p>153. Raperbup Sleman tentang Inventarisasi Barang Milik Daerah, 29 Mei 2023</p> <p>154. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 30 Mei 2023</p>
--	--	--	--



			<p>155. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, 30 Mei 2023</p> <p>156. Raperbup Sleman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 31 Mei 2023</p> <p>157. Raperwal tentang Penilaian Kinerja Pegawai, 5 Juni 2023</p> <p>158. Rancangan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas, 5 Juni 2023</p> <p>159. Rapergub tentang Pedoman Plaksanaan Musyawarah Kelurahan/Kalurahan dalam Rangka Proses Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, 6 Juni 2023</p> <p>160. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 6 Juni 2023</p> <p>161. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta, 7 Juni 2023</p> <p>162. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta, 7 Juni 2023</p> <p>163. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari, 7 Juni 2023</p>
--	--	--	--



			<p>164. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon, 7 Juni 2023</p> <p>165. Raperbup Kulonprogo tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek di Kabupaten Kulonprogo, 7 Juni 2023</p> <p>166. Raperbup tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, 7 Juni 2023</p> <p>167. Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 – 2027, 8 Juni 2023</p> <p>168. Rancangan Peraturan Walikota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan, 8 Juni 2023</p> <p>169. Rancangan Peraturan Walikota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Ketua Pengurus Kampung, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, 9 Juni 2023</p> <p>170. Raperbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 26/2021 tentang Pedoman Penyerahan PSU, 9 Juni 2023</p> <p>171. Raperbup tentang Batas Desa Kalurahan Kalidengen, Demen, dan Plumbon Kapanewon Temon serta Kalurahan Sogan dan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo, 12 Juni 2023</p>
--	--	--	---



			<p>172. Rancangan Peraturan Bupati tentang Operasionalisasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, 12 Juni 2023</p> <p>173. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda tentang Kerjasama Daerah, 13 Juni 2023</p> <p>174. Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pemberian Insentif Dan Pengenaan Disinsentif Penataan Ruang, 13 Juni 2023</p> <p>175. Raperbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 13 Juni 2023</p> <p>176. Raperda tentang Perubahan atas Perda Kab Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, 14 Juni 2023</p> <p>177. Raperbup tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah, 15 Juni 2023</p> <p>178. Raperbup tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Anggota KORPRI, 16 Juni 2023</p> <p>179. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 19 Juni 2023</p> <p>180. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pencabutan Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa dan Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perda Kab Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa, 19 Juni 2023</p> <p>181. Raperbup tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 19 Juni 2023</p> <p>182. Raperbup tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan</p>
--	--	--	---



			<p>Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul, 19 Juni 2023</p> <p>183. Raperwal tentang Standar Harga Satuan Jasa TA 2024, 20 Juni 2023</p> <p>184. Raperwal tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 21 Juni 2023</p> <p>185. Raperbup tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, 21 Juni 2023</p> <p>186. Rapergub DIY tentang Standar Harga Satuan, 22 Juni 2023</p> <p>187. Rapergub DIY tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Kalurahan, 22 Juni 2023</p> <p>188. Rapergub tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, 23 Juni 2023</p> <p>189. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penanggulangan Malaria, 26 Juni 2023</p> <p>190. Raperwal tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 26 Juni 2023</p> <p>191. Raperda DIY tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 27 Juni 2023</p> <p>192. Rapergub tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY, 27 Juni 2023</p> <p>193. Raperda DIY tentang Ekonomi Hijau, 27 Juni 2023</p> <p>194. Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran</p>
--	--	--	---



			<p>Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, 29 Juni 2023</p> <p>195. Raperbup Sleman tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bidang Transportasi Darat Kemenhub untuk Taruna Pola Pembibitan Kab Sleman, 7 Juli 2023</p> <p>196. Raperbup Sleman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 10 Juli 2023</p> <p>197. Raperbup Gunungkidul tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab Gunungkidul, 11 Juli 2023</p> <p>198. Raperwal tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, 12 Juli 2023</p> <p>199. Rapergub tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2027, 13 Juli 2023</p> <p>200. Rapergub tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah DIY, 13 Juli 2023</p> <p>201. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, 13 Juli 2023</p> <p>202. Raperwal tentang Standar Harga Satuan Barang dan Konstruksi Tahun Anggaran 2024, 14 Juli 2023</p> <p>203. Raperbup Gunungkidul tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan TA 2024, 14 Juli 2023</p> <p>204. Raperbup Gunungkidul tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum TA 2024, 14 Juli 2023</p>
--	--	--	---



			<p>205. Raperbup Bantul tentang Pemanfaatan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional Piyungan, 14 Juli 2023</p> <p>206. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, 17 Juli 2023</p> <p>207. Raperbup Bantul tentang Pengendalian Gratifikasi, 17 Juli 2023</p> <p>208. Raperbup Gunungkidul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, 20 Juli 2023</p> <p>209. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 20 Juli 2023</p> <p>210. Raperbup Bantul tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024, 20 Juli 2023</p> <p>211. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 24 Juli 2023</p> <p>212. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon, 24 Juli 2023</p> <p>213. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, 25 Juli 2023</p> <p>214. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,</p>
--	--	--	--



			<p>Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul, 26 Juli 2023</p> <p>215. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul, 26 Juli 2023</p> <p>216. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, 26 Juli 2023</p> <p>217. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 26 Juli 2023,</p> <p>218. Raperbup Bantul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, 26 Juli 2023</p> <p>219. Raperbup Gunungkidul tentang Pedoman Belanja Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul, 27 Juli 2023</p> <p>220. Raperbup Gunungkidul tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 27 Juli 2023</p> <p>221. Rapergub tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa, 31 Juli 2023</p>
--	--	--	---



			<p>222. Rapergub tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah, 31 Juli 2023</p> <p>223. Rapergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas, 31 Juli 2023</p> <p>224. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 15 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, 31 Juli 2023</p> <p>225. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah Tahun 2023 – 2027, 1 Agustus 2023</p> <p>226. Raperwal tentang Penyelenggaraan Satu Data, 1 Agustus 2023</p> <p>227. Rapergub tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, 2 Agustus 2023</p> <p>228. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, 2 Agustus 2023</p> <p>229. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2 Agustus 2023,</p> <p>230. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengoordinasian dan</p>
--	--	--	---



			<p>231. Penyelarasan Wilayah Perbatasan, 2 Agustus 2023 Pembangunan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Pemberdayaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, dan Pelestarian serta Pendaftaran Naskah Kuno, 3 Agustus 2023</p> <p>232. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, 3 Agustus 2023</p> <p>233. Raperwal tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 3 Agustus 2023</p> <p>234. Raperbup Kulon Progo tentang Sistem Klasifikasi Kemanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemkab Kulon Progo, 3 Agustus 2023</p> <p>235. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Alih Media Arsip, 3 Agustus 2023</p> <p>236. Raperbup tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 4 Agustus 2023</p> <p>237. Raperbup tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 4 Agustus 2023</p> <p>238. Rapergub tentang Pelindungan Anak Dalam Kondisi Khusus, 7 Agustus 2023</p> <p>239. Rapergub tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, 7 Agustus 2023</p> <p>240. Raperbup Kulon Progo tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, 8 Agustus 2023</p>
--	--	--	--



			<p>241. Peraturan Gubernur tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, 10 Agustus 2023</p> <p>242. Rapergub tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Arsitektur Bangunan Berciri Khas Daerah Istimewa Yogyakarta, 10 Agustus 2023</p> <p>243. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, 10 Agustus 2023</p> <p>244. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, 11 Agustus 2023</p> <p>245. Raperbup Bantul tentang Perizinan Nonberusaha, 14 Agustus 2023</p> <p>246. Raperwal tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 15 Agustus 2023</p> <p>247. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, 16 Agustus 2023</p> <p>248. Raperbup tentang Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, 16 Agustus 2023</p> <p>249. Raperwal tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, 22 Agustus 2023</p>
--	--	--	---



			<p>250. Raperbup Kulon Progo tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, 22 Agustus 2023</p> <p>251. Raperbup Kulon Progo tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, 22 Agustus 2023</p> <p>252. Raperbup Sleman tentang Piutang Daerah, 22 Agustus 2023</p> <p>253. Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual Tahun 2023-2027, 23 Agustus 2023</p> <p>254. Raperbup Kulon Progo tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemkab Kulon Progo, 23 Agustus 2023</p> <p>255. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, 23 Agustus 2023,</p> <p>256. Rapergub tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 116 Tahun 2021 tentang Perizinan dan Nonperizinan, 24 Agustus 2023</p> <p>257. Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2023</p> <p>258. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, 25 Agustus 2023</p> <p>259. Rancangan Perda Kota Yogyakarta tentang Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan, 25 Agustus 2023</p>
--	--	--	--



			<p>260. Raperwal tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, 28 Agustus 2023</p> <p>261. Raperbup Bantul tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, 28 Agustus 2023</p> <p>262. Raperbup Gunungkidul tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis, 29 Agustus 2023</p> <p>263. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, 29 Agustus 2023</p> <p>264. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, 29 Agustus 2023</p> <p>265. Raperda Kota Yogyakarta tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, 30 Agustus 2023</p> <p>266. Rapergub tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 – 2027, 31 Agustus 2023</p> <p>267. Rapergub tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, 31 Agustus 2023</p> <p>268. Rapergub tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, 31 Agustus 2023</p> <p>269. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, 1 September 2023</p> <p>270. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 127 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, 5 September 2023</p>
--	--	--	--



			<p>271. Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, 5 September 2023</p> <p>272. Rapergub tentang Peta Jalan Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan Tahun 2023-2025, 7 September 2023</p> <p>273. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, 7 September 2023</p> <p>274. Rapergub tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, 11 September 2023</p> <p>275. Raperbup Bantul tentang Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Program Merdeka Belajar, Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data, 11 September 2023</p> <p>276. Raperbup Bantul tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2024, 11 September 2023</p> <p>277. Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 12 September 2023</p> <p>278. Raperbup Kulon Progo tentang Tata Cara Pengumpulan Uang atau Barang, 12 September 2023</p> <p>279. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 12 September 2023</p> <p>280. Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, 14 September 2023</p>
--	--	--	---



			<p>281. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah, 14 September 2023</p> <p>282. Raperwal tentang Perubahan Keduatan atas Perwal Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemkot Yogyakarta, 15 September 2023</p> <p>283. Raperbup Kulon Progo tentang Penghasilan dan Tunjangan bagi Penyelenggara Pemerintah Kalurahan, 18 September 2023</p> <p>284. Raperbup Kulon Progo tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 18 September 2023</p> <p>285. Rapergub Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Lintas Kabupaten/Kota, 27 September 2023</p> <p>286. Rapergub tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota, 27 September 2023</p> <p>287. Rapergub tentang Perubahan atas Pergub Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2023, 27 September 2023</p> <p>288. Rapergub tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,</p>
--	--	--	---



			<p>dan Pajak Alat Berat, 27 September 2023</p> <p>289. Raperbup Kulon Progo tentang Tata Cara Pengumpulan Uang atau Barang, 2 Oktober 2023</p> <p>290. Raperda Kota Yogyakarta tentang Percabutan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), 3 Oktober 2023</p> <p>291. Raperwal tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain, 4 Oktober 2023</p> <p>292. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, 5 Oktober 2023</p> <p>293. Raperbup Bantul tentang Dukungan Program Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 6 Oktober 2023</p> <p>294. Raperda Kab. Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 9 Oktober 2023</p> <p>295. Rapergub tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, 10 Oktober 2023</p> <p>296. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 194 Tahun 2020 tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul, 10 Oktober 2023</p> <p>297. Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026, 11 Oktober 2023</p>
--	--	--	--



			<p>298. Raperwal tentang Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel Kerja, 12 Oktober 2023</p> <p>299. Raperwal tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta, 12 Oktober 2023</p> <p>300. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, 12 Oktober 2023</p> <p>301. Raperwal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil, 13 Oktober 2023</p> <p>302. Raperwal tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 13 Oktober 2023</p> <p>303. Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Kab. Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025, 16 Oktober 2023</p> <p>304. Raperda Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal, 16 Oktober 2023</p> <p>305. Raperbup Gunungkidul tentang Program Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 17 Oktober 2023</p> <p>306. Raperbup Gunungkidul tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, 17 Oktober 2023</p> <p>307. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2022 tentang</p>
--	--	--	---



			<p>Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, 19 Oktober 2023</p> <p>308. Raperbup Kulon Progo tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 19 Oktober 2023</p> <p>309. Raperwal tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, 16 Oktober 2023</p> <p>310. Rapergub DIY tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Khusus Rumah Sakit Jiwa Grhasia, 20 Oktober 2023</p> <p>311. Rapergub DIY tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Khusus Rumah Sakit Paru Respira 20 Oktober 2023</p> <p>312. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, 20 Oktober 2023</p> <p>313. Rapergub tentang Pengembangan Jogja Hijau, 23 Oktober 2023</p> <p>314. Rapergub tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 23 Oktober 2023</p> <p>315. Raperda Kulon Progo tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, 23 Oktober 2023</p> <p>316. Raperbup Kulon Progo tentang Pembentukan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung</p>
--	--	--	--



			<p>Keluarga Berkualitas, 23 Oktober 2023</p> <p>317. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial, 24 Oktober 2023</p> <p>318. Raperwal tentang Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara, 25 Oktober 2023</p> <p>319. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 37 Tahun 2023 tentang SOTK Dinas Daerah, 25 Oktober 2023</p> <p>320. Raperbup Kulon Progo tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye serta Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, 25 Oktober 2023</p> <p>321. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Umum Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo, 25 Oktober 2023</p> <p>322. Raperwal tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, 26 Oktober 2023</p> <p>323. Rapergub tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2027, 27 Oktober 2023</p> <p>324. Raperwal tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026, 27 Oktober 2023</p> <p>325. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Aktif di Pemkot Yogyakarta, 30 Oktober 2023</p>
--	--	--	--



			<p>326. Raperwal tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah, 30 Oktober 2023</p> <p>327. Raperwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, 30 Oktober 2023</p> <p>328. Raperbup Bantul tentang Alat Peraga Kampanye, 30 Oktober 2023</p> <p>329. Raperbup Gunungkidul tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemkab Gunungkidul, 30 Oktober 2023</p> <p>330. Raperbup Gunungkidul tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 30 Oktober 2023</p> <p>331. Raperwal tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perpustakaan, 31 Oktober 2023</p> <p>332. Raperwal tentang Analisis Standar Belanja, 31 Oktober 2023</p> <p>333. Raperda DIY tentang Perubahan Kedua atas Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 1 November 2023</p> <p>334. Raperda DIY tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan, 1 November 2023</p> <p>335. Raperbup Kulon Progo tentang Pemeliharaan Status Bebas Malaria di Daerah1 November 2023,</p> <p>336. Raperbup Kulon Progo tentang Perubahan atas Perbup Kulon Progo</p>
--	--	--	--



			<p>Nomor 74 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah, 1 November 2023</p> <p>337. Perubahan Ketiga atas Perbup Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum, 1 November 2023</p> <p>338. Rapergub tentang Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Daerah DIY, 2 November 2023</p> <p>339. Rapergub tentang Administrasi Perjalanan Dinas, 2 November 2023</p> <p>340. Rapergub tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 2 November 2023</p> <p>341. Rapergub Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca, 2 November 2023</p> <p>342. Undangan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperbup Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, 3 November 2023</p> <p>343. Raperbup Sleman tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Tengah Tahun 2023-2043, 3 November 2023</p> <p>344. Raperwal tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 6 November 2023</p> <p>345. Raperwal tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan pada Pemkot Yogyakarta, 6 November 2023</p> <p>346. Raperbup Gunungkidul tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada</p>
--	--	--	--



			<p>Pemkab Gunungkidul, 6 November 2023</p> <p>347. Raperbup Gunungkidul tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, 6 November 2023</p> <p>348. Raperwal tentang Peraturan Pelaksa Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 7 November 2023</p> <p>349. Raperwal Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), 7 November 2023</p> <p>350. Raperwal tentang Penyelenggaraan Magang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, 8 November 2023</p> <p>351. Raperwal tentang Penghargaan Aparatur Sipil Negara Berprestasi, 8 November 2023</p> <p>352. Raperwal tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, 9 November 2023</p> <p>353. Raperbup tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja , 9 November 2023</p> <p>354. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>355. Raperbup Sleman tentang Standar Harga Satuan, 9 November 2023</p> <p>356. Raperwal tentang RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia, 10 November 2023, 9 November 2023</p>
--	--	--	---



			<p>357. Raperbup Bantul tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan, 10 November 2023</p> <p>358. Raperbup Sleman tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas, 10 November 2023</p> <p>359. Raperwal tentang Batas Wilayah Kemantren dan Kelurahan pada Kemantren Mantrijeron, Wirobrajan, Jetis, dan Gondokusuman Kota Yogyakarta, 13 November 2023</p> <p>360. Raperwal tentang Pengelolaan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah, 14 November 2023</p> <p>361. Rapergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 15 November 2023</p> <p>362. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 15 November 2023</p> <p>363. Rapergub tentang Analisis Standar Belanja, 15 November 2023</p> <p>364. Raperbup Bantul tentang Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul, 15 November 2023</p> <p>365. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan, 15 November 2023</p> <p>366. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta</p>
--	--	--	--



			<p>Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, 15 November 2023</p> <p>367. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pariwisata, 16 November 2023</p> <p>368. Rapergub tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 16 November 2023,</p> <p>369. Rapergub tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 16 November 2023</p> <p>370. Raperbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023, 16 November 2023</p> <p>371. Raperda DIY tentang Hari Jadi DIY, 17 November 2023</p> <p>372. Raperbup Bantul tentang Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024, 17 November 2023</p> <p>373. Raperbup Bantul tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024, 17 November 2023</p> <p>374. Raperwal tentang Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Jasa Tahun Anggaran 2023, 20 November 2023</p> <p>375. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta</p>
--	--	--	---



			<p>Tata Kerja Sekretariat Daerah, 20 November 2023,</p> <p>376. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 20 November 2023</p> <p>377. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, 20 November 2023</p> <p>378. Raperbup Kulon Progo tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah, 22 November 2023</p> <p>379. Raperbup Kulon Progo tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Binangun Tahun 2024, 22 November 2023</p> <p>380. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 22 November 2023</p> <p>381. Raperbup Gunungkidul tentang Perubahan atas Perbup Gunungkidul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting, 22 November 2023</p> <p>382. Rapergub tentang Tarif Layanan BLUD pada Balai Pelatihan Kesehatan Dinkes, 23 November 2023</p> <p>383. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, 23 November 2023</p> <p>384. Raperbup Sleman tentang Perubahan atas Peraturan Bupati</p>
--	--	--	---



			<p>Nomor 38.14 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Persampahan, 23 November 2023</p> <p>385. Rapergub Tentang Pemberdayaan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, 24 November 2023</p> <p>386. Raperda Kab Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Perumahan, 24 November 2023</p> <p>387. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan, 24 November 2023</p> <p>388. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Puskesmas, 24 November 2023</p> <p>389. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja RSUD Sleman, 24 November 2023</p> <p>390. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja RSUD Prambanan, 24 November 2023</p> <p>391. Rapergub tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, 28 November 2023</p> <p>392. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, 28 November 2023</p> <p>393. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Pendidikan, 28 November 2023</p> <p>394. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta</p>
--	--	--	---



			<p>Tata Kerja UPTD pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, 28 November 2023</p> <p>395. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, 28 November 2023</p> <p>396. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 28 November 2023</p> <p>397. Raperbup Sleman tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 28 November 2023</p> <p>398. Raperbup tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Minera, 29 November 2023</p> <p>399. Raperbup tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, 29 November 2023</p> <p>400. Raperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 29 November 2023</p> <p>401. Raperbup Bantul tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD</p>
--	--	--	--



			<p>RSUD Saras Adyatma, 29 November 2023</p> <p>402. Raperbup Kulon Progo tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Di Kabupaten Kulon Progo, 30 November 2023</p> <p>403. Raperbup Kulon Progo tentang Jadwal Retensi Arsip, 30 November 2023</p> <p>404. Raperbup Sleman tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan, 1 Desember 2023</p> <p>405. Raperbup Sleman tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 1 Desember 2023</p> <p>406. Raperbup Sleman tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, 1 Desember 2023</p> <p>407. Raperbup Sleman tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup, 1 Desember 2023</p> <p>408. Raperbup Sleman tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 1 Desember 2023</p> <p>409. Sistem Kerja Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, 4 Desember 2023</p> <p>410. Rapergub tentang Desain Olahraga Daerah, 7 Desember 2023</p> <p>411. Rapergub tentang Perubahan atas Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum, 7 Desember 2023</p>
--	--	--	---



			<p>412. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Tugas Belajar bagi PNS, 7 Desember 2023</p> <p>413. Raperbup Kulon Progo tentang Pengembangan Koleksi Perpustakaan, 7 Desember 2023</p> <p>414. Raperbup Bantul tentang Mekanisme Penyampaian Usulan Kalurahan dan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, 7 Desember 2023</p> <p>415. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, 7 Desember 2023</p> <p>416. Raperbup Gunungkidul tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, 7 Desember 2023</p> <p>417. Raperwal tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, 8 Desember 2023</p> <p>418. Raperbup Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024, 8 Desember 2023</p> <p>419. Raperbup Gunungkidul tentang Kelompok Informasi Masyarakat, 8 Desember 2023</p> <p>420. Raperbup Gunungkidul tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, 8 Desember 2023</p> <p>421. Raperbup Gunungkidul tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024, 8 Desember 2023</p>
--	--	--	--



			<p>422. Raperbup Bantul tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, 11 Desember 2023</p> <p>423. Raperbup Bantul tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan dalam Pemanfaatan Ruang, 11 Desember 2023</p> <p>424. Rapergub tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung serta Kerjasama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya, 13 Desember 2023</p> <p>425. Raperbup Bantul tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2024-2028, 13 Desember 2023</p> <p>426. Raperbup Bantul tentang Perubahan atas Perbup Bantul Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2021-2030, 13 Desember 2023</p> <p>427. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, 14 Desember 2023</p> <p>428. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup, 14 Desember 2023</p> <p>429. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas</p>
--	--	--	---



			<p>Pertanian dan Pangan, 14 Desember 2023</p> <p>430. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 14 Desember 2023</p> <p>431. Raperbup Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026, 15 Desember 2023</p> <p>432. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari pada Dinas Kesehatan, 15 Desember 2023</p> <p>433. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari pada Dinas Kesehatan, 15 Desember 2023</p> <p>434. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. (puskesmas), 15 Desember 2023</p> <p>435. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. (Lab Kes), 15 Desember 2023</p> <p>436. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis</p>
--	--	--	--



			<p>pada Dinas Perhubungan, 15 Desember 2023</p> <p>437. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya Gunungkidul pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), 15 Desember 2023</p> <p>438. Raperwal tentang Penerapan Peraturan Zonasi, 19 Desember 2023</p> <p>439. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah, 19 Desember 2023</p> <p>440. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, 19 Desember 2023</p> <p>441. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengan Pertama pada Dinas Pendidikan 19 Desember 2023,</p> <p>442. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, 19 Desember 2023</p> <p>443. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, 19 Desember 2023</p> <p>444. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,</p>
--	--	--	--



			<p>Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 19 Desember 2023</p> <p>445. Raperbup Sleman tentang Rintisan Kalurahan Budaya, 19 Desember 2023</p> <p>446. Raperbup Sleman tentang Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, 19 Desember 2023</p> <p>447. Raperbup Sleman tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026, 19 Desember 2023</p> <p>448. Reperbu Kulon Progo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 20 Desember 2023</p> <p>449. Raperbup Kulon Progo tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di lingkungan Pemerintah Kab. Kulon Progo, 20 Desember 2023</p> <p>450. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, 20 Desember 2023</p> <p>451. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koordinator Wilayah Kapanewon Bidang Pendidikan 20 Desember 2023,</p> <p>452. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman, 20 Desember 2023</p>
--	--	--	--



			<p>453. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan, 20 Desember 2023</p> <p>454. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan, 20 Desember 2023</p> <p>455. Raperbup Gunungkidul tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, 20 Desember 2023</p> <p>456. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD, 21 Desember 2023</p> <p>457. Raperbup Gunungkidul tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 21 Desember 2023</p> <p>458. Raperbup Gunungkidul tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, 21 Desember 2023</p> <p>459. Raperbup Gunungkidul tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah, 21 Desember 2023</p> <p>460. Raperbup Gunungkidul tentang Besaran Presentase dan Pertimbangan Dasar Pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, 21 Desember 2023</p> <p>461. Rapergub tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2022 tentang Kedudukan,</p>
--	--	--	---



			<p>Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 22 Desember 2023</p> <p>462. Raperwal tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, 22 Desember 2023</p> <p>463. Raperbup Gunungkidul tentang Tata Naskah Dinas, 22 Desember 2023</p> <p>464. Raperbup Gunungkidul tentang Taman Budaya Gunungkidul, 22 Desember 2023</p> <p>465. Raperbup Sleman tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini, 22 Desember 2023</p> <p>466. Rapergub tentang Forum Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 27 Desember 2023</p> <p>467. Raperbup Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, 29 Desember 2023</p> <p>468. Raperbup Sleman tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, 29 Desember 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri rapat koordinasi, fasilitasi penyusunan Raperda/Raperkada dan FGD yang diadakan oleh Pemda/DPRD
<p>Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM yang dapat berkinerja dengan cepat dan baik; 2. Kurangnya koordinasi antara atasan dan staff dalam pelaksanaan tugas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Evaluasi Kebijakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka Pengumpulan Data verifikasi lapangan terkait Evaluasi Kebijakan Permohonan Merek terlaksana pada bulan Januari s/d Juli 2023 dengan Judul Kajian Evaluasi Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek pada Kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran kegiatan pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan hukum dan ham diwilayah pada tahun 2023 telah tercapai sesuai dengan target yang diharapkan 2. Koordinasi dengan beberapa instansi terkait terjalin sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi berjalan baik 3. Hasil penelitian dan kajian pada tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang



		<p>Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>2. Kegiatan Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah Tahun 2023 dilaksanakan setiap triwulan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Triwulan I pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Judul Tinjauan Yuridis Pengawasan Keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Yogyakarta Internasional Airpot dalam Upaya Menjunjung Tinggi Nilai HAM; b. Triwulan II pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Menuntaskan Permasalahan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Sudut Perspektif HAM; c. Triwulan III pada tanggal 18 September 2023 dengan Judul Upaya Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian; d. Triwulan IV pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Judul Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Untuk Masyarakat Terhadap Perilaku Tawuran. <p>3. Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dan Integritas dilaksanakan bulan Januari s/d Desember 2023</p> <p>4. Penerbitan Jurnal diterbitkan 1 tahun 2x pada bulan April dan September 2023</p>	diharapkan.
<p>Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya database penyandang disabilitas beserta kompetensinya dan lowongan kerja yang sesuai dengan ragam disabilitas. 2. Keterbatasan fasilitas/akomodasi untuk penyandang disabilitas 3. Penanggung jawab pelaporan KKPHAM pada Kabupaten Kota banyak berubah dan baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan program Pemajuan HAM dan Penegakan HAM di Wilayah Ruang Rapat Kanwil peserta 15 orang Rabu, 3 Februari 2021 2. Rapat Evaluasi dan persiapan Pelaporan Capaian Aksi HAM Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Senin, 22 Februari 2021 3. Rapat Evaluasi dan persiapan data Kab/Kota Peduli HAM Resto Jogjo Khasanah Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM pada tanggal 20 Februari 2023 dengan jumlah peserta 40 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 2. Pelaksanaan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di



	<ol style="list-style-type: none"> 4. Masih banyaknya data Kabupaten kota yang belum sesuai dengan Indikator 5. Penguang jawab pelaporan KKPAM pada Kabupaten Kota bayak berubah dan baru 6. Beberapa surat koordinasi belum mendapat tanggapan dan balasan dari instansi terkait <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data pelaksanaan RANHAM di Daerah. • Adanya mutasi pegawai di OPD yang belum pernah menangani aksi HAM atau RANHAM. 7. Data dukung administrasi (selain format pelaporan) yang cukup banyak sehingga perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menyiapkan atau melaporkan data dukung. 8. Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Daerah. 9. Setiap OPD melakukan mutasi pegawai tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./kota Peduli HAM. <ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum dilaporkan. • Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi. • Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data pelaksanaan RANHAM di Daerah. • Adanya mutasi pegawai di OPD yang belum pernah menangani aksi HAM atau RANHAM. • Data dukung administrasi (selain format pelaporan) yang cukup banyak sehingga perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menyiapkan atau melaporkan data 	<p>Wonosari Rabu, 24 Maret 2021</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Selasa, 06 April 2021 5. Rapat Aksi HAM Daerah Tahun 2021 Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Kamis, 15 April 2021 6. Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan program Pemajuan HAM dan Penegakan HAM di Wilayah Ruang Rapat Kanwil peserta 15 orang Rabu, 3 Februari 2021 7. Rapat Evaluasi dan persiapan Pelaporan Capaian Aksi HAM Aula Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Senin, 22 Februari 2021 8. Rapat Evaluasi dan persiapan data Kab/Kota Peduli HAM Resto Jogjo Khasanah Jalan Wonosari Rabu, 24 Maret 2021 9. Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Selasa, 06 April 2021 10. Rapat Aksi HAM Daerah Tahun 2021 Rumah Makan Goebog Resto, Komplek Ruko Tandana Raya, Jl. Wonosari, Banguntapan, Bantul Kamis, 15 April 2021 11. Diseminasi Hak Asasi Manusia Penguatan Unit Pelaksanaan Teknis dalam mengimplementasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Wisma Tamu Dhalem Pengayoman, Jl. Taman Siswa No. 23 Yogyakarta Rabu, 16 Juni 2021 12. Rapat Telaahan Rancangan Produk Hukum Daerah dari Berspektif HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Wisma Tamu Dhalem Pengayoman, Jl. Taman Siswa No. 23 Yogyakarta Kamis, 24 Juni 2021 13. Rapat Koordinasi persiapan Penilaian KKP HAM Rumah Makan Bu Baha Jl. Garuda, Plumbon, Banguntapan Bantul Yogyakarta Senin, 23 Agustus 2021 	<p>Wilayah Tahun 2023 pada tanggal 16 Maret 2023 dengan peserta 40 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Persiapan Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah pada tanggal 13 April 2023 dengan peserta 20 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 4. Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah pada tanggal 17 April 2023 dengan peserta 22 orang di Cimoll Resto. 5. Pelaksanaan Hasil Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM di Daerah tanggal 25 Mei 2023 dengan peserta 24 di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 6. Rapat Koordinasi Pembinaan Pos Yankomas pada tanggal 10 Mei 2023 dengan peserta 40 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 7. Pengumpulan Data dan Pendampingan Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tanggal 22 Mei 2023 dengan peserta 45 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 8. Persiapan Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah pada tanggal 8 Juni 2023 dengan peserta 16 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 9. Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah pada tanggal 12 Juni 2023 sebanyak 45 orang di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY. 10. Monitoring dan Evaluasi Telaahan atau
--	---	---	---



	<p>dukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam melakukan pengumpulan dan pelaporan data penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Daerah. • Setiap OPD melakukan mutasi pegawai tanpa adanya kaderisasi tentang Kab./kota Peduli HAM. • Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum melaporkan. • Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi. • Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas ke Jakarta. • Banyaknya kasus dugaan permasalahan HAM yang belum melaporkan. • Anggaran untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, dan klarifikasi di lapangan tidak mencukupi. 	<p>14. Rapat Diseminasi Hak Asasi Manusia dalam Analisis Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dan kreteria Penilaian KKP HAM Wisma Tamu Dhalem Pengayoman, Jl. Taman Siswa No. 23 Yogyakarta Rabu, 14 September 2021</p> <p>15. Rapat terkait dengan pelaksanaan hari HAM Sedunia Ditjen HAM Senin s.d Rabu, 6-8 Desember 2021</p>	<p>Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM pada tanggal 6 Juli 2023 di ruang rapat Kanwil Kemenkumham DIY.</p> <p>11. Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM terkait Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang Melanggar Pergub DIY No 34 Tahun 2017 pada tanggal 18 Juli 2023 di Dapur Pitiek sebanyak 22 orang.</p> <p>12. Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dalam Kasus Universitas Proklamasi 45 pada tanggal 18 Agustus 2023 di Wisma tamu ndalem pengayoman sebanyak 22 orang.</p> <p>13. Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dalam Kasus Sengketa Tanah Bapak Sugeng Suprihatin pada tanggal 8 September 2023 di wisma tamu ndalem pengayoman sebanyak 22 orang.</p> <p>14. Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Wilayah pada tanggal 15 September 2023 di wisma tamu ndalem pengayoman dengan peserta 50 orang.</p> <p>15. Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah dalam Kasus pada tanggal 20 September 2023 di wisma tamu ndalem pengayoman dengan peserta 22 orang.</p> <p>16. Rapat Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Kasus Andi Suharto pada tanggal 13 Oktober 2023 di wisma tamu ndalem pengayoman dengan peserta 22 orang.</p>
--	--	---	--



3. DIVISI PEMASYARAKATAN

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2023

Tabel 1.9 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Pemasyarakatan

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penerapan hasil pelatihan terkendala pada minimnya anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana. Susahnya memperoleh bahan baku yang baik dan berkualitas dengan harga murah. Masih terdapat wali narapidana yang belum mahir dalam mengoperasikan computer dalam melaksanakan penginputan data Pembinaan SPPN. Terbatasnya biaya pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan Antar Wilayah. Rekapitulasi Data Pemilih di Lapas/Rutan/LPKA terkendala pada penghuni Lapas/Rutan/LPKA yang fluktuatif (Narapidana/tahanan aktif selalu berubah (ada penambahan, sudah bebas, dsb). Operator Rekap Data Pemilih Di Lapas/Rutan/LPKA sering terlambat memberikan Data. Evaluasi pertukaran data SPPT-TI terdapat kendala dalam penerimaan data adalah APH lainnya belum secara konsisten memanfaatkan pertukaran data melalui SPPT-TI sehingga di beberapa UPT tidak ditemukan data dimaksud. Masih ada kendala dalam download/pemanfaatan data SPPT-TI yang dikirim oleh APH lainnya yang menyebabkan terjadinya duplikasi pekerjaan. Belum semua UPT mengimplementasikan penggunaan TTE Tersertifikasi pada dokumen SPHMP. Implementasi SPPT TI pada Bapas belum bisa dilakukan. Kewenangan Operator SDP Kantor Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pelatihan narapidana bersertifikat pada tahun 2022 ini mencapai 530 narapidana yang telah melaksanakan pelatihan dan memperoleh sertifikat. Pada pelaksanaannya disamping menggunakan anggaran yang ada dalam DIPA masing-masing UPT pelatihan narapidana tersebut juga melibatkan pihak ketiga, dengan biaya pelatihan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut seperti di Lapas Kelas IIA Yogyakarta melibatkan Rumah BUMN Yogyakarta dan Lapas Kelas IIB Sleman menggandeng PT. Pertamina Lubricants guna melakukan pelatihan tersebut. Dengan rincian sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 169 orang Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 120 orang Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebanyak 70 orang Lapas Kelas IIB Sleman sebanyak 92 orang Lapas Kelas IIB Wonosari sebanyak 79 orang Kegiatan pelatihan kemandirian telah terlaksana dengan sangat baik dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari terbukti dengan capaian pemenuhan Target Penyetoran PNBK kegiatan kerja pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dari target Rp. 26.905.000,- sudah terpenuhi sebesar Rp. 31.314.100,- (116,39%) dengan catatan seluruh Lapas dan Rutan telah mencapai lebih dari 100% dari target utama. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pelatihan narapidana bersertifikat pada tahun 2023 mencapai 1039 yang telah melaksanakan pelatihan dan memperoleh sertifikat. Dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Lapas Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 99 orang; Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta sebanyak 80 orang; Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebanyak 73 orang; Lapas Kelas IIB Sleman sebanyak 80 orang; Lapas Kelas IIB Wonosari sebanyak 727 orang. Kegiatan pelatihan kemandirian telah terlaksana dengan sangat baik dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari terbukti dengan capaian pemenuhan target penyetoran PNBK kegiatan kerja pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dari target Rp38.585.000,00 telah tercapai sebesar Rp41.482.670,00 (107,51%) dengan catatan seluruh Lapas dan Rutan telah mencapai lebih dari 100% dari target utama. Adapun kegiatan-kegiatan di dalam Lapas yang sampai dengan saat ini adalah kegiatan di bidang Agribisnis, manufaktur dan bidang jasa. Dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat dilaporkan hasil penilaian SPPN yang telah dicapai: <ol style="list-style-type: none"> Seluruh UPT Pemasyarakatan yang



	<p>sangat terbatas, sehingga menghambat kontrol terhadap input data dari UPT Pemasarakatan.</p> <p>12. Pada kehumasan Divisi Pemasarakatan terdapat kendala Belum ada sarana prasarana yang mendukung, seperti kamera dan laptop yang kompeten untuk editing.</p> <p>13. UPT melakukan posting berita, waktunya tidak dibatasi, dan tidak melakukan share link berita harian baik dalam grup WA Humas maupun SIPASTA, sehingga kesulitan untuk direkap dalam laporan harian.</p>	<p>3. Seluruh UPT Pemasarakatan yang berada di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta semuanya telah menggunakan instrument SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana).</p>	<p>berada di Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta semuanya telah menggunakan instrument SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana);</p> <p>2) Seluruh narapidana telah mendapatkan haknya berdasarkan dari hasil penilaian pembinaan dan tidak mendiskriminasikan hasil pembinaan;</p> <p>4. Terlaksananya pemberian remisi antara lain remisi umum, remisi khusus hari raya, dengan total sebanyak 2657 WBP dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Remisi Sakit Berkepanjangan 1 Narapidana; 2) Remisi Waisak 6 Narapidana; 3) Remisi Idul Fitri 1161 Narapidana; 4) Remisi Khusus Hari Anak Nasional 7 Anak Binaan; 5) Remisi Umum 1368 Narapidana; 6) Remisi Khusus Natal 114 Narapidana. <p>5. Terlaksananya kegiatan sidang TPP pada tahun 2023 sebanyak 11 kali, yang dilaksanakan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hari Senin tanggal 09 Januari 2023; 2) Hari Senin tanggal 27 Februari 2023; 3) Hari Senin tanggal 03 April 2023; 4) Hari Senin tanggal 17 April 2023; 5) Hari Senin tanggal 19 Juni 2023; 6) Hari Kamis tanggal 06 Juli 2023; 7) Hari Kamis tanggal 21 September 2023; 8) Hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023; 9) Hari Rabu tanggal 15 November 2023; 10) Hari Jumat tanggal 01 Desember 2023; 11) Hari Senin tanggal 18 Desember 2023. <p>6. Terlaksananya kegiatan SDP Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerja Sama antara lain Remisi Online, Integrasi</p>
--	--	---	---



<p>Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya pembuatan litmas pembinaan bagi narapidana dan litmas pembimbingan bagi klien yang merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam memberikan program pembinaan Narapidana atau pembimbingan bagi klien; Terbatasnya sarana dan prasarana maupun biaya dalam program layanan pembinaan maupun pembimbingan yang dapat mengakomodir kebutuhan narapidana dan atau klien; Penerbitan SK Pencabutan Program Re-Integrasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang masih terlambat; Kantor Wilayah sebaiknya diberikan akses terhadap implementasi SDP Bapas sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan keadilan restorative dalam penyelenggaraan pemasyarakatan bagi pelaku dewasa nihil dikarenakan belum adanya dasar hukum dalam bentuk undang-undang terkait mekanisme RJ. 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dibuat SK tim pelaksana Koordinasi dan Sosialisasi penerapan keadilan restorative dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan; Terlaksananya monitoring dan evaluasi berkala pada Bapas dan LPKA; Terlaksananya kegiatan Dilkumjakpol-Plius pada tanggal 7 Juni 2022; Terlaksananya uji petik modul bimbingan bagi klien pemasyarakatan di bapas Wonosari; Terlaksananya pengukuhan DPW Ipkemindo DIY periode 2022-2025; Dalam pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan Anak di D.I. Yogyakarta telah memenuhi target dari yang di tentukan : <ul style="list-style-type: none"> Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan : 1100% anak memperoleh hak integrasi : 100% anak memperoleh hak pengasuhan : 100% anak mengikuti pendidikan formal dan non formal : 100% dalam peningkatan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah D.I. Yogyakarta telah melebihi target yang telah di tentukan <ul style="list-style-type: none"> klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga : 81% menurunnya anak mendapatkan putusan pidana penjara : 72% klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya : 71% 	<p>Online (Asimiliasi, CB, PB, CMB), SPPT-TI dan Upload Dokumen SPPN.</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh UPT Bapas se DIY telah membuat table Perencanaan Pelaksanaan Kordinasi tentang Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan; UPT Bapas se DIY telah melaksanakan Asistensi Online Persiapan Rapat Koordinasi Tentang Piloting Implementasi Keadilan Restoratif. UPT Bapas se- DIY telah melaksanakan kegiatan koordinasi dan sosialisasi tentang Peran Pemasyarakatan dalam Penerapan Keadilan Restoratif ke APH setempat. Telah dilaksanakan penmandatanganan nota kesepakatan/ MoU tentang sinergi penyelnggaran Griya Abhipraya : <ol style="list-style-type: none"> Bapas Jogja dengan Pemkot Yogyakarta; Kantor Wilayah dengan Pemkab Sleman, Pemkab Bantul, Pemkab Kulonprogo, Pemkab Gunungkidul. Telah diresmikan griya abhipraya pada tanggal 7 Desember 2023 Griya Abhipraya merupakan program prioritas nasional dalam penerapan restorative justice, yaitu suatu program penguatan terhadap keterlibatan Masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemasyarakatan melalui Kerjasama, kolaborasi dan sinergi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah disepakati Capaian pemberian rekomendasi program pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana dan anak : 74% Capaian penyelesaian litmas untuk program pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana dan anak :83%;
--	--	--	---



			<p>10. Dalam pemenuhan hak pendidikan Anak di LPKA dan pengentasan Anak di D.I. Yogyakarta telah memenuhi target dari yang di tentukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anak yang mengikuti kegiatan pendidika keterampilan : 100% • anak memperoleh hak integrasi : 100% • anak memperoleh hak pengasuhan : 100% • anak mengikuti pendidikan formal dan non formal : 100% <p>11. dalam peningkatan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah D.I. Yogyakarta telah melebihi target yang telah di tentukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • klien usia ptduktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar klembag : 79% • menurunnya anak mendapatkan putusan pidana penjara : 82% • klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya : 82%
<p>Subbidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan/ permohonan pendampingan Bantuan Hukum bagi tahanan miskin/ tidak mampu tidak ada jawaban diterima/ ditolak dari OBH sehingga menyulitkan UPT untuk menghitung persentase fasilitasi bantuan hukum. 2. Kurangnya tenaga kesehatan khususnya dokter pada UPT Pemasyarakatan. 3. Tidak adanya anggaran akreditasi klinik pratama UPT Pemasyarakatan. 4. Jumlah SDM yang terlatih dalam bidang rehabilitasi lebih sedikit dibanding dengan jumlah peserta rehabilitasi; 5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam pelaksanaan program rehabilitasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya jumlah overstaying melalui penguatan data dan kerjasama dengan stakeholder. 2. Seluruh tahanan mendapatkan layanan penyuluhan hukum. 3. Memberikan fasilitasi bantuan hukum kepada tahanan. 4. Tahanan/Narapidana/ Anak pecandu narkoba memperoleh Layanan Rehabilitasi Narkotika, dengan peserta Rehabilitasi Medis: 20 orang (<i>seluruhnya mengikuti program sampai dengan selesai</i>) dan Rehabilitasi Sosial: 120 orang (102 mengikuti sampai dengan selesai, 16 orang mutasi ke wilayah lain karena faktor keamanan dan 02 keluar lapas karena menjalani program integrasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada tahanan yang overstaying selama tahun 2023 dengan adanya penguatan sinergitas yang kuat dengan aparaturnya penegak hukum lainnya. 2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan melalui kerjasama dengan stakeholder. 3. Peningkatan layanan fasilitasi bantuan hukum. 4. Seluruh tahanan telah mendapatkan layanan penyuluhan hukum. 5. Peningkatan layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi tahanan. 6. Menyelenggarakan layanan rehabilitasi pemasyarakatan kepada Tahanan/ Narapidana/ Anak pecandu, penyalahguna narkoba dengan peserta 20 orang Rehab Medis dan 70 orang



			<p>Rehab Sosial (seluruh peserta mengikuti sampai dengan selesai), dengan adanya peningkatan kualitas hidup.</p> <p>7. Seluruh Klinik UPT Pemasarakatan telah memiliki Surat Izin Operasional Klinik, dan Dua UPT Pemasarakatan telah memiliki akreditasi Klinik dengan status Paripurna.</p> <p>8. Menetapkan satu UPT Dapur Sehat Percontohan UPT Pemasarakatan.</p>
<p>Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan petugas pemasarakatan terhadap implementasi Deteksi Dini dalam Intelijen; 2. Belum tertibnya pengisian SDP Fitur Keamanan di UPT Pemasarakatan; 3. Kurangnya pemahaman petugas terhadap Kode Etik petugas pemasarakatan; 4. Belum melaksanakan tes urine secara berlanjut pada Pegawai dan WBP; 5. Mempertahankan predikat UPT BERSINAR (Bersih Dari Narkoba); Belum adanya sosialisasi SDP Basan Baran di UPT. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan. 2. Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan. 3. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA. 4. Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan. 5. Tidak terdapat UPT dengan tingkat overcrowding di atas 300%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Sosialisasi Teknis SDP Fitur Keamanan dan Intelijen pada tanggal 14 Maret 2023 dengan narasumber dari Ditjenpas, Polda DIY dan BINDA DIY; 2. Pengisian SDP Fitur Keamanan oleh UPT Pemasarakatan mengalami peningkatan; 3. Setiap UPT Pemasarakatan telah melaksanakan laporan Kode Etik secara berlanjut selama tahun 2023; 4. UPT Pemasarakatan dan Divisi Pemasarakatan total telah melaksanakan tes urine pada 115 petugas dan 1343 WBP selama tahun 2023; 5. Pengeledahan di UPT Pemasarakatan selama tahun 2023 tidak ditemukan alat komunikasi HP yang disalahgunakan WBP jadi UPT Pemasarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham DIY mampu mempertahankan predikat UPT BERSINAR; 6. Telah dilaksanakan sosialisasi SDP Basan Baran dari Dirjenpas tanggal 20 Juli 2023.



4. DIVISI KEIMIGRASIAN

Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2023

Tabel 1.10 Permasalahan yang dihadapi dan Capaian Divisi Keimigrasian

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023
Sub Bidang Perizinan Keimigrasian	Terbatasnya sarpras pendukung berupa kendaraan karena banyaknya volume kegiatan koordinasi	Terlaksananya Implementasi Mobile Paspor pada UPT	Terlaksananya Implementasi Mobile Paspor terbaru pada UPT
Sub Bidang Informasi Keimigrasian	Terbatasnya sarpras pendukung kegiatan penyebaran informasi keimigrasian	Terlaksananya Sosialisasi Mobile Paspor di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sosialisasi Mobile Paspor terbaru di wilayah 2. Tersusunnya identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan terhadap Implementasi Paspor Online pada satuan kerja 3. Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah
Subbidang Intelijen Keimigrasian	Tidak terdapat permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dikarenakan seluruh kinerja telah dilaksanakan secara optimal dan maksimal	<p>Sub bidang intelijen keimigrasian berkinerja dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian yang telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi keimigrasian sebanyak 12 kegiatan; 2. Telah dilaksanakan operasi mandiri di tempat – tempat yang terdapat warga negara asing sebanyak 12 Kegiatan; 3. Telah dilaksanakan kegiatan rapat tim pengawasan orang asing sebanyak 2 Kegiatan; 4. Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tugas Teknis (Bindalwasnis) sebanyak 15 Kegiatan. 	<p>Sub bidang penindakan keimigrasian berkinerja dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian yang telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi keimigrasian sebanyak 52 kegiatan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengumpulan data dan informasi sebanyak 2 kegiatan; 2. Telah dilaksanakan operasi mandiri di tempat – tempat yang terdapat warga negara asing sebanyak 16 Kegiatan; 3. Telah dilaksanakan kegiatan rapat tim pengawasan orang asing sebanyak 2 Kegiatan; 4. Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tugas Teknis (Bindalwasnis) sebanyak 55



			Kegiatan.
<p>Sub Bidang Penindakan Keimigrasian</p>	<p>Tidak terdapat permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dikarenakan seluruh kinerja telah dilaksanakan secara optimal dan maksimal</p>	<p>Sub bidang penindakan keimigrasian berkinerja dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian yang telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Pembinaan terkait penindakan keimigrasian di UPT sebanyak 12 Kegiatan; 2. Telah dilaksanakan pemantauan dan atau kerjasama dalam rangka pembinaan penindakan keimigrasian di tempat – tempat yang terdapat warga negara asing sebanyak 30 Kegiatan; 3. Telah dilaksanakan operasi gabungan pengawasan orang asing sebanyak 6 Kegiatan 4. Telah dilaksanakan Penyelidikan / Pra Penyidikan sebanyak 2 Kegiatan 5. Telah dilakukan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 36 Warga Negara Asing 	<p>Sub bidang penindakan keimigrasian berkinerja dalam kerangka penegakan hukum keimigrasian yang telah dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Pembinaan terkait penindakan keimigrasian di UPT sebanyak 12 Kegiatan; 2. Telah dilaksanakan pemantauan dan atau kerjasama dalam rangka pembinaan penindakan keimigrasian di tempat – tempat yang terdapat warga negara asing sebanyak 40 Kegiatan; 3. Telah dilaksanakan operasi gabungan pengawasan orang asing sebanyak 8 Kegiatan 4. Telah dilaksanakan Penyelidikan / Pra Penyidikan sebanyak 1 Kegiatan 5. Telah dilakukan pemberian Tindakan Administratif Keimigrasian kepada 32 Warga Negara Asing 6. Telah diajukan 1 orang WNI dalam rangka pencegahan dalam keadaan mendesak



G. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2023.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menyajikan ringkasan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta Tahun 2023.

BAB I **PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, latar belakang, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan pengertian dan rumusan pengukuran kinerja yang digunakan. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun setiap divisi, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.



Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap divisi pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisis atas capaian kinerja, termasuk factor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 2. Lain-lain yang dianggap perlu**



BAB II

Perencanaan Kinerja

Informasi tentang Perencanaan Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2020-2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2020-2024

Perencanaan Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kementerian Hukum dan HAM RI mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Dalam perencanaan strategis yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Perencanaan strategis yang terdiri atas berbagai komponen tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024. Rencana strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI, MISI, DAN TATA NILAI

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil



Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Adapun 9 misi presiden dan wakil presiden tahun 2020 dan 2024 adalah:



RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,



Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERUS DILANJUTKAN
Dengan menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri

TRANSFORMASI EKONOMI
Guna mengatasi defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan

PEMBANGUNAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Agar kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain

PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Agar kita cepat merespons setiap perubahan dunia yang ada

DEREGULASI
Dengan pengajuan *omnibus law* ke DPR



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu : **“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**”.

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian



Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- b. Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
- c. Misi nomor 8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Adapun yang menjadi misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi,
- d. Melaksanakan Peghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum;
- f. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Masyarakatan;
- g. Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

2. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:



- a. **Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. **Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima;
- c. **Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatandan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- d. **Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia;
- e. **Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- f. **Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan** bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai



dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN;

- g. **Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan** bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/income*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan SAKIP pada satuan kerja pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adapun yang menjadi sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang tertuang dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksana tugas teknis lainnya

No.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM										
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					22.526.161	24.200.308	28.028.769	29.430.197	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1					
SK 7-01	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					22.526.161	24.200.308	28.028.769	29.430.197	Kepala Divisi Administrasi
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1					

2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5254 - Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah										
SK 15	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemasarakatan yang berkualitas di Wilayah					1.241.726	1.299.466	1.364.430	1.432.297	Kepala Kantor Wilayah



	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80	81	82	83					
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah					12.978.043	14.843.122	15.587.748	16.402.159	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar	71%	75%	80%	85%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara Berkualitas	92%	93%	94%	95%					
	Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%	96%	97%	98%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	60%	70%	80%	90%					
	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	80%	85%	90%					



	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)	60%	70%	80%	90%					
	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika	23%	25%	27%	29%					
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar					503.954	1.017.785	1.068.688	1.122.121	Kepala Rumah Tahanan
	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	70	80	90	100					
	Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70	80	90	100					
	Persentase Tahanan yang Memeroleh Fasilitas Bantuan Hukum	70	80	90	100					
SK 16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi					794.455	3.101.750	3.256.831	3.430.424	Kepala Lembaga Pemasyarakatan
	Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian	60%	65%	70%	75%					
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	97%	98%	99%	100%					
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Merubah	13%	15%	17%	19%					



	Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin									
	Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	28%	31%	34%					
	Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif	62%	67%	72%	77%					
	Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang					
SK 17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan dan Baran di Wilayah sesuai Standar					632.116	682.052	716.184	752.220	Kepala Rupbasan
	Persentase Barang Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	60%	70%	80%	90%					
	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	40%	60%	80%	100%					
SK 18	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai dengan Standar					409.647	940.020	992.113	1.041.721	Kepala Lapas/Rutan/LPKA
	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat Dicegah	60%	70%	80%	90%					
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	85%	90%					
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas	60%	70%	80%	90%					
SK 19	Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemenuhan Hak Pendidikan					729.704	3.427.055	3.598.378	3.778.296	Kepala BAPAS



	Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah Sesuai Standar									
	Persentase Klien Usia Produktif yang Memeroleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	40%	50%	60%	70%					
	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	65%	60%	55%	50%					
	Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Pendidikannya	25%	30%	35%	40%					
SK 20	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah Sesuai Standar					204.850	248.831	261.280	273.499	Kepala LPKA
	Persentase Anak Mengikuti Kegiatan Keterampilan dan Bersertifikat	70%	75%	80%	85%					
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%	100%					
	Persentase Anak yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	80%	90%	100%					
	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Forma	70%	80%	90%	100%					
SK 21	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker					57.898.167	70.916.342	71.018.402	73.006.914	Kepala Lapas/Rutan/LPKA/Bapas/Rupbasan/RS Penyoman
	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					



	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an					
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an					
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an					
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an					
	Jumlah Kendaraan Bermotor	-	-	-	-					
	Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi									
	Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran									
	Jumlah Gedung/Bangunan	-	-	-	-					
SK 22	Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakatan dan Kapasitas Hunian					2.934.933	3.915.001	3.925.839	4.035.762	
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Masyarakatan (Lapas)									
	Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)									



	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP)									
	Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)									
	Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas)									
	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Lapas)									
	Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan									



3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah										
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah					914.225	1.136.904	1.193.750	1.253.437	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,20	3,25	3,30					
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14					

4. Program Administrasi Hukum Umum

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Program Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah										
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum					1.572.070	1.572.070	1.572.070	1.572.070	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%					
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD					705.930	705.930	705.930	705.930	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat	82%	84%	86%	88%					



	terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

Tabel 2.5 Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah										
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM					997.901	1.008.933	1.020.917	1.033.880	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	630 Layanan	631 Layanan	732 Layanan	665 Layanan					
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus					
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal					228.014	245.967	264.141	282.553	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%					
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus					
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	3 Laporan					



6. Program Pembentukan Hukum

Tabel 2.6 Program Pembentukan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah										
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah					198.000	207.900	218.295	229.210	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%	80%					
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan					42.000	44.100	46.305	48.620	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang					

7. Program Pemajuan HAM

Tabel 2.7 Program Pemajuan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2023	2021	2022	2023	2024	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah										
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM					113.457	125.766	138.343	152.178	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem	4 Ins Pem					
	jumlah kab/kota peduli HAM	3	3	3	3					
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	1	1	1					



SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					100.580	100.580	110.638	121.702	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	3	3					

8. Program Pembinaan Hukum Nasional

Tabel 2.8 Program Pembinaan Hukum Nasional

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2023	2021	2022	2023	2024	
5256 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah										
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah					111.503	114.848	118.294	121.842	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan					
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah										
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah					2.645.641	2.725.010	2.806.761	2.890.963	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	82%	82%					
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	77	77	76,75	76,75					



	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%					
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	20%	20%	20%					

9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.9 Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2023	2021	2022	2023	2024	
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah										
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia					200.687	231.785	214.981	222.505	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%					
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku					



4. ALOKASI ANGGARAN BELANJA

Kementerian Hukum dan HAM RI menetapkan program untuk mencapai sasaran strategis tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Sebanyak 4 (empat) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2023 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10 Alokasi Anggaran masing-masing program

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
1)	Program Dukungan Manajemen		22.121.987.000	26.052.197.000
1	Kantor Wilayah (Setjen)	30/11/2022 013.01.2.409181/2023	21.860.741.000	25.790.951.000
2	Kantor Wilayah (Litbang)	30/11/2022 013.11.2.409188/2023	261.246.000	261.246.000
2)	Program Pembentukan Regulasi		476.957.000	476.957.000
1	Kantor Wilayah (PP)	30/11/2022 013.08.2.409185/2023	320.000.000	320.000.000
2	Kantor Wilayah (BPHN)	30/11/2022 013.10.2.409187/2023	156.957.000	156.957.000
3)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		8.937.305.000	9.877.570.000
1	Kantor Wilayah (AHU)	30/11/2022 013.03.2.409180/2023	2.429.950.000	2.429.950.000
2	Kantor Wilayah (Pas)	30/11/2022 013.05.2.409182/2023	869.208.000	869.208.000
3	Kantor Wilayah (Imigrasi)	30/11/2022 013.06.2.409183/2023	1.136.825.000	1.900.285.000
4	Kantor Wilayah (KI)	30/11/2022 013.07.2.409184/2023	2.140.998.000	2.272.303.000
5	Kantor Wilayah (BPHN)	30/11/2022 013.10.2.409187/2023	2.360.324.000	2.405.824.000
4)	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		239.895.000	239.895.000
1	Kantor Wilayah (HAM)	30/11/2022 013.09.2.409186/2023	239.895.000	239.895.000
TOTAL			31,776,144,000	36.646.619.000

5. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan



yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

- 1) mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsadan bernegara;
- 2) mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
- 3) mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;
- 4) terlindunginya hak asasi manusia;
- 5) meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
- 6) menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumensesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
- 7) mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



4. TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

5. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020 masih melanjutkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Tahun 2020-2024, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yakni:

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum;
2. Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3. Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;
4. Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; dan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.



I. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal dapat dipetakan seberapa besar kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.11 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	4. Implementasi SPIP belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi



6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan diluar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administratif	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.12 Faktor Eksternal Kekuatan dan Kelemahan yang di hadapi Kantor Wilayah

FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Tuntutan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkualitas	1. Adanya kewenangan/intervensi dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparaturnegara	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	



Kekuatan VS Peluang dan Kelemahan VS Peluang yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM

Tabel 2.13 Kekuatan Vs Peluang dan Kelemahan Vs Peluang yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS PELUANG STRATEGI	KELEMAHAN VS PELUANG STRATEGI
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Membentuk peraturan perundang- undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang- undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran

Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Tabel 2.14 Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman yang di hadapi Kantor Wilayah

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN STRATEGI	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN STRATEGI
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang- tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang pemsarakatan, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan. 	



Adapun sasaran kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 yaitu :

Sasaran Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023

**Tabel 2.15 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah
SASARAN KEGIATAN**

NO	SASARAN KEGIATAN
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal
6	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah



II. Program dan Anggaran

Berdasarkan sasaran strategis tersebut diatas, ditetapkan program-program Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024. Sebanyak 4 (empat) program yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang terkait dimana Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta juga melaksanakan program-program dimaksud. Untuk mendukung ketercapaian sasaran sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta mengalokasikan anggaran pada tahun 2023 untuk masing-masing program dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 2.16 Program dan Alokasi Anggaran Kantor Wilayah

NO	PROGRAM	TANGGAL DAN NOMOR DIPA	DIPA AWAL	DIPA REVISI AKHIR
1)	Program Dukungan Manajemen		22.121.987.000	26.052.197.000
1	Kantor Wilayah (Setjen)	30/11/2022 013.01.2.409181/2023	21.860.741.000	25.790.951.000
2	Kantor Wilayah (Litbang)	30/11/2022 013.11.2.409188/2023	261.246.000	261.246.000
2)	Program Pembentukan Regulasi		476.957.000	476.957.000
1	Kantor Wilayah (PP)	30/11/2022 013.08.2.409185/2023	320.000.000	320.000.000
2	Kantor Wilayah (BPHN)	30/11/2022 013.10.2.409187/2023	156.957.000	156.957.000
3)	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		8.937.305.000	9.877.570.000
1	Kantor Wilayah (AHU)	30/11/2022 013.03.2.409180/2023	2.429.950.000	2.429.950.000
2	Kantor Wilayah (Pas)	30/11/2022 013.05.2.409182/2023	869.208.000	869.208.000
3	Kantor Wilayah (Imigrasi)	30/11/2022 013.06.2.409183/2023	1.136.825.000	1.900.285.000
4	Kantor Wilayah (KI)	30/11/2022 013.07.2.409184/2023	2.140.998.000	2.272.303.000
5	Kantor Wilayah (BPHN)	30/11/2022 013.10.2.409187/2023	2.360.324.000	2.405.824.000
4)	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		239.895.000	239.895.000
1	Kantor Wilayah (HAM)	30/11/2022 013.09.2.409186/2023	239.895.000	239.895.000
TOTAL			31.776.144.000	36.646.619.000



III. Indikator Kinerja Sasaran

B. Perjanjian Kinerja

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta telah membuat suatu perjanjian kinerja pada awal Januari 2023.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni: Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- a) Intensifikasi pencegahan korupsi;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.



Sedangkan tujuan khususnya adalah:

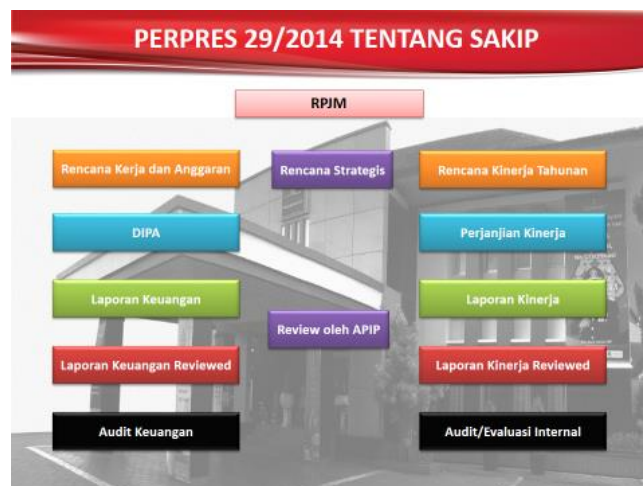
- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2) Ruang lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3) Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah digambarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:





- 4) Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta yang dibuat pada awal tahun 2023. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terlihat pada formulir (terlampir).



Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023

Tabel 2.17 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	732 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan
6	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%



8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61% (Indeks)
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	82 Indeks
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%



		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%



		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%



		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

**Informasi tentang Perhitungan dan Penjelasan Terkait Capaian Kinerja
Masing-Masing Indikator Kinerja Utama dalam Mendukung Tercapainya
Sasaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta**



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan dasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan Kinerja Kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi *Input*, *Output*, dan *Outcome*.

1. *Input* : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. *Output* : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
3. *Outcome* : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana



yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja *outcome*. Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakandua rumus, yaitu :

- 1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka gunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian target} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

I. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA BIAYA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia Secara Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing. Dimana setiap harinya Pegawai Kantor Wilayah membuat Laporan Kinerja dengan mengisi jurnal harian. Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan



outcome) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Penggunaan sumber dana tidak terlepas dari pemenuhan sumber daya manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta terus berinovasi untuk pemenuhan layanan secara optimal. Selain dengan peningkatan mutu pelayanan juga diiringi dengan peningkatan kinerja.

Indikator	2021	2022	2023
Serapan Anggaran	99,79%	99,91%	99,65%
Indeks Kepuasan Layanan	3.87	3.97	3,94
Pengembangan Kompetensi Pegawai	64 pegawai	95 pegawai	164 pegawai
Indeks SPBE	Tidak dinilai	Nilai 2,79 (baik)	Nilai 2,79 (baik)
Indeks AKIP	80,00 (Baik)	95,00 Predikat AA (sangat Baik)	Belum dinilai
Indeks Layanan Publik	3.84	3.97	3.96

Pada Dalam upaya melakukan efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), maka Analisa atas efisiensi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persamaan persepsi tentang pengelolaan kepegawaian dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian (formasi, mutasi, cuti, hukuman disiplin, pemberhentian PNS, kenaikan pangkat, penetapan angka kredit);
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan yang cepat dan tepat waktu dibidang Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum;
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap Divisi;
- 4) Meningkatnya kemampuan SDM agar memiliki keahlian, pengetahuan, kompetensi yang mendukung terselenggaranya pelayanan, baik dibidang Adminisitrasi, Keimigrasian, Pemasarakatan dan Pelayanan Hukum; dan
- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dalam hal Penguatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.



Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Manusia

Tabel 3.1 Analisa atas Efisiensi Sumber Daya Manusia Kanwil Kemenkumham D.I. Yogyakarta

Faktor Internal	Kekuatan (<i>strength</i>) a. Banyaknya Pegawai ingin terus berkembang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; b. Dukungan pimpinan terhadap peningkatan kualitas SDM c. Dukungan sarana prasarana dalam rangka peningkatan kualitas SDM d. Banyaknya aplikasi berbasis IT yang mempermudah pelaksanaan tugas	Kelemahan (<i>Weakness</i>) a. Masih adanya pegawai yang enggan untuk terus meningkatkan kompetensi dan b. Jumlah pegawai yang terus meningkat dan tidak diiringi penambahan pengembangan kompetensi; c. Penilaian kinerja belum sesuai hasil kerja yang diberikan pegawai d. Minimnya Pelatihan (diklat) bagi SDM.
Faktor Eksternal		
PELUANG (<i>Oportunity</i>) a. Tuntutan publik terhadap sikap profesional dalam pengelolaan kepegawaian; b. Tuntutan publik terhadap layanan yang cepat dan tidak ada pungli; c. Kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; d. Keterbukaan informasi publik.	Strategi S-O a. Melaksanakan pengembangan pegawai agar selalu bersifat profesional dalam pelayanan publik; b. Melaksanakan pelayanan yang cepat dan tepat waktu; c. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait maupun antar penegak hukum lainnya; d. Mengoptimalkan aplikasi berbasis IT.	Strategi W-O a. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi secara merata dengan berbagai platform yang ada; b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelayanan publik c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pengelolaan kinerja pegawai d. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi baik secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun Kantor Wilayah.
ANCAMAN (<i>Threats</i>) a. Peraturan yang berubah-ubah terkait Hukuman kinerja dan Disiplin Pegawai; b. Menurunnya tingkat kepuasan publik	Strategi S-T a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan agar setiap ketentuan dapat dilaksanakan dengan maksimal; b. Kebijakan pimpinan untuk terus	Strategi W-T a. Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pegawai yang belum mencapai 20 JP untuk pengembangan kompetensi; b. Mengoptimalkan pegawai untuk menempati pos-pos



<p>terhadap layanan pemerintah; c. Menurunnya tingkat kinerja dan minimnya penyerapan anggaran; d. SDM bertahan di zona nyaman dan tidak mau mengikuti pengembangan kompetensi</p>	<p>melaksanakan tugas dan fungsi secara transparan, efektif, dan efisien; c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran berbasis kinerja d. Melakukan penyegaran terhadap pegawai dan pengembangan kompetensi.</p>	<p>yang ada terkait pelayanan publik; c. Mengoptimalkan penyerapan anggaran berbasis kinerja d. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi baik secara daring maupun luring yang diselenggarakan oleh BPSDM maupun Kantor Wilayah.</p>
--	--	--



II. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SARANA/ PRASARANA

- 1) Sarana prasarana yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta dinilai sudah memadai dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya;
- 2) Sarana prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan pelayanan publik yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta, seperti komputer dan laptop bagi setiap operator pelayanan publik;
- 3) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta membutuhkan pembaharuan pada sarana prasarana seperti personal komputer / laptop, peralatan elektronik lainnya yang sudah tidak layak pakai;
- 4) Untuk kedepannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta membutuhkan pembaharuan meja kursi (meja kubikel) yang seragam agar bisa maksimal dalam tata ruang kerja dikarenakan banyaknya jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.



1. Program Dukungan Manajemen Tahun Anggaran 2023

Capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,94 Indeks	127%

Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.3 Capaian kinerja dan capaian kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	87,0	95,28	109%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta	92,0	95,00	103%

Tabel 3.4 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,94 Indeks	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,94}{3,1}\right) \times 100\% = 127\%$

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah mendapatkan nilai 3.94. Nilai tersebut didapat dari survey balitbang atas layanan internal Kantor Wilayah dengan responden seluruh pegawai Kantor Wilayah dan survey ini dilakukan setiap bulan. Dengan demikian, capaian kinerja indeks kepuasan



layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 127%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis.

Tabel 3.5 Perbandingan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah

NO	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,1 Indeks	3,1 Indeks

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



2. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

Perbandingan capaian kinerja Program Administrasi Hukum Umum tahun 2022 dan 2023:

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Program Administrasi Hukum Umum tahun 2022 dan 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	16,12%	322%	5%	-8.2%	-163.8%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	90,69%	111%	86%	100 %	116%

1) Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang Berkepastian Hukum

a) Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Realisasi Penyerapan Anggaran Subbid Administrasi Hukum Umum TA 2023

- PAGU Anggaran sebesar Rp. 2.429.950.000,-
- Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar Rp. 2.427.130.422,- atau 99,88 %

Realisasi Penerimaan PNBP Subbid Administrasi Hukum Umum TA 2023

- Target tahun 2022 sebesar Rp 6.633.466.875,-
- Target tahun 2023 sebesar Rp 6.965.140.219,- atau naik 5 % sebesar Rp. 331.673.344,-
- Realisasi Tahun 2023 Sebesar Rp 8.023.650.000,- mengalami kenaikan Rp 1.058.509.781,- dari target penerimaan tahun 2023.

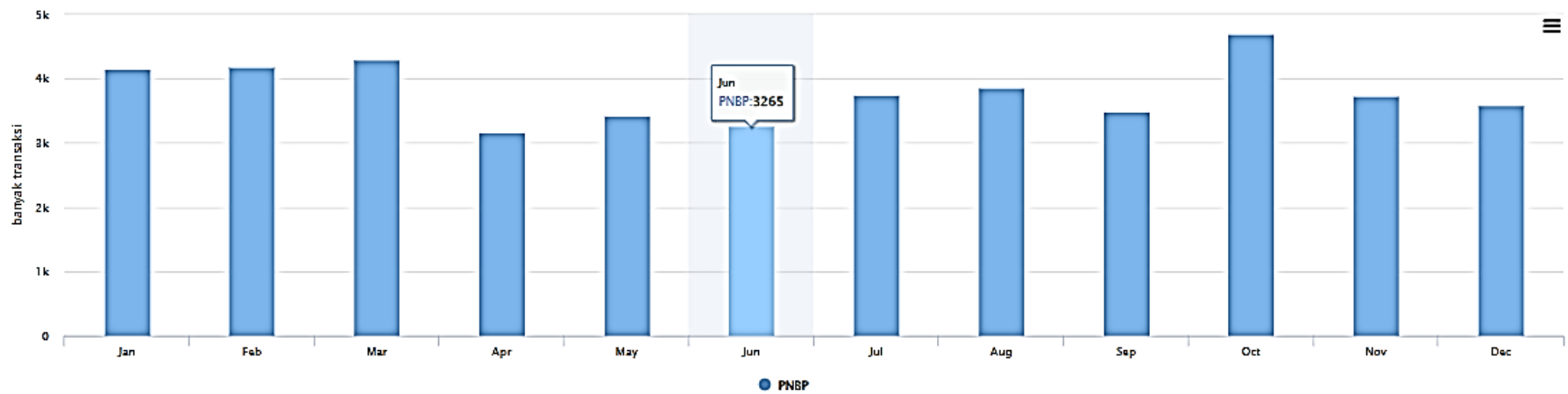


Beranda / MONITORING PNBP

Filter 2023 --Kabupaten/Kota--

Carli

MONITORING PNBP



Tabel Jumlah Permohonan

Total 1 item.

Permohonan	Total Transaksi PNBP Kanwil DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Total Penerimaan PNBP Kanwil DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PNBP	45,582	Rp. 8.023.650.000

Berikut adalah tabel dari jumlah penerimaan PNBP Kanwil Kemenkumham Yogyakarta pada tahun 2023



Tabel 3.7 Perhitungan Kinerja Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Jumlah PNBP 2023 dikurang jumlah target penerimaan PNBP 2022 dibagi jumlah target penerimaan PNBP 2022 dikali 100% $\left(\frac{8.023.650.000 - 8.739.350.000}{8.739.350.000} \right) \times 100\% = -8.2\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{-8.2\%}{5\%} \right) \times 100\% = -163.8\%$

Target penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023 adalah Rp. 6.965.140.219 dan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.023.650.000,-. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan dimana pada tahun 2022 realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp. 8.739.350.000,-. Penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum ini dikarenakan pada tahun 2022, Indonesia sudah masuk dalam masa endemic Covid 19, sehingga transaksi mengalami kenaikan, dikarenakan banyak Notaris yang mengambil cuti setelah pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam masa Endemi. Sementara di tahun 2023 Indonesia sudah masuk dalam kategori Normal. Dengan demikian, realisasi capaian PNBP Administrasi Hukum Umum di D.I. Yogyakarta tahun 2023 sebesar -8.2%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5%, atau capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2023 sebesar -163.8 %.

Tabel 3.8 Perbandingan peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	-8.2 %	-163.8%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



2) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

a) Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Berikut adalah tabel dari jumlah laporan pengaduan Masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan wilayah di D.I. Yogyakarta :

Jumlah pengaduan MPD berdasarkan wilayah

Tabel 3.9 Jumlah Pengaduan MPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	14 November 2023	Denny Wahyudi Lie, S.H.	Esnawan, S.H.	Dugaan Penerbitan Akta Palsu	Dilimpahkan ke MPW
2	20 November 2023	Ginanjari Agung Wijaya	Eduard Ardyanto, S.H.	Dugaan adanya tipu muslihat dan rekayasa jual beli, penggunaan akta palsu dan memalsukan keterangan dalam akta.	Diberikan surat jawaban kepada pemohon, dikarenakan belum lengkap melampirkan bukti

Tabel 3.10 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Sleman Tahun 2023

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	11 April 2023	Ludyarto Wibowo, S.E.	Muhammad Haryanto, S.H.	Bahwa pelapor bukan pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020	Selesai
2	April 2023	Ngadirah	Eni Wijastuti. S.H.	Bahwa pelapor bukan pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020	Selesai



3	24 Oktober 2023	Christina Teguh	Sukarno, S.H.	Permohonan akta perikatan jual beli yang belum diserahkan notaris	Selesai
4	6 November 2023	IR. H. Subakri MT	Tri Purwoko, S.H.	Dugaan adanya pelanggaran kode etik notaris terkait Akta Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Cokroaminoto Yogyakarta	Selesai
5	1 November 2023	Sutikno	Sugiharto, S.H.	Permohonan penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang belum ditindak lanjuti oleh Notaris sejak 08 Februari 2005	On Proses

Tabel 3.11 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Bantul Tahun 2023

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	31 Januari 2023	Nata Hero Soesilo	Sugi Sigit Mahanani Enarwanto, SH.	Pelapor mempermasalahkan beberapa bidang tanah yg dibalik nama atas nama anak-anaknya oleh mantan isterinya dan surat kuasa menjual yg dibuat oleh notaris.	selesai proses dan diteruskan ke MPW
2	3 Juli 2023	Hadi Siswanto/ Maruono	Tri Wahyuni, SH	Pelapor tidak bermaksud menjual tanahnya kepada sebuah PT, tetapi meminta untuk dapat diganti/ tukar guling dg tanah di tempat lain sesuai dg kesepakatan, namun terlapaor membuatkan PPJB dan pelapor tdk tahu dan tdk dibacakan isi aktanya, sehingga tanah tsb beralih hak dan blm mendapatkan ganti tanahnya.	selesai proses dan diteruskan ke MPW

Tabel 3.12 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Gunungkidul Tahun 2023

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	NIHIL				



Tabel 3.13 Jumlah Pengaduan MPD Kab. Kulonprogo Tahun 2023

No	Tanggal Permohonan Diterima	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
1	NIHIL				

Tabel 3.14 Hasil Keputusan Rapat MKN Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Panggilan	Persetujuan	Menolak	Bukan Kewenangan
1	Januari	1 Notaris	1 Notaris	-	-
2	Februari	2 Notaris	-	1 Notaris	1 Notaris
3	Maret	2 Notaris	1 Notaris	-	1 Notaris
4	April	-	-	-	-
5	Mei	4 Notaris	3 Notaris	-	1 Notaris
6	Juni	4 Notaris	2 Notaris	1 Notaris	1 Notaris
7	Juli	4 Notaris	4 Notaris	-	-
8	Agustus	7 Notaris	7 Notaris	-	-
9	September	7 Notaris	4 Notaris	2 Notaris	1 Notaris
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	1 Notaris	-	1 Notaris	-
12	Desember	-	-	-	-
Jumlah		31 Notaris	22 Notaris	5 Notaris	5 Notaris



Tabel 3.15 Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Pelayanan	Pengaduan	Diproses	Belum Diproses
1	Penyelesaian pengaduan Masyarakat terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta.	41	41	-
Jumlah		41	41	-

Tabel 3.16 Perhitungan Kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% $\left(\frac{41}{41}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{86\%}\right) \times 100\% = 116\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 41 pengaduan masyarakat yang masuk terkait pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2023, telah diselesaikan. Target penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap notaris sebesar 86%, sementara realiasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait Notaris pada tahun 2023 sudah mencapai 100%. Jadi persentase capaian kerja terkait penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 116%. Dengan demikian, kinerja penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.



Tabel 3.17 Perbandingan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86%	86%	86%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



3. CAPAIAN PROGRAM PENEKAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	81 Indeks	98 Indeks	118%	82 Indeks	96 Indeks	117%
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	100%	125%	90%	100%	111%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	111%	139%	90%	100%	111%
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	111%	139%	90%	100%	111%
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	97%	150%	70%	98%	141%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	106%	99%	100%	101%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	156%	195%	85%	100%	118%
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	100%	100%	17%	100%	100%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	41%	144%	31%	60%	193%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	153%	229%	72%	100%	139%
4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	144%	80%	100%	125%



		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%	93%	156%	80%	100%	125%
5	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	80,5%	161%	60%	79%	132%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	71,92%	120%	55%	82%	149%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	70,9%	236%	35%	82%	234%
6	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	100%	133%	80%	100%	125%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	214%	214%	100%	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%	90%	100%	111%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	100%	125%	90%	98%	109%
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%	85%	100%	118%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%	80%	100%	126%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	116%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%	80%	100%	126%
8	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%	85%	100%	118%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	143%	80%	100%	126%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%	85%	100%	118%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%	80%	100%	126%



9	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	-	-	-	80%	100%	125%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	-	-	-	94%	100%	106%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	-	-	-	97%	100%	100%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	-	-	80%	100%	125%
		Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	85%	100%	117%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	-	-	85%	100%	117%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS 9ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	-	-	80%	100%	127%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	-	-	-	27%	100%	375%



1) Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah

Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai Institusi penyelenggara pelayanan publik, peranan Institusi pemsarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak sasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasarakatan, dan Pengelolaan benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Institusi Pemasarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan bendabenda yang dinyatakan dirampas untuk negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Institusi Pemasarakatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas Pelayanan adalah tingkat layanan yang berkaitan dengan harapan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Hal ini berarti bahwa layanan tersebut berkualitas jika Institusi Pemasarakatan mampu menyediakan produk dan jasa (layanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pelanggan / pengguna. Seiring dengan semakin meningkatnya



pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan di bidang hukum, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik, maka institusi pelayanan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Perubahan yang sangat pesat telah terjadi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai kesenjangan, seperti kesenjangan teknis, kesenjangan administrasi, kesenjangan komunikasi dan kesenjangan persepsi. Sebagai upaya pemenuhan tuntutan masyarakat, Direktorat Jenderal Pemasarakatan harus mampu menyediakan fasilitas pelayanan. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan keharusan untuk dipertimbangkan serta dianalisis, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Sebagai upaya untuk menghadapi perubahan tersebut adalah dengan cara menerapkan kebijakan dan strategi yang tepat yang selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Untuk pengorganisasian kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraannya, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dibantu oleh Divisi Pemasarakatan. Divisi Pemasarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan;
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas di wilayah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai dalam mewujudkan tujuan Pemasarakatan yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk



negara berdasarkan putusan pengadilan

Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dan PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengisyaratkan akan pentingnya pelayanan yang maksimal dari berbagai aspek kepada masyarakat. Secara umum Kementerian Hukum dan HAM khususnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik agar masyarakat merasa sangat puas dengan pelayanan yang diberikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta terus berbenah untuk meningkatkan pelayanannya kepada publik, di antaranya menyediakan media informasi dan pengaduan yang representatif agar masyarakat memiliki akses yang mudah untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keluhan (pengaduan) terhadap pelayanan dan sikap/tingkah laku aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah:

- Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- Kejelasan pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);



- Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- Kesopanan dan keramahan pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramahserta saling menghargai dan menghormati;
- Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Untuk mengukur seberapa besar Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik dilakukan survei terhadap

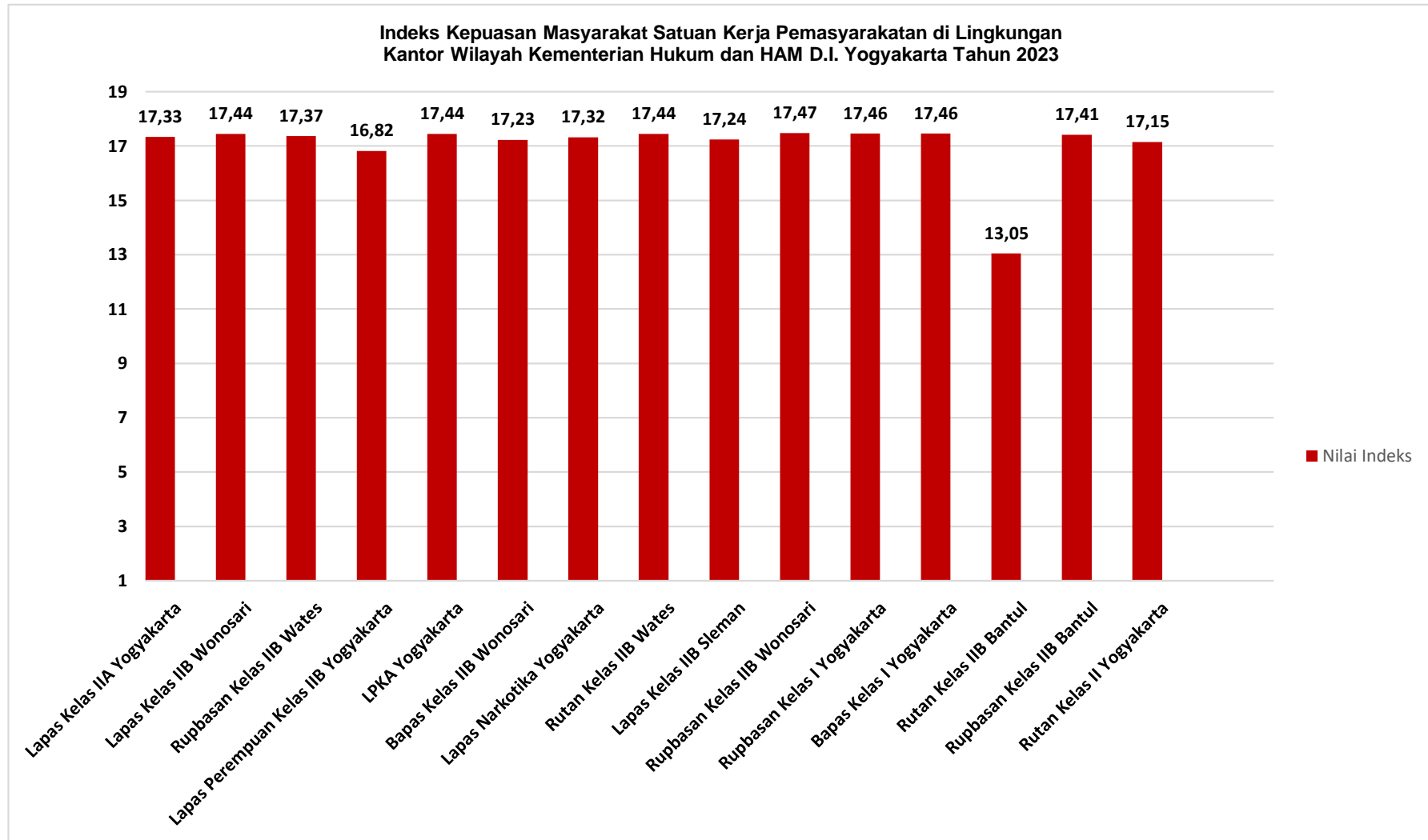


masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang telah diterima. Awal tahun 2016, Pusat Data dan Informasi Kementerian Hukum dan HAM RI telah membuat sarana pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui sebuah aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat berbasis web. Aplikasi ini dapat digunakan mulai dari tingkat Eselon I sampai kepada tingkat Unit Pelaksana Teknis. Guna meningkatkan mutu layanan dan kualitas kerja yang lebih baik di masa yang akan datang maka Kementerian Hukum dan HAM RI mengimplementasikan aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat yang diolah oleh Pusdatin Kementerian Hukum dan HAM RI. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dijelaskan sebagai berikut:

**Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja
Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023:**



Grafik 3.16 Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023





Tabel 3.19 Perhitungan Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsayarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemsayarakatan di wilayah	82 Indeks	96 Realisasi dari perhitungan seluruh indeks	117% Capaian Indeks penyelenggaraan pemsayarakatan diwilayah realisasi dibagi target dikali 100% 96/82x100%= 117%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2023 satuan kerja Pemasayarakatan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta memperoleh nilai dari rata-rata keseluruhan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 97 Indeks. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 82 Indeks, maka nilai capaian kinerja penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah D.I. Yogyakarta adalah 132 Indeks.

Indeks Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah adalah indikator untuk mengukur kinerja (outcome) Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara.

Nilai Indeks Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Pemasayarakatan, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasayarakatan, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan



Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

$$\text{IPPW} = \frac{A + B + C + D + E + F + G + H + I}{9} \times 100$$

Keterangan :

IPPW = Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

A = Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan

B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan,

C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

D = Indeks Pelayanan Tahanan

E = Indeks Pengelolaan Basan Baran

F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana

G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana

H = Indeks Pembinaan Khusus Anak

I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Perhitungan :

$$\text{IPPW} = \frac{0.97 + 0.77 + 0.95 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 1.00 + 0.96}{9} \times 100 = 96$$



Tabel 3.20 Perbandingan Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks	82 Indeks	82 Indeks

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar

a) Persentase Menurunnya Persentase Tahanan yang Overstaying

Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023 yaitu :

Tabel 3.21 Penghuni dan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan Overstaying	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	9	0	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	172	0	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	144	0	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	62	0	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	60	0	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	19	0	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	185	0	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	170	0	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	32	0	100%
TOTAL		853	0	100%



Tabel 3.22 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Overstaying di Wilayah D.I. Yogyakarta Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	Jumlah tahanan dikurangi jumlah overstaying dibagi jumlah tahanan dikali 100% $\left(\frac{853 - 0}{853}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/90\% \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang overstaying satuan kerja di Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 90%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 111%.

Tabel 3.23 Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	90%	90%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel 3.24 Tahanan yang Memperoleh Penyuluhan Hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan	Jumlah Tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	9	9
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	172	172
3	Lapas Kelas IIB Sleman	144	144



4	Lapas Kelas IIB Wonosari	62	62
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	60	60
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	19	19
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	185	185
8	Rutan Kelas IIB Bantul	170	170
9	Rutan Kelas IIB Wates	32	32
TOTAL		853	853

Tabel 3.25 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dibagi jumlah tahanan dikali 100% $\left(\frac{853}{853}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/90\% \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel diatas, jumlah Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar 853 Tahanan, sedangkan yang memperoleh penyuluhan hukum sebesar 853 Tahanan. Maka perhitungan persentase realisasi sebesar $= (853/853) \times 100\% = 100\%$, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 111%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 90%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 111%.



Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	90%	90%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Tabel 3.27 Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

No	Satuan Kerja	Jumlah Pemohon	Jumlah Tahanan yang memperoleh Bantuan Hukum	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	9	9	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	172	172	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	144	144	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	62	62	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	60	60	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	19	19	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	185	185	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	170	170	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	32	32	100%
TOTAL		853	853	100%



Tabel 3.28 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum dikali 100% $\left(\frac{853}{853}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/90\% \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum di Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 90%, maka capaian kinerja persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum adalah 100%, maka capaian kinerja penurunan persentase tahanan yang overstaying adalah 111%.

Tabel 3.29 Perbandingan Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	90%	90%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

3) Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian



Tabel 3.30 Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian tahun 2023

No.	Hasil Rekapitulasi Penilaian Pembinaan Kepribadian Narapidana						Jumlah Narapidana	%Narapidana yang memperoleh Skor Sangat Baik dan Baik
	Nama UPT	Sangat Baik (org)	Baik (org)	Cukup Baik (org)	Tidak Baik (org)	Sangat Tidak Baik (org)		
1.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	480	35	0	0	0	515	100%
2.	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	504	60	0	0	0	564	100%
3.	Lapas Kelas IIB Sleman	181	41	0	0	0	222	100%
4.	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	57	70	28	0	0	155	81,93%
5.	LPKA Kelas II Yogyakarta	10	3	0	0	0	13	100%
6.	Lapas Kelas IIB Wonosari	171	0	1	0	0	172	99,41%
7.	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	57	8	1	0	0	66	98,48%
8.	Rutan Kelas IIB Bantul	71	17	0	0	0	88	100%
9.	Rutan Kelas IIB Wates	37	0	0	0	0	37	100%

Rekapitulasi Persentase Narapidana Yang Memperoleh Predikat BAIK (Skor Sangat Baik dan Baik) Variable Pembinaan Kepribadian adalah =

98% (Sembilan Puluh Delapan)



Tabel 3.31 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Nilai Baik dengan Predikat Memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100% $\left(\frac{1802}{1802}\right) \times 100\% = 98\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $98\%/70\% \times 100\% = 140\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 98%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 70%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 141%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada Instrumen Penilaian Kepribadian telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.32 Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



b) Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

Tabel 3.33 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif Untuk Diusulkan Mendapat Remisi	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Remisi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	819	819	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	825	825	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	307	307	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	217	217	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	226	226	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	34	34	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	81	81	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	87	87	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	61	61	100%
TOTAL		2657	2657	100%



Tabel 3.34 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	Jumlah narapidana yang mendapatkan Remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapat remisi dikali 100% $\left(\frac{2657}{2657}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realiassi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/99\% \times 100\% = 101\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi narapidana yang mendapatkan Hak Remisi sebesar 100% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 99%. Dengan demikian, capaian kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 101%. Capaian ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.35 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	99%	99%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



c) Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi

Tabel 3.36 Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Narapidana yang Mendapatkan Integrasi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	184	184	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	258	258	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	130	130	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	141	141	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	86	86	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	18	18	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	115	115	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	133	133	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	54	54	100%
TOTAL		1119	1119	100%

Tabel 3.37 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	Jumlah narapidana yang mendapatkan Integrasi dibagi jumlah narapidana dikali 100% $\left(\frac{1119}{1119}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi capaian dikali 100% Capaian : $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$



Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi sebesar 100% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 85%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 118%. Capaian ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.38 Perbandingan persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	85%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

d) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Tabel 3.39 Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan	Jumlah Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	0	0	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	100%
TOTAL		0	0	100%



Tabel 3.40 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	Jumlah narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100% Wilayah DIY (NIHIL) 100%	100% Wilayah DIY tidak ada napi dengan resiko tinggi

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 100%. Di tahun 2023 UPT Pemasarakatan di D.I. Yogyakarta tidak terdapat Narapidana resiko tinggi. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 17%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.41 Perbandingan Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%	17%	17%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



e) Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Tabel 3.42 Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana	Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	99	554	18%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	80	576	14%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	80	277	29%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	727	179	406%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	73	187	39%
TOTAL		1059	1773	60%

Tabel 3.43 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana dikali 100% $\left(\frac{1059}{1773}\right) \times 100\% = 60\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi capaian dikali 100% Capaian : $60\%/31\% \times 100\% = 193\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 60%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 31%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 193%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.



Tabel 3.44 Perbandingan Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	31%	31%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, Lkjip, dan Perjanjian Kinerja.

f) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Tabel 3.45 Narapidana yang Bekerja dan Produktif

No	Satuan Kerja	Jumlah Narapidana yang Mendapat Program Asimilasi	Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	23	23	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	
6	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	0	0	
7	Rutan Kelas IIB Bantul	12	12	100%
8	Rutan Kelas IIB Wates	14	14	100%
9	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	
TOTAL		50	50	100%



Tabel 3.46 Perhitungan Kinerja Persentase Narapidana yang Bekerja dan Produktif

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	Jumlah narapidana yang mendapat program asimilasi dibagi jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dikali 100% $\left(\frac{50}{50}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi capaian dikali 100% • Capaian : • $100\%/72\% \times 100\% = 139\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 139%. Dengan demikian, kinerja persentase narapidana yang bekerja dan produktif di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.47 Perbandingan Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	72%	72%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



4) Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai Standar

a) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Tabel 3.48 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) dan Kualitasnya (Nilai)

No	Satuan Kerja	Jumlah Basandan Baran	Jumlah BasanBaran yang Dipelihara	Persentase
1	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	41	41	100%
2	Rupbasan Kelas II Bantul	32	32	100%
3	Rupbasan Kelas II Wonosari	18	18	100%
4	Rupbasan Kelas II Wates	4	4	100%
TOTAL		95	95	100%

Tabel 3.49 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) dibagi jumlah seluruh basan baran dikali 100% $\left(\frac{95}{95}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi capaian dikali 100% Capaian : $100\%/90\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) di Wilayah D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 100%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) adalah 125%. Dengan demikian, kinerja pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) di Wilayah D.I. Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan.



Tabel 3.50 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkeuatan hukum tetap

Tabel 3.51 Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

No	Satuan Kerja	Jumlah Benda Sitaan yang Telah Inkrah (Berkekuatan Hukum Tetap)	Jumlah Benda Sitaan yang Telah Dieksekusi	Persentase
1	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	79	79	100%
2	Rupbasan Kelas II Bantul	96	96	100%
3	Rupbasan Kelas II Wonosari	4	4	100%
4	Rupbasan Kelas II Wates	11	11	100%
TOTAL		190	190	100%

Tabel 3.52 Perhitungan Kinerja Penurunan Persentase Basan baran yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkeuatan hukum tetap	80%	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang Inkrah dibagi jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi dikali 100% $\left(\frac{190}{190}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi capaian dikali 100% Capaian : $100\%/90\% \times 100\% = 125\%$



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase basan dan baran yang telah Inkrah dan telah dieksekusi di Satuan Kerja Rupbasan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yaitu 100%, maka capaian kinerja persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah 125%. Dengan demikian, kinerja pengelolaan basan baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.53 Perbandingan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

5) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

a) Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

Tabel 3.54 Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

No	Satuan Kerja	Jumlah Klien Usia Produktif	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga	Persentase
1	Balai Masyarakat Kelas I Yogyakarta	3832	5240	73%
2	Balai Masyarakat Kelas II Wonosari	3094	3498	88%
TOTAL		6926	8738	79%



Tabel 3.55 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100% $\left(\frac{6929}{8738}\right) \times 100\% = 79\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $79\%/60\% \times 100\% = 132\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 79%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 132%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 132%. Dengan demikian, persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.56 Perbandingan Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	60%	60%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Dalam mewujudkan peningkatan pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah sesuai standar indikator kinerja yaitu Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara maka diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi



sumber daya manusia, terutama bagi pembimbing kemasyarakatan (PK) yang dapat dilakukan melalui pendidikan yang lebih tinggi, pelatihan, bimbingan teknis, diseminasi, serta kegiatan lain yang dapat mendukung dan menambah wawasan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan jumlah klien pemasyarakatan yang ditangani sehingga pembimbingan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai standar. Proses Peradilan Anak dilakukan setelah ada permintaan Litmas dari Kepolisian/Penyidik. Adapun setelah itu penyusunan litmas anak oleh Pembimbing Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Berikut tabel jumlah pendampingan anak selama 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta :

Tabel 3.57 Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

No	Satuan Kerja	Jumlah Pendampingan Anak	Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	Persentase
1	Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari	517	422	82%
TOTAL		517	422	82%

Tabel 3.58 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	Jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan Anak dikali 100% $\left(\frac{422}{517}\right) \times 100\% = 82\%$	<ul style="list-style-type: none"> Target dikurangi (realisasi dikurangi target) dibagi realisasi dikali 100% Capaian : $\left(\frac{55\% - (82\% - 55\%)}{82\%}\right) \times 100\% = 34\%$

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui persentase realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara sebesar 82% dimana target kinerja yang ditetapkan adalah 55%. Dengan demikian, capaian kinerja persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 149%. Dengan demikian, persentase



realisasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.59 Perbandingan Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	60%	60%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Fokus utama UU SPPA adalah restorative justice yaitu hukuman diberikan bukan untuk membalaskan dendam, melainkan untuk mengembalikan anak tersebut menjadi baik. Salah satu implementasi dari upaya ini ialah dengan pemberian diversi, yaitu penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar ruang lingkup pidana. Anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SPPA, salah satunya ialah hak untuk tetap memperoleh pendidikan. Kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2022 tetap memperhatikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal Pendidikan. Berikut data jumlah anak yang melanjutkan Pendidikan pada Balai Pemasarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta :



Tabel 3.60 Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Satuan Kerja	Jumlah klien anak	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	266	218	82%

Tabel 3.61 Perhitungan Kinerja Persentase Klien Anak yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100% $\left(\frac{218}{266}\right) \times 100\% = 82\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : $82\%/35\% \times 100\% = 234\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 adalah 82% . Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 35%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 234%. Dengan demikian, persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.62 Perbandingan Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	35%	35%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



6) Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

a) Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Tabel 3.63 Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

Satuan Kerja	Jumlah anak	Jumlah Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	49	49	100%

Tabel 3.64 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi jumlah klien anak dikali 100% $\left(\frac{49}{49}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 126%. Capaian tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.65 Perbandingan Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



b) Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

Tabel 3.66 Anak yang memperoleh hak integrasi

Satuan Kerja	Jumlah verifikasi usulan Integrasi anak	Jumlah Anak yang memperoleh hak integrasi	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	18	18	100%

Tabel 3.67 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	Jumlah anak yang mendapatkan program Reintegrasi Sosial dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan Reintegrasi Sosial dikali 100% $\left(\frac{18}{18}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/100\% \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak integrasi sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 100%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak integrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 100%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.68 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



c) Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

Tabel 3.69 Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

Satuan Kerja	Jumlah anak	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	49	49	100%

Tabel 3.70 Perhitungan Kinerja Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{49}{49}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/90\% \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar sebesar 100% dimana target realisasi padatahun 2023 adalah 90%. Maka capaian kinerja persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 111%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.71 Perbandingan Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%	90%	90%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



d) Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Tabel 3.72 Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Satuan Kerja	Jumlah anak	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	Persentase
LPKA Kelas II Yogyakarta	49	48	98%

Tabel 3.73 Perhitungan Kinerja Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{48}{49}\right) \times 100\% = 98\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $98\%/90\% \times 100\% = 109\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal sebesar 98% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 90%. Maka capaian kinerja persentase anak mengikuti pendidikan formal dan non formal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 109%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.74 Perbandingan Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	90%	90%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



7) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

a) Persentase pengaduan yang diselesaikan

Tabel 3.75 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	Jumlah Pengaduan Yang Diselesaikan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	2	2	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	-	-	-
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	-	-	-
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
8	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
9	Rutan Kelas IIB Wates	-	-	-
TOTAL		3	3	100%

Tabel 3.76 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$



Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 85%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 118%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.77 Perbandingan Persentase pengaduan yang diselesaikan

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%	85%	85%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase pencegahan gangguan kamtib

Tabel 3.78 Pencegahan gangguan kamtib

No	Kegiatan	Jumlah seluruh gangguan kamtib	Jumlah gangguan kamtib yang dapat di cegah	Persentase
1.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	12	12	100%
2.	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	7	7	100%
3.	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	7	7	100%
4.	Lapas Kelas IIB Sleman	6	6	100%
5.	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
6	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	10	10	100%
7	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-



8	Rutan Kelas IIB Wates	2	2	100%
9	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
10	Bapas Kelas I Yogyakarta	2	2	100%
11	Bapas Kelas II Wonosari	-	-	-
12	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	-	-	-
13	Rupbasan Kelas II Bantul	-	-	-
14	Rupbasan Kelas II Wates	-	-	-
15	Rupbasan Kelas II Wonosari	-	-	-
Total		49	49	100%

Tabel 3.79 Perhitungan Kinerja pencegahan gangguan kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib dikali 100% $\left(\frac{49}{49}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 126%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Tabel 3.80 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, Lkjip, dan Perjanjian Kinerja.

c) Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

Tabel 3.81 Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	11	11	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	7	7	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	6	6	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	6	6	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	8	8	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
9	Rutan Kelas IIB Wates	2	2	100%
TOTAL		43	43	100%



Tabel 3.82 Perhitungan Kinerja kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya dibagi Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib dikali 100% $\left(\frac{43}{43}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : • $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 85%. Maka capaian kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 116%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

Tabel 3.83 Perbandingan Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%	85%	85%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.84 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No	Kegiatan	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Persentase
1.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	12	12	100%
2.	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	7	7	100%
3.	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	7	7	100%
4.	Lapas Kelas IIB Sleman	6	6	100%
5.	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
6.	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	10	10	100%
7.	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
8.	Rutan Kelas IIB Wates	2	2	100%
9.	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
10.	Bapas Kelas I Yogyakarta	2	2	100%
11.	Bapas Kelas II Wonosari	-	-	-
12.	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	-	-	-
13.	Rupbasan Kelas II Bantul	-	-	-
14.	Rupbasan Kelas II Wates	-	-	-
15.	Rupbasan Kelas II Wonosari	-	-	-
Total		49	49	100%



Tabel 3.85 Perhitungan Kinerja Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dibagi Jumlah Gangguan Kamtib dikali 100% $\left(\frac{49}{49}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 126%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.86 Perbandingan Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



8) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

a) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Tabel 3.87 Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

No	Satuan Kerja	Jumlah Pengaduan yang Masuk	Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	2	2	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	-	-	-
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	-	-	-
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
8	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
9	Rutan Kelas IIB Wates	-	-	-
TOTAL		3	3	100%

Tabel 3.88 Perhitungan Kinerja Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Jumlah pengaduan yang masuk pada UPT Pas dibagi jumlah penyelesaian pengaduan di kali 100% $\left(\frac{3}{3}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$



Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 85%. Maka capaian kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standard di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 118%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.89 Perbandingan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	85%	85%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Tabel 3.90 Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

No	Kegiatan	Jumlah seluruh gangguan kamtib	Jumlah gangguan kamtib yang dapat di cegah	Persentase
1.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	12	12	100%
2.	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	7	7	100%
3.	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	7	7	100%
4.	Lapas Kelas IIB Sleman	6	6	100%
5.	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
6	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	10	10	100%



7	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
8	Rutan Kelas IIB Wates	2	2	100%
9	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
10	Bapas Kelas I Yogyakarta	2	2	100%
11	Bapas Kelas II Wonosari	-	-	-
12	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	-	-	-
13	Rupbasan Kelas II Bantul	-	-	-
14	Rupbasan Kelas II Wates	-	-	-
15	Rupbasan Kelas II Wonosari	-	-	-
Total		49	49	100%

Tabel 3.91 Perhitungan Kinerja Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib dikali 100% $\left(\frac{49}{49}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : 100%/80%\times100%= 125%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pelaksanaan pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 126%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



Tabel 3.92 Perbandingan Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pencegahan gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Tabel 3.93 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/AnakPelaku Gangguan Kamtib	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	11	11	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	7	7	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	6	6	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	6	6	100%
6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	8	8	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
9	Rutan Kelas IIB Wates	2	2	100%
TOTAL		43	43	100%



Tabel 3.94 Perhitungan Kinerja Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Mengulangi Pelanggarannya dibagi Jumlah Tahanan/Napi/Anak Pelaku Gangguan Kamtib dikali 100% $\left(\frac{43}{43}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 85%. Maka capaian kinerja persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 116%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

Tabel 3.95 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	85%	85%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



d) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tabel 3.96 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No	Kegiatan	Jumlah Gangguan Kamtib	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	Persentase
1.	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	12	12	100%
2.	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	7	7	100%
3.	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	7	7	100%
4.	Lapas Kelas IIB Sleman	6	6	100%
5.	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
6.	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	10	10	100%
7.	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
8.	Rutan Kelas IIB Wates	2	2	100%
9.	LPKA Kelas II Yogyakarta	3	3	100%
10.	Bapas Kelas I Yogyakarta	2	2	100%
11.	Bapas Kelas II Wonosari	-	-	-
12.	Rupbasan Kelas I Yogyakarta	-	-	-
13.	Rupbasan Kelas II Bantul	-	-	-
14.	Rupbasan Kelas II Wates	-	-	-
15.	Rupbasan Kelas II Wonosari	-	-	-
Total		49	49	100%



Tabel 3.97 Perhitungan Kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas dibagi Jumlah Gangguan Kamtib dikali 100% $\left(\frac{49}{49}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta adalah 126%. Capaian tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.98 Perbandingan Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



9) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah

a) Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Tabel 3.99 Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak	Jumlah yang mendapatkan layanan makanan	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	563	563	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	748	748	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	421	421	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	241	241	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	247	247	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	49	49	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	388	388	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	296	296	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	99	99	100%
TOTAL		3.052	3.052	100%



Tabel 3.100 Perhitungan Kinerja Persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana /Anak dibagi jumlah Tahanan /Narapidana /Anak dikali 100% $\left(\frac{3052}{3052}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar adalah 125%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

b) Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Tabel 3.101 Layanan Kesehatan (Preventif) bagi Tahanan /Narapidana/Anak Secara Berkualitas

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak	Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan preventif	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	563	563	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	748	748	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	421	421	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	241	241	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	247	247	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	49	49	100%



7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	388	388	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	296	296	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	99	99	100%
TOTAL		3.052	3.052	100%

Tabel 3.102 Perhitungan Kinerja Persentase layanan kesehatan (preventif) bagi Tahanan /Narapidana/Anak secara berkualitas

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	Jumlah Tahanan /Narapidana /Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak dikali 100% $\left(\frac{3052}{3052}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realiassi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/84\% \times 100\% = 106\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas bagi Tahanan /Narapidana/Anak sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 94%. Maka capaian kinerja persentase layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas adalah 106%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.



c) Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

Tabel 3.103 Layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan /Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi perempuan (Ibu Hamil dan Menyusui)	Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan maternal	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
3	Lapas Kelas IIB Sleman	-	--	-
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	-	-	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	-	-	-
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	-	-	-
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	-	-	-
8	Rutan Kelas IIB Bantul	-	-	-
9	Rutan Kelas IIB Wates	-	-	-
TOTAL		-	-	-



Tabel 3.104 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan /Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%. Wilayah DIY NIHIL 100%	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada tahanan dan narapidana Perempuan (ibu hamil menyusui) 100%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase layanan kesehatan maternal bagi Tahanan /Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 97%. Dikarenakan tidak ada tahanan/narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, namun UPT pada Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta telah menyediakan akses layanan Kesehatan maternal bagi narapidana Perempuan (Ibu Hamil dan menyusui) maka capaian kinerja persentase layanan kesehatan maternal bagi Tahanan /Narapidana perempuan adalah 100%.

d) Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Tabel 3.105 Layanan Penanganan Gangguan Mental Bagi Tahanan /Narapidana/Anak

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak yang mengalami gangguan mental	Jumlah yang mendapatkan penanganan gangguan mental	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	3	3	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	0	0	-
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%



4	Lapas Kelas IIB Wonosari	1	1	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	3	3	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	-
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	1	1	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	1	1	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	-
TOTAL		10	10	100%

Tabel 3.106 Perhitungan Kinerja Persentase Penanganan Gangguan Mental Bagi Tahanan /Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100% $\left(\frac{10}{10}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase Penanganan Gangguan Mental bagi Tahanan /Narapidana/Anak sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase Penanganan Gangguan Mental bagi Tahanan /Narapidana/Anak adalah 125%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.



e) Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Tabel 3.107 Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana Lansia sesuai standar

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi Lansia	Jumlah Tahanan/Napi Lansia yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	31	31	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	2	2	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	10	10	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	6	6	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	4	4	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	6	6	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	3	3	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	6	6	100%
TOTAL		68	68	100%

Tabel 3.108 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana Lansia sesuai dengan standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/ Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan Kesehatan dikali 100% $\left(\frac{68}{68}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$



Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase Layanan Kesehatan bagi Tahanan /Narapidana Lansia sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 85%. Maka capaian kinerja persentase Layanan Kesehatan bagi Tahanan /Narapidana Lansia adalah 117%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

f) Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Tabel 3.109 Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas)

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Disabilitas	Jumlah Tahanan/Napi/Anak Disabilitas yang mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai standar	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	6	6	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	2	2	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	1	1	100%
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	2	2	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	6	6	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	2	2	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	2	2	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	100%
TOTAL		21	21	100%



Tabel 3.110 Perhitungan Kinerja Persentase Layanan Kesehatan Bagi Tahanan /Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sesuai dengan standar

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan Kesehatan diakli 100% $\left(\frac{21}{21}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/85\% \times 100\% = 118\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase Layanan Kesehatan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Disabilitas sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 85%. Maka capaian kinerja persentase Layanan Kesehatan bagi Tahanan /Narapidana/Anak Disabilitas sesuai dengan standar adalah 118%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.

g) Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Tabel 3.111 penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

No	Satuan Kerja	Jumlah Tahanan/Napi/Anak dengan penyakit menular	Jumlah Tahanan/Napi/Anak dengan penyakit menular yang tertangani	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	3	3	100%
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	1	1	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	3	3	100%



4	Lapas Kelas IIB Wonosari	2	2	100%
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	5	5	100%
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	100%
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	2	2	100%
8	Rutan Kelas IIB Bantul	3	3	100%
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	100%
TOTAL		19	19	100%

Tabel 3.112 Perhitungan Kinerja Persentase Penanganan penyakit menular bagi Tahanan /Narapidana/ Anak (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS ditambah Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif dibagi 2 dikali 100% $\left(\frac{19}{19}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi dibagi target dikali 100% Capaian : $100\%/80\% \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 80%. Maka capaian kinerja persentase penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) adalah 127%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.



h) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Tabel 3.113 perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

No	Satuan Kerja	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi	Persentase
1	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	0	0	-
2	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	90	90	100%
3	Lapas Kelas IIB Sleman	0	0	-
4	Lapas Kelas IIB Wonosari	0	0	-
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	0	0	-
6	LPKA Kelas II Yogyakarta	0	0	-
7	Rutan Kelas IIA Yogyakarta	0	0	-
8	Rutan Kelas IIB Bantul	0	0	-
9	Rutan Kelas IIB Wates	0	0	-
TOTAL		90	90	100%



Tabel 3.114 Perhitungan Kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu /penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100% $\left(\frac{90}{90}\right) \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi dibagi target dikali 100% • Capaian : • $100\%/27\% \times 100\% = 370\%$

Berdasarkan tabel diatas, diketahui persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika peserta rehabilitasi sebesar 100% dimana target realisasi pada tahun 2023 adalah 27%. Maka capaian kinerja persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah 375%. Capaian kinerja tersebut melebihi jauh dari target yang telah ditentukan.



4. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.115 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25	3,88	119%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13	3,86	123%

Perjanjian Kinerja dan capaian kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022 yaitu:

Tabel 3.116 Capaian Kinerja Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,90	122%
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12	3,97	127%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,94	126%



1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

a) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

❖ Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah :

a. Target Capaian

Tabel 3.117 Target Capaian Indeks kepuasan masyarakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25

b. Berikut beberapa unsur layanan/variabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik;
- Persyaratan :Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- Prosedur/alur :Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
- Waktu penyelesaian :Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini;
- Tarif/biaya : Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
- Sarana prasarana : Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan;
- Respon :Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
- Konsultasi dan pengaduan : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.



c. Pengumpulan data dan pengolahan data hasil survei:

Pengumpulan data dilaksanakan dengan merekapitulasi hasil survei pada aplikasi <https://survei.balitbangham.go.id/> dari bulan januari sampai dengan bulan desember tahun 2023

❖ Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah :

a. Target Capaian :

Tabel 3.118 Target Capaian Indeks pengamanan Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah	3,13

b. Unsur-unsur :

Tabel 3.119 Rekapitulasi Indeks

No	Unsur	Bobot	Jumlah pertanyaan
1	Intelijen	20	2
2	Penyidikan	10	1
3	TAK	10	1
4	Pengawasan	20	4
5	Pengaduan	30	2
6	pencegahan	10	1

c. Pengumpulan dan pengolahan data :

Pengumpulan dan pengolahan data dilaksanakan dengan menggunakan metode survey berbasis aplikasi yang dilaksanakan direktorat jenderal imigrasi dengan nama <https://esurvey.imigrasi.go.id/> dengan pejabat struktural yang menjadi responden dalam survey ini.



❖ Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah :

1. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian bulan Januari s.d Desember tahun 2023 :

Tabel 3.120 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun 2023												
Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nilai	17.14	16.89	16.95	16.96	16.96	16.96	16.82	17.05	16.98	17.03	17.11	17.04
Nilai rata-rata	16.99											

2. Kategorisasi mutu pelayanan :

Tabel 3.121 Kategorisasi mutu pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 - 2,5996	4,37 – 11,37	D	TIDAK BAIK
2,60 - 3,064	11,38 – 13,40	C	KURANG BAIK
3,0644 - 3,532	13,41 – 15,44	B	BAIK
3,5324 - 4,00	15,45 - 17,50	A	SANGAT BAIK

3. Pengolahan dan Analisa data

- 1) Sesuai dengan hasil Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian bulan Januari s.d Desember tahun 2023 yang tertera pada tabel 3.117 bahwa nilai rata-rata nya adalah 16.99
- 2) Nilai rata-rata 16.99 Jika dilihat dalam tabel kategorisasi mutu pelayanan (tabel 2.2) maka nilai tersebut berada di interval konversi 15,45 - 17,50 sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.
- 3) Nilai rata-rata 16.99 Jika dilihat dalam tabel kategorisasi mutu pelayanan (tabel 2.2) maka nilai tersebut jika dikonversi ke nilai interval IKM adalah 3.88 yang mana nilai tersebut berada di interval 3,5324 - 4,00 sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik**.



❖ Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah :

1. Berdasarkan surat Sekretaris Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1-PW.01.02-012 tanggal 23 November 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Tahun 2023 diketahui bahwa hasil nilai IPK adalah 3,86;

2. Kategorisasi mutu pelayanan :

Tabel 3.122 Kategorisasi mutu pelayanan Indeks Pengamanan Keimigrasian

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu	Kinerja Unit
1,00 - 2,5996	1,25 – 3,24	D	TIDAK BAIK
2,60 - 3,064	3,25 – 3,8304	C	KURANG BAIK
3,0644 - 3,5323	3,8305 – 4,4154	B	BAIK
3,5324 - 4,00	4,4155 – 5,00	A	SANGAT BAIK

3. Pengolahan dan Analisa data :

- 1) Sesuai dengan hasil survey yang telah diselenggarakan Direktorat Jenderal Imigrasi bahwa diketahui skor hasil IPK adalah 3,86 ;
- 2) Skor 3,86 Jika dilihat dalam **tabel 2.3** maka nilai tersebut berada di interval konversi 3,5324 - 4,00 sehingga masuk dalam kategori kinerja **Sangat Baik** .



Simpulan :

1. Capaian indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebesar 3.88 telah tercapai dan bahkan melebihi target capaian IKM yang telah ditentukan yaitu 3.25;
2. Capaian Indeks pengamanan keimigrasian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebesar 3,86 telah tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan yaitu 3.13.

Saran :

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten dengan berpedoman dengan semangat pelayanan prima.
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesesuaian pelayanan mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
3. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pengamanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pengamanan secara konsisten dengan berpedoman dengan berpanduan SOP yang telah ditetapkan.
4. Perlu upaya peningkatan kualitas pengamanan, agar tingkat pelanggaran keimigrasian di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tidak terjadi peningkatan.



Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 :

Tabel 3.123 Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

No	Satuan Kerja	Nilai
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,88

Tabel 3.124 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Keimigrasian

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,88	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,88}{3,20}\right) \times 100\% = 121\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh nilai 3,88. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 3,20, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 121%. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.125 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20	3,20	3,20

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



b) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel 3.126 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

LAMPIRAN

Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Nomor : IMI.1-PW.01.02-012

Tanggal : 23 November 2023

NILAI INDEKS PENGAMANAN KEIMIGRASIAN SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2023

Catatan :

1. Detail nilai (per unsur) dapat dilihat melalui tautan : <https://bit.ly/CapaianIPK2023>;
2. Kolom **Ket** berisi catatan yang muncul disebabkan kurangnya responden/nilai. Agar dijelaskan dalam laporan LKjIP Tahun 2023 satuan kerja;

WILAYAH /SATUAN KERJA	IPK INTERNAL		IPK EKSTERNAL		NILAI IPK		KET
	Jml. Resp	INDEKS	Jml. Resp	INDEKS	Total Resp	INDEKS	
IPK KANWIL KEMENKUMHAM D.I YOGYAKARTA	25	3.86	19	3.79	44	3.83	
DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM D.I. YOGYAKARTA	9	3.91	8	3.8	17	3.86	
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	16	3.83	11	3.77	27	3.81	



Tabel 3.127 Perhitungan Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,86	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,86}{3,12}\right) \times 100\% = 124\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian memperoleh nilai 3,86. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 3,12, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 124%. Dengan demikian, Indeks Pengamanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.128 Perbandingan Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	3,12	3,12

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



3. CAPAIAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.129 Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	732 Layanan	10.606 Layanan	1449%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100%
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan	5 Laporan	100%

Perjanjian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.130 Capaian Kinerja Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	631 Layanan	9.747 Layanan	1545%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	11 Lokus	1100%
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	19 Lokus	950%



Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	100%
---------------------------------------	--	-----------	-----------	------

1) Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

a) Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

Jumlah Pemohonan Kekayaan Intelektual dari Januari sampai dengan Desember 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yaitu:





Tabel 3.131 Perhitungan Kinerja Pemohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	732 Layanan	10606 Layanan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{10606}{732}\right) \times 100\% = 1448\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pemohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah mencapai 10.606 pemohon dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2023 yaitu sebanyak 732 layanan. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 1448%. Dengan demikian, permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.132 Perbandingan Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	732 Layanan	732 Layanan	732 Layanan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



b) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI di Wilayah D.I. Yogyakarta sebanyak 10 lokus yakni:

Tabel 3.133 Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

No	Nama Kegiatan Diseminasi dan Promosi
1	Kegiatan Promosi dan Diseminasi Merek di Kabupaten Kulon Progo dengan tema; <i>"Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Melalui Program One Village One Brand"</i> , bertempat di Hotel Dafam Signature International Airport, Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2023.
2	Kegiatan Promosi dan Diseminasi Merek di Kabupaten Gunung Kidul dengan tema; <i>"Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Melalui Program One Village One Brand"</i> , bertempat di Hotel Santika, Gunungkidul, Yogyakarta pada tanggal 08 Februari 2023.
3	Kegiatan <i>Geographical Indication Drafting Camp</i> Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 bertempat di Hotel Griya Persada Yogyakarta, pada tanggal 12 – 14 Maret 2023.
4	Kegiatan Layanan Kekayaan Intelektual di Pusat Perbelanjaan, dengan tema; <i>"Membangun Kesadaran Bangga dan Cinta Merek Indonesia"</i> pada tanggal 10 – 14 April 2023, bertempat di Plaza Ambarrukmo Yogyakarta.
5	Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> (MIC) bagi UMKM di Kota Yogyakarta, dengan tema; <i>"Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Kota Yogyakarta"</i> , bertempat di Gedung Pusat Desain Industri Nasional, pada tanggal 15 Mei 2023.
6	Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> (MIC) bagi UMKM di Kabupaten Sleman, dengan tema; <i>"Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Kabupaten Sleman"</i> , bertempat di Bappeda Kabupaten Sleman, pada tanggal 19 Mei 2023.
7	Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> (MIC) bagi UMKM di Kabupaten Bantul, dengan tema <i>"Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Kabupaten Bantul"</i> , bertempat di Gedung Perpusda Kabupaten Bantul, pada tanggal 08 Juni 2023.
8	Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> (MIC) bagi UMKM di Kabupaten Gunungkidul, dengan tema <i>"Membangun Kesadaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM Kabupaten Gunungkidul"</i> , bertempat di Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul, pada tanggal 13 Juni 2023.
9	Kegiatan workshop kekayaan intelektual, dengan tema; <i>"Inventarisasi Kandidat Kawasan Karya Cipta Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023"</i> , bertempat di El Hotel Yogyakarta, pada tanggal 19 Juni 2023.
10	Kegiatan bimbingan teknis, dengan tema; <i>"Bimtek Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten di Perguruan Tinggi/Brida/Litbang di Daerah Istimewa Yogyakarta"</i> , bertempat di El Hotel Yogyakarta, pada tanggal 23 Juni 2023.



Tabel 3.134 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{1}{1}\right) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual mencapai 1 lokus dimana jumlah tersebut telah melebihi dari target tahun 2023 yaitu sebanyak 1 lokus. Jika dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%. Dengan demikian, pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.135 Perbandingan Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal

a) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Tabel 3.136 Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

No	Nama Kegiatan Diseminasi dan Promosi	Keterangan
1	Dugaan tindak pidana pelanggaran kekayaan intelektual Hak Cipta Buku (e-book) "LovRinz" pada bulan Januari 2023	Selesai



2	Dugaan tindak pidana pelanggaran merek Kedai Grafis, pada bulan Februari 2023	Proses
3	Konsultasi dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta buku tumbuh kembang anak, pada bulan Mei 2023	Selesai
4	Konsultasi dugaan tindak pidana pelanggaran merek komunitas motor AHPC PCX, pada bulan Juni 2023	Selesai
5	Konsultasi dugaan tindak pidana pelanggaran merek Sei Sapi Bone', pada bulan Agustus 2023	Selesai
6	Dugaan tindak pidana pelanggaran merek "Avoskin", pada bulan Oktober 2023	Proses

Tabel 3.137 Perhitungan Kinerja Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{100\%}\right) 100\% = 100\%$

Tabel 3.138 Perbandingan penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah

Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah terdapat 12 kegiatan dengan rincian waktu pelaksanaan sebagai berikut:



Tabel 3.139 Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM D.I. Yogyakarta

No	Lokasi	Tanggal
1	Transmart Carrefour Maguwoharjo	12 April 2023
2	Indogrosir	5 April 2023
3	Lotte Mart Jogja	18 April 2023
4	Ramai Mall Jogja	27 April 2023
5	Ambarrukmo Plaza Yogyakarta	12 Mei 2023
6	Sleman City Hall	19 Mei 2023
7	Jogja City Mall	26 Mei 2023
8	Galeria Mall Yogyakarta	9 Juni 2023
9	Lippo Plaza Jogja	16 Juni 2023
10	Progo	7 Juli 2023
11	Jogjatronik	11 Agustus 2023
12	Pakuwon Mall Jogja	25 Agustus 2023

Tabel 3.140 Perhitungan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	12 Lokus	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{2}{12}\right) \times 100\% = 600\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan Kantor Wilayah mencapai 12 kegiatan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu sebanyak 2 kegiatan, maka



capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 600%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.141 Perbandingan Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Tabel 3.142 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual

Nama Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual	Keterangan
Pemantauan Produk Indikasi Geografis terdaftar Salak Pondoh Sleman	29 September 2023
Pemantauan Produk Indikasi Geografis terdaftar Gula Kelapa Kulon Progo	27 September 2023
Pemantauan Produk Indikasi Geografis terdaftar Batik Nitik Bantul	9 Oktober 2023
Ambarrukmo Plaza Yogyakarta	12 Mei 2023
Galeria Mall Yogyakarta	9 Juni 2023



Tabel 3.143 Perhitungan Kinerja Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	5 Laporan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{5}{3}\right) \times 100\% = 166\%$

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pemantauan produk Kekayaan Intelektual di Wilayah telah dilakukan 1 (satu) kali dimana target yang telah ditetapkan adalah 3 dan menghasilkan 5 laporan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 166%. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan pemantauan produk Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.144 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



6. CAPAIAN PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.145 Capaian Kinerja Program Fasilitas Pembentukan Program Hukum Tahun 2022 dan 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	126,25%	158%	80%	117%	146,25%
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	27 Orang	108%	25 Orang	27 Orang	108%

Catatan : Target tahun 2023 harmonisasi/fasilitasi sesuai Propemperda: 400 Raperda/Raperkada, Realisasi: 468 Raperda/Raperkada

1) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

a) Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

Jumlah Rancangan Perda yang disusun dan jumlah rancangan Perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah, yaitu:

Tabel 3.146 Judul Rancangan Perda Kantor Wilayah

No	Judul Raperda
1	Raperda Provinsi DIY tentang Pemajuan dan Pembangunan Desa/Kalurahan dan Kelurahan
2	Raperda Provinsi DIY tentang Pengelolaan Khusus Hutan Yogyakarta
3	Raperda Provinsi DIY tentang Road Map RB Kalurahan Tahun 2022-2027
4	Raperda Provinsi DIY tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan



5	Raperda Provinsi DIY tentang Pengelolaan Taman Bumi
6	Raperda Provinsi DIY tentang Ketenagakerjaan
7	Raperda Provinsi DIY tentang Kepemudaan
8	Raperda Provinsi DIY tentang Perubahan Perda Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
9	Raperda Provinsi DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027
10	Raperda Provinsi DIY tentang Pendirian Perseroda Pengelolaan Aset DIY
11	Raperda Provinsi DIY tentang Pembinaan Keolahragaan Daerah
12	Raperda Provinsi DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
13	Raperda Provinsi DIY tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14	Raperda Provinsi DIY tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY
15	Raperda Provinsi DIY tentang Penanggulangan HIV/AIDS
16	Raperda Provinsi DIY tentang Pendanaan Pendidikan
17	Raperda Provinsi DIY tentang Ekonomi Hijau
18	Raperda Provinsi DIY tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B
19	Raperda Provinsi DIY tentang Penanggulangan Kemiskinan
20	Raperda Provinsi DIY tentang Pengembangan dan Pengelolaan Saluran Irigasi
21	Raperda Provinsi DIY tentang Pengelolaan Hutan di DIY Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker
22	Raperda Provinsi DIY tentang Pengarustamaan Gender
23	Raperda Provinsi DIY tentang Raperda Penyelenggaraan Pemerintah DIY Cerdas (Jogja Smart Province)
24	Raperda Provinsi DIY tentang Pelabuhan Perikanan Pantai
25	Raperda Provinsi DIY tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
26	Raperda Provinsi DIY tentang Penetapan Hari Jadi DIY
27	Raperda Provinsi DIY tentang Pengelolaan Taman Bumi, Cagar Biosfer, dan Warisan Budaya
28	Raperda Provinsi DIY tentang Perubahan Kedua Perda DIY Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
29	Raperda Kabupaten Sleman tentang Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tirta Sembada



30	Raperda Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pengisinan dan Pemberhentian Perangkat Kalurahan
31	Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan Perda Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan
32	Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan Perda 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
33	Raperda Kabupaten Sleman tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Nonformal lainnya
34	Raperda Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
35	Raperda Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
36	Raperda Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
37	Raperda Kabupaten Sleman tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
38	Raperda Kabupaten Sleman tentang Pendidikan Karakter
39	Raperda Kabupaten Sleman tentang Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
40	Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
41	Raperda Kabupaten Sleman tentang Pamong Kalurahan
42	Raperda Kabupaten Sleman tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa
43	Raperda Kabupaten Sleman tentang Penyelenggaraan Metrologi
44	Raperda Kabupaten Sleman tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata
45	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
46	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana Saranan Utilitas Perumahan
47	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi dan Fiber Optik
48	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
49	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggraan Perumahan
50	Raperda Kabupaten Kulon Progo tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
51	Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah
52	Raperda Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
53	Raperda Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kab Bantul terhadap Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



54	Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
55	Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
56	Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Desa
57	Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
58	Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa
59	Raperda Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Perda Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan
60	Raperda Kabupaten Bantul tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Presekusor Narkotika
61	Raperda Kabupaten Bantul tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
62	Raperda Kabupaten Bantul tentang Ketenagakerjaan
63	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2043
64	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
65	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
66	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Pencegahan HIV/AIDS
67	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
68	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
69	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Jasa Konstruksi
70	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penanaman Modal
71	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Lurah
72	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kebudayaan
73	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Ekonomi Kreatif
74	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
75	Raperda Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kebudayaan
76	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal BUMD



77	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
78	Raperda Kota Yogyakarta tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
79	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
80	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengganti Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
81	Raperda Kota Yogyakarta tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan
82	Raperda Kota Yogyakarta tentang Raperda Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
83	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyertaan Modal Tirtamarta
84	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia
85	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan
86	Pengarusutamaan Gender
87	Raperda Kota Yogyakarta tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
88	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta
89	Raperda Kota Yogyakarta tentang Koperasi dan UKM
90	Raperda Kota Yogyakarta tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
91	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
92	Raperda Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
93	Raperda Kota Yogyakarta tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah
94	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
95	Raperda Kota Yogyakarta tentang Perseroda BPR Bank Jogja
96	Raperda Kota Yogyakarta tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
97	Raperda Kota Yogyakarta tentang Layanan Kesehatan

Adapun target yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebanyak 19 (sembilan belas) rancangan Perda dalam setahun.



Tabel 3.147 Perhitungan Kinerja Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Jumlah rancangan Perda yang difasilitasi dibagi jumlah target Raperda Ditjen PP dikali 100% $\left(\frac{97}{19}\right) \times 100\% = 510\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{510\%}{80\%}\right) \times 100\% = 637,5\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada tahun 2023 adalah sebesar 510%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 yakni sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 637,5%. Dengan demikian, persentase realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah sesuai dengan standar.

Tabel 3.148 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



2) Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

a) Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sebanyak 27 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 16 orang Perancang Pertama dan 11 orang Perancang muda.

Tabel 3.149 Perhitungan Kinerja Jumlah Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	27 Orang	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{27}{25}\right) \times 100\% = 108\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 27 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang mendapatkan pembinaan. Hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 25 orang. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 108%.

Tabel 3.150 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang	25 Orang	25 Orang

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



7. CAPAIAN PROGRAM PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

Perjanjian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.151 Capaian Kinerja Program Pemajuan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 dan 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	200%	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	150%
	Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	167%	3 Instansi Pemerintah	5 Instansi Pemerintah	167%
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100%	1 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	900%
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	200%	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	200%



1) Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

a) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah kepada Kantor Sekretariat Presiden (KSP) melalui aplikasi <https://serambi.ksp.go.id> yang akunnya dipegang BAPPEDA masing-masing. Untuk memaksimalkan pelaporan Aksi HAM, maka diperlukan kegiatan pemantauan Pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04, B08 dan B12 di Tahun 2023 dengan maksud menguatkan mekanisme dan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis.

Capaian Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Aksi HAM adalah 6 instansi yaitu:

Tabel 3.152 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM

No	Instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota
1	Pemerintah Daerah DIY
2	Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo



Tabel 3.153 Perhitungan Kinerja Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{6}{4}\right) \times 100\% = 150\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 6 instansi pemerintah di Wilayah D.I. Yogyakarta yang melaksanakan program Aksi HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 4 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 150%.

Tabel 3.154 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Jumlah kab/kota peduli HAM

Terdapat 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah secara aktif ikut serta mengirimkan data/ dokumen penilaian Kriteria Kabupaten/ Kota Peduli HAM Tahun 2023, dan terhadap semua data/ dokumen tersebut telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli HAM diantaranya : 1. Penilaian terhadap hasil verifikasi; 2. Peninjauan lapangan berdasarkan hasil verifikasi; Hasil penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM dari 5 (lima) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta diserahkan kepada masing-masing



Kabupaten/ Kota pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke 74 dengan tema “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang; Advancing Human Rights for Everyone” sekaligus pemberian apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang meraih Predikat Kabupaten/ Kota Peduli HAM oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diantaranya :

Tabel 3.155 kab/kota peduli HAM

No	Kabupaten/kota	Nilai	Kriteria
1	Kota Yogyakarta	94,8	Peduli HAM
2	Kabupaten Sleman	91,55	Peduli HAM
3	Kabupaten Bantul	88,3	Peduli HAM
4	Kabupaten Kulon Progo	90,45	Peduli HAM
5	Kabupaten Gunungkidul	84,6	Peduli HAM

Tabel 3.156 Perhitungan Kinerja Jumlah kab/kota peduli HAM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah kab/kota peduli HAM	4 Instansi Pemerintah	6 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{6}{4}\right) \times 100\% = 150\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 instansi pemerintah di Wilayah D.I. Yogyakarta Jumlah kab/kota peduli HAM. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 3 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 167%.



Tabel 3.157 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah kab/kota peduli HAM	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

c) Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Capaian di Tahun 2023 ada 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Tahun 2023, diantaranya :

Tabel 3.158 Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

No	Satuan Kerja
1	Lembaga Masyarakat Kelas IIB Sleman
2	Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIB Yogyakarta
3	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
4	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
6	Lembaga Masyarakat Kelas IIA Yogyakarta
7	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wates
8	Rumah Tahanan Kelas IIB Bantul
9	Lembaga Masyarakat Kelas IIB Wonosari



Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis ham kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Hak Asasi Manusia berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan latar belakang permasalahan yaitu masih kurangnya fasilitas/ sarana prasarana dan kompetensi pegawai dalam pemenuhan pelayanan publik.



Tabel 3.159 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Melalui Pelayanan Publik Berbasis HAM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	9 Instansi Pemerintah	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{9}{1}\right) \times 100\% = 900\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 9 instansi pemerintah di Wilayah D.I. Yogyakarta yang mendapatkan predikat sebagai Kantor Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 1 instansi pemerintah. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 900%.

Tabel 3.160 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



2) Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

a) Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengusulkan 3 (tiga) Rekomendasi rancangan produk hukum daerah dari perspektif Hak Asasi Manusia “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045”.

Tabel 3.161 Perhitungan Capaian Kinerja Tersedianya rekomendasi pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	6 Rekomendasi	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{6}{3}\right) \times 100\% = 200\%$

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan diatas, terlihat bahwa indikator kinerja terealisasi 6 rekomendasi, dengan melihat perjanjian kinerja ditetapkan sebanyak 3 rekomendasi. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 200%.

Tabel 3.162 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



8. CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBENTUKAN REGULASI DAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.163 Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	272,09%	331,81%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	518,18%	647,72%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	95,09	123,89%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	140,81%	201,15%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	600%	3000%

Capaian kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.164 Capaian Kinerja Program Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%



2	wilayah				
	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	98,97%	122%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	82,36%	103%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	95,62%	125%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100%	143%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	100%	500%

1) Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah

a) Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah diantaranya yaitu :

1. Rekomendasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Pada tahun 2023 dilaksanakan analisis dan evaluasi atas produk hukum daerah terkait penyelenggaraan pariwisata di wilayah DIY
2. Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah melalui kegiatan Fasilitasi penyusunan naskah akademik, Fasilitasi penyusunan Perencanaan legislasi daerah, Peningkatan Pemahaman Penyusunan Prolegda dan naskah akademik.



Tabel 3.165 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{2}{2}\right) \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 2 kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta. Hal ini telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 100%.

Tabel 3.166 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

2) Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

a) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2023 untuk kegiatan bantuan hukum litigasi setelah Addendum adalah sebesar Rp.1.715.000.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.704.000.000 atau 99,35% dari total anggaran;



- Kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 468 permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.167 Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Penyidikan/ Gugatan (Orang)	Persidangan (Orang)	Penyidikan/ Gugatan dan Persidangan (Orang)	Banding (Orang)	Kasasi (Orang)	Peninjauan Kembali (Orang)
1	YLKBH Handayani	0	25	1	0	0	0
2	YLBH APIK	1	9	7	0	0	0
3	LK3 Sekar Melati	1	11	1	0	0	0
4	YLBH SIKAP	1	19	7	0	0	0
5	RBH Yayasan AFTA	3	24	3	0	0	0
6	LBH Al Kautsar	17	5	12	0	0	0
7	LBH Sembada	11	12	7	0	0	0
8	YPBH Nyi Ageng Serang	4	18	2	0	0	0
9	LBH Harapan	15	4	6	0	0	0
10	LBH Senopati	7	8	2	0	0	0
11	YLPA D.I Yogyakarta	10	5	4	0	0	0
12	LKBH FH Universitas Islam Indonesia	2	5	12	0	0	0
13	LBH Dharma Yudha	14	9	4	0	0	0
14	PKBH FH Universitas Ahmad Dahlan	4	0	17	0	0	0



15	LBH Sekawan	4	7	14	0	0	0
16	YLBHI LBH Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
17	PKBH FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	0	17	0	0	0	0
18	LBH Tentrem	15	8	11	0	0	0
19	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	0	8	0	0	0	0
20	LKBH FH Universitas Janabadra	9	3	6	0	0	0
21	YPBH Peradi Bantul	1	4	6	0	0	0
22	PBHI Wilayah Yogyakarta	10	4	11	0	0	0
JUMLAH		129	206	133	0	0	0

Tabel 3.168 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum litigasi dikali 100% $\left(\frac{468}{172}\right) \times 100\% = 272,09\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{272,09\%}{82\%}\right) 100\% = 331,81\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 272,09% dari target. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 82%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 331,81%. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah memenuhi target yang ditentukan.



Tabel 3.169 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	81%	81%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

b) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2023 untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi setelah Addendum adalah sebesar Rp.309.260.000 dengan serapan anggaran sebesar Rp.309.260.000 atau 100% dari total anggaran;
- Kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 114 permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.170 Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

No	Nama Lembaga Bantuan Hukum	Negosiasi (Orang)	Mediasi (Orang)	Drafting Dokumen (Orang)	Pendampingan Di Luar Pengadilan (Orang)	Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	Penelitian Hukum (Kegiatan)	Investigasi Perkara (Kegiatan)	Konsultasi Hukum (Orang)	Penyuluh Hukum (Kegiatan)
1	YLBH APIK									1
2	LK3 Sekar Melati					2				2



3	RBH Yayasan AFTA			6		1			2
4	LBH Sembada								3
5	YPBH Nyi Ageng Serang								3
6	LBH Harapan					2		2	2
7	LBH Senopati								3
8	YLPA D.I.Yogyakarta								2
9	LBH Dharma Yudha								3
10	LBH Sekawan					2		2	5
11	LBH Tentrem								12
12	YLKBH Handayani					7			5
13	LBH Al-Kautsar				1	3		1	7
14	LKBH Fakultas Hukum UII					1	1		2
15	PKBH Fakultas Hukum UAD								6
16	YLBHI LBH Yogyakarta								3
17	PKBH Fakultas Hukum UMY					1		1	3
18	LSBH Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga								
19	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra								3
20	YPBH Peradi Bantul					2			2
21	PBHI Wilayah Yogyakarta				5				2
22	YLBH SIKAP								3
JUMLAH				6	6	21	1	6	74



Tabel 3.171 Perhitungan Kinerja Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani dibagi jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi dikali 100% $\left(\frac{114}{22}\right) \times 100\% = 518,18\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{518,18\%}{80\%}\right) 100\% = 647,72\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebesar 518,18%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 647,72% dari target. Dengan demikian, persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diLingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah memenuhi target yang ditentukan.

Tabel 3.172 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



c) Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Agar terselenggaranya kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum T.A 2023 dengan baik dan optimal sesuai keluaran atau output yang diharapkan maka penyelenggaraan bantuan hukum litigasi dan non litigasi di wilayah harus diawasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Adapun tugas Panitia Pengawas Daerah yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :

1. melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
2. membuat laporan secara berkala kepada Menteri melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian; dan
3. mengusulkan sanksi kepada Menteri atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum melalui unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Kementerian;
4. Panitia Pemantauan dan Evaluasi oleh Pengawas Daerah yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi, di Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan melalui wawancara dengan penerima bantuan hukum. Adapun data survey yang dilakukan oleh Panitia Pemantau mengenai Kepuasan Penerima Bantuan Hukum terhadap Layanan Bantuan Hukum sebagai berikut :



Tabel 3.173 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	95,09	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{95,09}{76,75}\right) \times 100\% = 123,89\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai indeks kepuasan layanan bantuan hukum di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta telah melebihi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 95,09 sedangkan target 76,75. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 123,89%. Hal ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 3.174 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	76,61%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

d) Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan budaya hukum Masyarakat Indonesia. Dalam rangka pembentukan desa/kelurahan sadar hukum perlu dilakukan rangkaian kegiatan berupa pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum sebagai salah satu syarat pengukuhan suatu desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok kadarkum yang hingga dapat dilakukan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar



hukum sehingga dapat terlaksana penyebaran informasi hukum kepada Masyarakat dan dapat terwujud Masyarakat yang cerdas hukum dan berbudaya hukum.

Tabel 3.175 Perhitungan Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	$\left(\frac{69}{49}\right) \times 100\% = 140,81\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{140,81\%}{70\%}\right) 100\% = 201,15\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah di Kantor Wilayah Kemenkumham D.I. Yogyakarta telah memenuhi target yang ditetapkan dimana realisasi sebesar 140,81% sedangkan target 70%. Dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja pada indikator tersebut sebesar 210,15%. Hal ini telah memenuhi dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.176 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKJIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.

e) Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan



Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH. Adapun anggota JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:

Tabel 3.177 Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN

No	Anggota JDIH
1	Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
2	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
4	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
5	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul
6	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
7	Bagian Hukum DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Sleman
9	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Bantul
10	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Kulon Progo
11	Bagian Hukum DPRD Kabupaten Gunungkidul
12	Bagian Hukum DPRD Kota Yogyakarta



Tabel 3.178 Perhitungan Kinerja Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	$\left(\frac{12}{2}\right) \times 100\% = 600\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{600}{20}\right) \times 100\% = 3000\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah D.I. Yogyakarta adalah sebanyak 12 anggota dari total 12 anggota sehingga realisasi sejumlah 600% dari target. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023 sebesar 20%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 3000%. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah D.I. Yogyakarta tahun 2023 telah memenuhi dengan target yang ditentukan.

Tabel 3.179 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	20%	20%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



4. CAPAIAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN ANGGARAN 2023

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023 yaitu :

Tabel 3.180 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	100%	125%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	3 Buku	300%

Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.181 Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	100%	143%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	3 Buku	300%

1) Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

a) Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

Jumlah kajian di Wilayah terdapat 1 (satu) kajian yaitu Implementasi Bantuan Hukum di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dan jumlah hasil kajian untuk bahan penelitian dan pengembangan



hukum dan ham terdapat 1 (satu) hasil kajian, kajian dan hasil kajian berupa rekomendasi kebijakan dan sudah disampaikan oleh Balitbang Hukum dan HAM.

Tabel 3.182 Perhitungan Kinerja Persentase Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dibagi Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100% $\left(\frac{1}{1}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100}{80}\right) \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 1 rekomendasi yang dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dan pengembangan HAM dari total 1 rekomendasi yang dihasilkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta. Dengan demikian, realisasi pada indikator tersebut adalah 80%. Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2023, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%.

Tabel 3.183 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	80%	80%

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



b) Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

1. Kegiatan Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Diskusi Daring Opini Kebijakan “Analisis Isu Kebijakan Tentang Pekerja Anak di Sektor Pariwisata” melalui diskusi daring sehingga dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan sebanyak 1 kali di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2023.
2. Kegiatan Analisis Kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah Tahun 2023 dilaksanakan setiap triwulan dalam 1 tahun dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Judul Tinjauan Yuridis Pengawasan Keimigrasian pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Yogyakarta Internasional Airpot dalam Upaya Menjunjung Tinggi Nilai HAM;
 - b. Triwulan II pada tanggal 16 Juni 2023 dengan Judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Menuntaskan Permasalahan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Sudut Perspektif HAM;
 - c. Triwulan III pada tanggal 18 September 2023 dengan Judul Upaya Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;
 - d. Triwulan IV pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Judul Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Untuk Masyarakat Terhadap Perilaku Tawuran.



Tabel 3.184 Perhitungan Kinerja Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	5 Buku	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{5}{1}\right) \times 100\% = 500\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 5 hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan dari target 1 buku. Maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 500%.

Tabel 3.185 Perbandingan Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

NO	SASARAN	2023		
		RENSTRA	LKjIP	PERJANJIAN KINERJA
1	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Berikut perbandingan indikator kinerja kegiatan pada Renstra, LkjIP, dan Perjanjian Kinerja.



B. REALISASI ANGGARAN

Perbandingan realisasi anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.186 Perbandingan realisasi anggaran

PROGAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
TAHUN 2023			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	25,790,951,000	25,679,415,058	99.57%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2,429,950,000	2,427,130,422	99.88%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	2,272,303,000	2,269,760,900	99.89%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	320,000,000	320,000,000	100%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	239,895,000	239,868,932	99.99%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,562,781,000	2,551,762,991	99.57%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	261,246,000	261,242,256	100%
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	869,208,000	869,089,187	99,99%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,900,285,000	1,900,256,660	100%
Tahun 2022			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	22,295,771,000	22,254,402,683	99,81%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	2,113,000,000	2,111,772,473	99,94%



Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,367,171,000	1,366,180.043	99,93%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240,000,000	240,000,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	229,395,000	229,357,710	99,98%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1,794,050,000	1,787,651,083	99,64%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	216,853,000	216,741,033	99,95%
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1,008,050,000	1,007,861,346	99,98%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,335,009,000	1,334,956,853	100,00%
Tahun 2021			
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	22,780,433,000	22,721,488,588	99,74%
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	1,971,497,000	1,971,053,500	99,98%
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	1,225,915,000	1,224,990,910	99,92%
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	240,000,000	240,000,000	100,00%
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	238,395,000	238,395,000	100,00%
Program Pembentukan Regulasi serta Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,701,594,000	2,667,497,200	98,74%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	200,687,000	200,685,947	100,00%
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1,241,726,000	1,239,365,329	99,81%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	914,225,000	908,517,956	99,92%



C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id> Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu :

- a) Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- b) Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- c) Efisiensi, bobot 18,2%
- d) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%

Timeline pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut:

- a) Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya;
- b) Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan
- c) Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.



NILAI KINERJA PADA APLIKASI SMART TAHUN 2023 (PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tabel 3.187 Nilai SMART Kantor Wilayah

NO	NAMA SATKER	CAPAIAN NILAI KINERJA					
		Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
KANWIL DIY							
1	DIVISI ADMINISTRASI	98,84	98,1	99,84	100	18,67	96,88
2	DIVISI YANKUM - AHU	92,05	99,88	99,99	100	8,9	72,24
3	DIVISI PAS	96,91	99,99	100	100	15,68	89,19
4	DIVISI IMIGRASI	89,01	100	100	100	4,63	61,56
5	DIVISI YANKUM - KI	86,63	99,89	99,94	100	1,32	53,31
6	DIVISI YANKUM - PP	85,7	100	100	100	0	50
7	DIVISI YANKUM - HAM	85,71	99,99	100	100	0,01	50,03
8	DIVISI YANKUM - BPHN	86,56	99,57	99,86	100	1,29	53,23
9	DIVISI YANKUM - BALITBANG	100	100	100	100	20	100
LAPAS							
1	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	85,69	99,87	99,47	100	0,13	60,38
2	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	86,50	98,26	98,47	100	1,74	54,36



3	LAPAS KELAS IIB WONOSARI	98,35	98,13	96,96	100	18,97	97,42
4	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	85,87	99,83	99,65	100	0,27	50,33
5	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	85,94	99,40	99,50	100	0,51	51,22
6	LPKA KELAS IIA YOGYAKARTA	85,88	99,02	99,74	100	0,38	50,94
RUTAN							
1	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	85,60	99,96	99,33	100	0,04	50,09
2	RUTAN KELAS IIB BANTUL	85,53	99,9	98,71	100	0,1	50,26
3	RUTAN KELAS IIB WATES	99,70	98,97	98,91	100	20	100
RUPBASAN							
1	RUPBASAN KELAS I YOGYAKARTA	85,70	99,99	99,95	100	0,01	50,03
2	RUPBASAN KELAS II BANTUL	85,70	99,98	99,96	100	0,02	50,04
3	RUPBASAN KELAS II WONOSARI	85,84	99,73	99,84	100	0,27	50,67
4	RUPBASAN KELAS II WATES	86,16	99,82	99,98	100	0,86	51,69
BAPAS							
1	BAPAS KELAS I YOGYAKARTA	85,75	98,89	99,89	100	0,11	50,28
2	BAPAS KELAS II WONOSARI	86,03	99,44	99,92	100	0,56	51,4
IMIGRASI							
1	KANIM KELAS I TPI YOGYAKARTA	87,68	98,98	99,46	100	3,05	57,62



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

- a) Revisi DIPA, bobot 10%;
- b) Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- c) Data Kontrak, bobot 10%;
- d) Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- e) Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- f) Dispensasi SPM, bobot 5%;
- g) Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- h) Capaian *Output*, bobot 25%.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap



perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (10%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Penyerapan Anggaran (bobot 20%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).



Pengukuran IKPA dijabarkan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA

Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap) dengan target 1x per triwulan. Revisi DIPA memiliki bobot 10%.

2. Halaman III DIPA

Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam penghitungan rata-rata gap tidak saling



meniadakan. Perhitungan Deviasi s.d. bulan Desember tahun berjalan. Halaman III DIPA memiliki bobot 10%.

3. Pengelolaan UP dan TUP

Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data. Pengelolaan UP memiliki bobot 10%.

4. Data Kontrak

Dihitung berdasarkan rasio data kontrak (diatas Rp 200 Juta) yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN. Data Kontrak memiliki bobot 10%.

5. Penyelesaian Tagihan

Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan atas kontrak diatas Rp 200 Juta yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang disampaikan ke KPPN. Penyelesaian Tagihan memiliki bobot 10%.

6. Penyerapan Anggaran

Dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagu DIPA efektif (dikurangi blokir). Target penyerapan anggaran KL untuk Triwulan III adalah Belanja Pegawai 75%, Belanja Barang 70%, dan Belanja Modal 70%. K/L dengan tingkat realisasi di atas target per triwulan diberikan nilai maksimal. Penyerapan Anggaran memiliki bobot 20%.

7. Dispensasi Penyampaian SPM

Dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran. Dispensasi Penyampaian SPM memiliki bobot 5%.

8. Capaian Output

Capaian Output merupakan jumlah output yang terkonfirmasi terhadap jumlah output yang dikelola oleh Satker atau K/L. Capaian Output memiliki bobot 25%.



Capaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta bulan Desember 2023 Data update tanggal 5 Januari 2024 adalah :

Tabel 3.188 Capaian nilai IKPA

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kelaitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	
1	409180	KANWIL (AHU)	Nilai	100	92,87	99,87	100	100	0	100	100	99.18
2	409181	KANWIL (SETJEN)	Nilai	100	100	99,33	92,5	100	97,36	80	100	97,85
3	409182	KANWIL (DITJEN PAS)	Nilai	100	100	100	0	0	99.53	100	100	99.94
4	409183	KANWIL (DITJEN IM)	Nilai	100	81,05	100	0	0	0	100	100	97,29
5	409184	KANWIL (KI)	Nilai	100	93,73	100	100	100	0	100	100	99,3
6	409185	KANWIL (DITJEN PP)	Nilai	100	100	100	0	0	99.63	100	100	99.95
7	409186	KANWIL (DITJEN HAM)	Nilai	100	100	100	0	0	98.61	100	100	99.83
8	409187	KANWIL (BPHN)	Nilai	100	100	100	0	0	99.45	100	100	99.93
9	409188	KANWIL (BALITBANG HAM)	Nilai	100	100	100	0	0	99,09	100	100	99.89
10	109111	RUTAN BANTUL	Nilai	100	93,11	98,18	100	100	96,6	100	100	98,61
11	653438	RUPBASAN BANTUL	Nilai	100	100	100	0	0	100	100	100	100
12	404611	RUTAN WATES	Nilai	100	100	100	100	100	98,2	100	100	99,82



13	652433	RUPBASAN WATES	Nilai	100	100	100	0	0	99,91	100	100	99,99
14	497727	LAPAS NARKOTIKA	Nilai	100	94,81	100	100	100	97,61	100	100	99,24
15	407995	KANTOR IMIGRASI	Nilai	100	67,24	93,3	91,15	100	95,66	80	100	93,07
16	652852	LAPAS SLEMAN	Nilai	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	632590	RUPBASAN YOGYAKARTA	Nilai	100	100	99,88	100	100	99,27	100	100	99,9
18	404585	BAPAS YOGYAKARTA	Nilai	100	94,02	100	95,71	100	100	100	100	98,97
19	418340	LPP KELAS IIB YOGYAKARTA	Nilai	100	87,97	100	100	100	93,62	100	100	98,16
20	404591	LAPAS YOGYAKARTA	Nilai	100	87,55	100	100	100	99,84	100	100	98,74
21	109636	RUTAN YOGYAKARTA	Nilai	100	100	100	100	100	98,15	100	100	99,82
22	653133	BAPAS WONOSARI	Nilai	100	100	100	100	100	99,74	100	100	99,97
23	404630	LAPAS WONOSARI	Nilai	100	90,96	99,87	100	100	99,64	100	100	99,03
24	653442	RUPBASAN WONOSARI	Nilai	100	100	100	0	100	92,42	100	100	99,16
25	419140	LPKA YOGYAKARTA	Nilai	100	85,2	99,67	94	100	99,15	100	100	97,77
JUMLAH												2475,41
NILAI RATA-RATA												99,0164

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

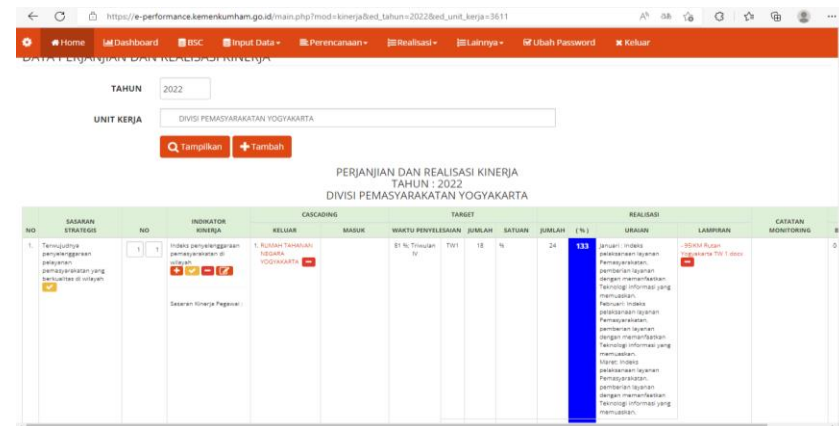
Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN



D. Capaian Kinerja Lainnya

1) *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan porses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterarikan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Pelaporan kinerja melalui aplikasi *E-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KELUAR	CASCADING			TARGET			REALISASI		CATATAN MONITORING	
				MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	(%)	URAIAN	LAMPIRAN		
1	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di tingkat	Indeks pengalangan pemasyarakatan di tingkat	1. RUMAH TAHANAA YOGYAKARTA		01 % Triwulan	TW1	10	%	24	133	100%	1. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 2. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 3. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 4. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 5. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 6. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 7. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 8. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 9. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 10. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan...	1. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 2. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 3. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 4. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 5. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 6. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 7. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 8. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 9. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan... 10. Ditunjuk sebagai pemantauan kegiatan Pemasyarakatan...



2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian target kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemenkumham.go.id>. Pelaporan target kinerja dilakukan setiap bulannya dan dilakukan penilaian atas capaian kinerja pada tanggal 06 s.d 15 pada bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan dan tanggal 6 s.d 15 Januari tahun berikutnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta memiliki 39 Rencana Strategis dengan 42 Rencana Aksi Target Kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

No	Divisi	Sasaran Strategis	Rencana Aksi Target Kinerja
1.	Divisi Administrasi	10	11
2.	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	17	18
3.	Divisi Pemasyarakatan	9	10
4.	Divisi Imigrasi	3	3
Jumlah		39	42



MONITORING KEMENKUMHAM 202 Pesan divisiadministrasi.yogyakarta

KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.01 Meningkatnya nilai SAKIP Kantor Wilayah	KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.02 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM
KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.03 Seluruh revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja harus mendapat clearance dari Kepala Kantor Wilayah melalui divisi administrasi	
KANWIL-02-P9KANTOR-WILAYAH.04 Peningkatan jumlah aset berupa Tanah dan Bangunan yang tercatat dalam SIMAK BMN dan Memiliki Sertifikat	
KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.05 Inventarisasi Kebutuhan Revitalisasi gedung dan bangunan di lingkungan Kantor Wilayah	KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.06 Optimalisasi Pemanfaatan aplikasi khusus unit utama di Wilayah
KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.07 Penyajian informasi kinerja dan pembentaaan posif yang cepat, tepat, akurat dan akuntabel	
KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.08 Optimalisasi implementasi Corporate University dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Bidang hukum dan HAM	
KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.09 Tata Kelola digitalisasi Kearsipan di lingkungan Kantor Wilayah	KANWIL-02P9KANTOR-WILAYAH.10 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pencapaian Target Kinerja



Tabel 3.189 Rekapitulasi Nilai Target Kinerja Kantor Wilayah

DIVISI	NO	RENCANA AKSI TARGET KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
DIVISI ADMINISTRAS I	1	Seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah melaksanakan SAKIP sesuai PermenPANRB NO 88 tahun 2021 tentang evaluasi AKIP dan Kepmenkumham No. M.HH-09.OT.01.01 tahun 2022	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.1	Seluruh Kantor Wilayah dan Satuan Kerja telah menyelenggarakan SPIP	100	100	100			100			100			100
	2.2	Implementasi Manajemen Risiko (MR)			100			100	100	100	100			100
	3	Seluruh usulan revisi anggaran Belanja Modal Satuan Kerja wajib mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui proses clearance dari Kepala Divisi Administrasi			100			100						
	4	Meningkatnya jumlah aset berupa tanah dan bangunan yang tercatat pada SIMAK BMN			100			100			100			100
	5	Usulan Revitaliasi gedung dan bangunan kanwil yang dilengkapi dokumen kelayakan dari Dinas PUPR setempat ke Biro Perencanaan			100									
	6	Aplikasi khusus Unit Utama dimanfaatkan secara efektif di wilayah			100			100			100			100
	7	Tersajikannya informasi kinerja dan pemberitaan yang positif pada Kantor Wilayah dan Satuan Kerja melalui SIPP dan Media lainnya			100	100	100	100	100	100	100			100
	8	1. Meningkatkan kompetensi SDM dilingkungan Kantor Wilayah melalui implementasi Corporate University 2. Update data base pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kantor Wilayah pada system informasi Permohonan Kegiatan Pengembangan Kompetensi (PK BANGKOM)			100			100	100	100	100			100
	9	Terlaksananya digitalisasi arsip dinamis di lingkungan Kanwil			100			100	100	100	90			100
10	Kanwil dan seluruh Satker melaksanakan kinerja untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan			100			100			100	100		100	
DIVISI YANKUMHAM	11	Keikutsertaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam memfasilitasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	12	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (existing) TA. 2023		100	100		100		100	100	100			
	13	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberi Bantuan Hukum melalui Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum						100			100			100



	14	Tersedianya rekomendasi hasil analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan public Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah			100			90			100			100
	15.1	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran data pelantikan PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	15.2	Penyebaran Informasi layanan AHU di wilayah (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan Apostille, dan Perseroan Perorangan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	16	Pengisian Form CDD oleh Pengguna Jasa, Penilaian Mitigasi Risiko oleh Notaris dan Penilaian Notaris berisiko oleh LPP	100	100	100			100	100	100	100	100	100	100
	17	Sinkronisasi Data Notaris yang Akurat antara Database AHU, Kanwil & Pengwil	100	100	100			100			100		100	100
	18	Terkumpulnya data alamat kantor dan kepengurusan partai politik tingkat provinsi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	19	Terlaksananya pendataan anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang berada di wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	20	Inventarisasi potensi pendaftaran merek di desa-desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	21	Kantor Wilayah menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/PKS Kanwil dengan stakeholder wilayah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
	22	Kantor Wilayah bersama dengan Stakeholder Melaksanakan Mengusulkan inventarisasi kandidat Kawasan Karya Cipta sesuai dengan pedoman yang diberikan		100	100	100	100	100	100	100				
	23	Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang mampu melakukan penelusuran dan pemanfaatan informasi paten	100			100		100	100					
	24	Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan (pencegahan pelanggaran KI)			100			100	100	100	100	100	100	100
	25	Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota melaksanakan Program Aksi HAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	26	Instansi Pemerintah mendapatkan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	100	100	100	100	100	100	100	90				
	27	Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI PAS	28	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dibidang Pelayanan Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	29	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dibidang Pelayanan Hukum dan Bimbingan Keterampilan dan Kepribadian bagi Tahanan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	30	Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



	31	Layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi pemasyarakatan	95	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100
	32	Terlaksananya SPPT TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	33	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku dewasa pada 10 wilayah piloting	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	34.1	Narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	34.2	Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	35	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang bersumber dari dalam maupun dari luar dengan melakukan deteksi dini	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	36	Terpenuhinya Data Pemilih untuk PEMILU 2024 di Lapas/Rutan yang valid dan lengkap	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DIVISI IMIGRASI	37	Diimplementasikannya layanan Paspor Online terbaru pada Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia beserta unit kerja di bawahnya (Unit Layanan Paspor, Unit Kerja Kantor Imigrasi, Mal Pelayanan Publik)			100			100			100		100
	38	Terselenggaranya Klasifikasi Pengungsi Luar Negeri (Deteni, Pencari Suaka dan <i>Final Rejected</i>)			100			100			100		100
	39	Terpatuhinya regulasi penjaminan orang asing oleh penjamin dan orang asing			100			100			100		100

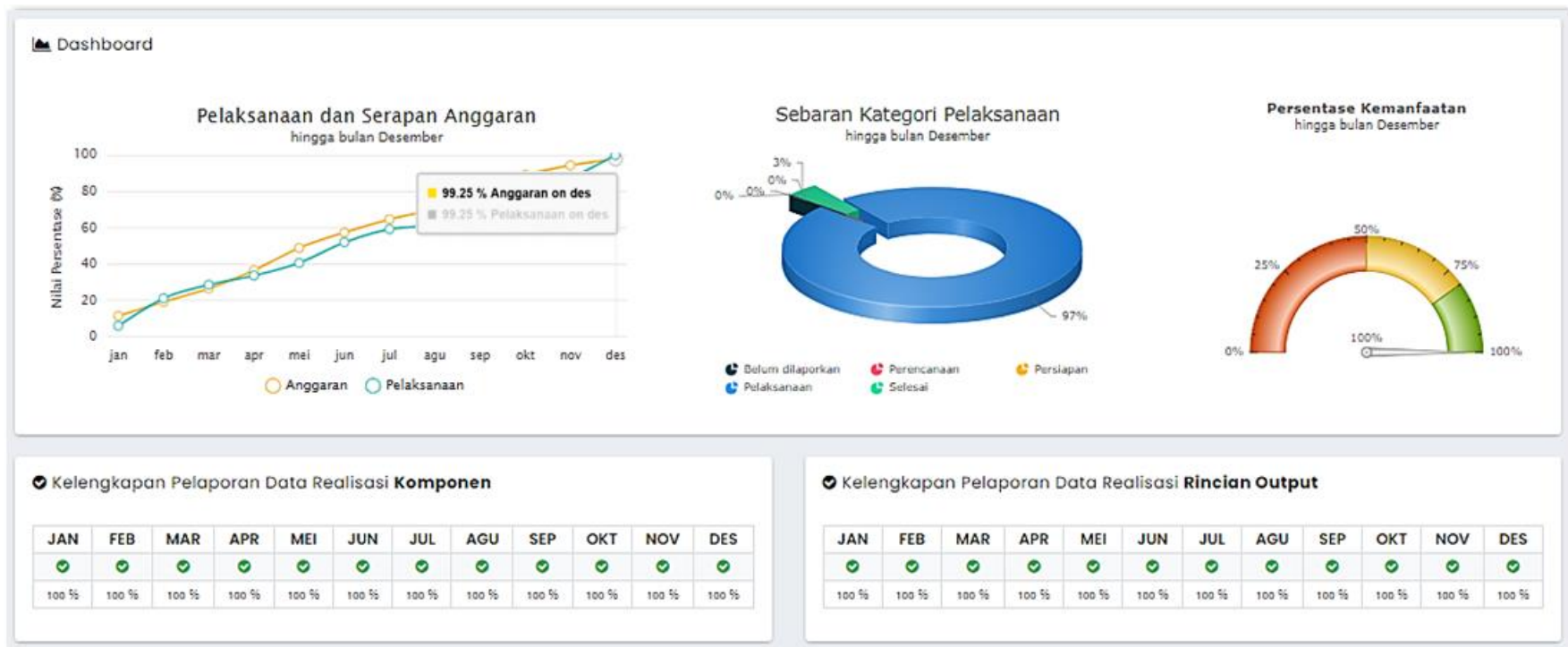


3) e-monev BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui *output-output* prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

REKAPITULASI ENTRY DATA REALISASI E-MONEV BAPPENAS TA 2023

JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA D.I YOGYAKARTA





REALISASI e-MONEV BAPPENAS TA 2023 PER TANGGAL 8/12/2023				
SATUAN KERJA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI	STATUS KEMANFAATAN	PROGRES
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	Rp 35.529.489.000	Rp 34.936.141.395	SUDAH	99,25%

**capaian sesuai dengan hasil pemantauan realisasi dan progres pada e-monev kantor wilayah Desember 2023*

NO	NOMOR DIPA	SATUAN KERJA	SERAPAN (%)
1	409180	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (AHU)	99,8
2	409181	SEKRETARIAT JENDERAL (SEKJEN)	97,8
3	409182	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN (PAS)	100
4	409183	DIREKTORAT JENDERAL KEIMIGRASIAN (IMI)	100
5	409184	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)	98,4
6	409185	DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PP)	97,3
7	409186	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)	100
8	409187	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)	99,95
9	409188	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM (BALITBANGKUMHAM)	100
TOTAL			99.25

**serapan per DIPA satuan kerja kantor wilayah kemenkumham DIY*



NO	NOMOR DIPA	SATUAN KERJA	SERAPAN (%)
1	404591	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA	100
2	497727	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	99,73
3	418340	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	100
4	419140	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA	100
5	404585	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	100
6	109636	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA YOGYAKARTA	94,6
7	632590	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I YOGYAKARTA	100
8	407995	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	99,95
9	652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SLEMAN	100
10	109111	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANTUL	100
11	653438	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II BANTUL	100
12	404630	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB WONOSARI	100
13	653133	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI	100
14	653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WONOSARI	99,3
15	404611	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB WATES	100
16	652433	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II WATES	99,9
TOTAL			99,59

**Realisasi Hasil Pemantauan Pada e-Monev Satuan Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta*



4) Kegiatan Prioritas Nasional

Capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program prioritas nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah

a) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2022 untuk kegiatan bantuan hukum litigasi setelah Addendum I dan Addendum II adalah sebesar Rp.1.715.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.704.000.000 (satu milyar tujuh ratus empat juta rupiah) dengan presentase 99,36% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) atau 99,36% (serratus persen) dari perhitungan SIDBankum dan Omspan;
- Kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Panwasda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 468 (empat ratus enam puluh delapan) permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan disetujui oleh Panwasda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan serapan anggaran sebesar Rp.1.704.000.000 (presentase 99,36%) dari pagu akhir Rp.1.715.000.000, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.190 Daftar Nama Bantuan Hukum Litigasi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	PBH PENDAMPING	JENIS PERKARA	TAHAP PENDAMPINGAN	ANGGARAN YANG DICAIRKAN
1	Wahyu Lestari	Perempuan	LBH Al Kautsar	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
2	Triya Indarti	Perempuan	LBH Al Kautsar	Perdata	Persidangan	3.000.000
3	Sapto Aji Prasetiawan	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
4	Andri Supratikno	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
5	Hendri Setiawan	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
6	Taufiq Endar Listya Pratama	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
7	Ubaid Qoiri	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
8	Alfian Budi Pratama	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
9	Mailan Jodi	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
10	Anggara Agil Pradhya	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
11	Triyanto	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
12	Heru Kustanto	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
13	Ari Susilo	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
14	Eka Septiantoro	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
15	Suwandi	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
16	Muhammad Romansya	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
17	Ardiyani Saputro	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
18	Muhammad Ismail Marzuki	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
19	Agus Iwan Triyanto	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000



20	Sudirmanto	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
21	Suroso	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
22	Arif Dwi Pramono	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
23	Muhammad Yusuf	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
24	Adi Rahayu	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
25	Noto Wiyarjo	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
26	Sigit Suprihatin	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
27	Widodo	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
28	Nicolaas Marchantio Mirino Alias Ito	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Persidangan	3.000.000
29	Rizki Sugiarto Pratama Putra	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Persidangan	3.000.000
30	Andika Cahyo Murwanto	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Persidangan	3.000.000
31	Sunaryo	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Persidangan	3.000.000
32	Tarman	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
33	Wahyu Setiawan	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
34	Sumadi	Laki-Laki	LBH Al Kautsar	Pidana	Penyidikan	2.000.000
35	Parjiyo	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
36	Wagiran	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
37	Sutikno	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
38	Aris Susanto	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
39	Anggrid Hanom Prakoso	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
40	Andrian Nurdianto	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000



41	Ngadino	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
42	Nawang Purwanto	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
43	Agus Santoso	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
44	Fito Jeri Setiawan	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
45	Rizal Hendrie Sukmawan	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
46	Findi Pangestu	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
47	Ristiyanto	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
48	Sumyang Adinistyo	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
49	Alex Dwi Saputra	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
50	Harfian Agus Yuliyanto	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
51	Supariyono	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
52	Eka Dangu Niscaya	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
53	Riyanto	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
54	Dani	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
55	Angga Mahendrata	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
56	Alin Adi Kamandana	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
57	Riyan Hadi Pamungkas	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
58	Dwi Wahyu Wibowo	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
59	Genta Prasdita Nusantara	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000



60	Septa Argady Putra	Laki-Laki	YLKBH Handayani	Pidana	Persidangan	3.000.000
61	Ema Wulan Sari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
62	Kusmiyati	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
63	Riswanti	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
64	Diah Aprihatini	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
65	Sri Hastuti Wulandari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
66	Suis Kanawati	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
67	Darisnu	Laki-Laki	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
68	Dita Dyah Nur Fadhila	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
69	Hariyanti	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
70	Wahyu Rahma Lestari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
71	Yeni Oktaviana	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
72	Siti Diah Nur Halizah	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
73	Tania Amanda Alifta	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan	2.000.000
74	Abdul Hamid Fathoni	Laki-Laki	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan	2.000.000
75	Ika Sri Lestari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
76	Tri Sryanto	Laki-Laki	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
77	Erna Budiarti	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
78	Krisyanta	Laki-Laki	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
79	Fera Mekarsari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
80	Sully Ardianti	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
81	Hera Aristianingsih	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000



82	Eka Widiastuti	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan	2.000.000
83	Tri Lestari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
84	Eva Andriyani	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
85	Eny Mahmudiati	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
86	Retno Dewi Wulandari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
87	Yeni Katun Lestari	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
88	Siti Aminah	Perempuan	YLBH SIKAP	Perdata	Persidangan	3.000.000
89	Dicky Nur Istanto	Laki-Laki	YLBH SIKAP	Pidana	Persidangan	3.000.000
90	Ngajilah	Perempuan	YLBH SIKAP	Pidana	Penyidikan	2.000.000
91	Sulastri Binti Ngadiyo	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
92	Mujiyati	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
93	Istanti Binti Hadipurwanto	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
94	Indah Yulianti Binti Sugiyana als Sukirman	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Gugatan	2.000.000
95	Mujiyati Binti Kismadi Slamet	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Gugatan	2.000.000
96	Eka Purwanti Binti Edy Supriyanto	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
97	Masud Alfani Bin Supriyadi	Laki-Laki	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
98	Siti Rokhana Wahyuni Binti Suprihatin	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Gugatan	2.000.000
99	Mila Nur Susanti Binti Mujiono	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
100	Efanani Binti Jumadi	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
101	Nurhayatun Binti Sugi Purwito/Sugito	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
102	Mitha Indriani Binti Subarno	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Persidangan	3.000.000
103	Purwandari Binti Cipto Murtijo	Perempuan	LBH Senopati	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000



104	Valentino Fernandito Syahputra	Laki-Laki	LBH Senopati	Pidana	Penyidikan	2.000.000
105	Angga Febrianto	Laki-Laki	LBH Senopati	Pidana	Penyidikan	2.000.000
106	Rima Pribawa	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
107	Moh Harun	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
108	Nuryadi	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
109	Joko Sutrisno	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
110	Iklas Nur Ramdan	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
111	Hari Setiyawan	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
112	Yendi Kurniawan	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
113	Didit Setyawan	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
114	Heru Sutoto	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
115	Muhammad Ibnu Sofyan	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
116	Burhanudin	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
117	Fajar Arif Nugroho	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
118	Wisnu Wibisono	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
119	Ngadimin	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
120	Dandun Wijaya Kusuma	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
121	Januar	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
122	Abdillah Faqih Muhammad Al Ghifari	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
123	Agustinus Dhanang Adiwibowo	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
124	Jeri Kelvindo	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
125	Budi Mulkana	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000



126	Siswanto	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Persidangan	3.000.000
127	Subagya	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Persidangan	3.000.000
128	Bayu Murtiaji	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Persidangan	3.000.000
129	Muhammad Nurul Hidayat	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
130	Marios Dahoklory	Laki-Laki	LBH Harapan	Pidana	Persidangan	3.000.000
131	Sangkananing Ayu Dewi Pergiwo Sari	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan	2.000.000
132	Ida Chabibah	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
133	Melisa Merdekawati	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
134	Ita Idayati	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
135	Vita Lalasari	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
136	Miftakhul Huda	Laki-Laki	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
137	Aryo Wibisono	Laki-Laki	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
138	Winarti Ristomo	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
139	Saraswati	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
140	Wiji Asri Astuti	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
141	Marinda Eka Prasetya	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan	2.000.000
142	Menik Purwantiningsih	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
143	Nur Rubiyanti	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
144	Nurjanah	Perempuan	LKBH FH UII	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
145	Maruf Rizky Fauzi	Laki-Laki	LKBH FH UII	Pidana	Persidangan	3.000.000
146	Muhammad Luthfil Hakim	Laki-Laki	LKBH FH UII	Pidana	Persidangan	3.000.000
147	Mochamad Arwani	Laki-Laki	LKBH FH UII	Pidana	Persidangan	3.000.000



148	Gunadi	Laki-Laki	LKBH FH UII	Pidana	Persidangan	3.000.000
149	Andika Saputra	Laki-Laki	LKBH FH UII	Pidana	Persidangan	3.000.000
150	Asriyati Yukriyah	Perempuan	YLPA DIY	Perdata	Persidangan	3.000.000
151	Hernawan Duwung Argoseno	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
152	Bintang Adinata Willy	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
153	Wahyu Muhammad Alim	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
154	Dheztha Arhdhian Mhaulhanha	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
155	Azidhan Dalfa Shandy	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
156	Prio Bimantoro	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Persidangan	3.000.000
157	Juan Andreansyah	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
158	Dendy Pratama Oktavian	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Persidangan	3.000.000
159	Reno Pratama	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Persidangan	3.000.000
160	Rafli Fadillah Akbar	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
161	Habib Nur Anshori	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
162	Duta Arya Pratama	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
163	Ardra Raka Nugroho	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
164	Rizkal Puguh Setyawan	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
165	Aditya Bangun Pratama	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
166	Muhammad Pulung Dahlan	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
167	Galih Sewon Artiano	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
168	Abi Anafiarta	Laki-Laki	YLPA DIY	Pidana	Penyidikan	2.000.000
169	Putri Agustina Herwinanti Binti Gatot Hernanto	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000



170	Novi Pujisayekti Binti Muhamad Maliki	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
171	Agnes Ida Sulistyowati	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
172	Susilowati Binti Y.Mujiono	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan	2.000.000
173	Fuad Laksana Bin Akhmad Badawi	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan	2.000.000
174	Nita Murnikasari Binti Kahono	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan	2.000.000
175	Mirawati Binti Hariyo	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan	2.000.000
176	Tarwini Binti Arjo Pawiro	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
177	Sri Susanti Binti Tugiyanto	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
178	Lency Susylawati Alias L. Susilawati Binti Samuri	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
179	Merry Safitri Binti Arim Soesanto	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
180	Ir. Rr. Andriyani Ratnaningsih, Ir. Binti Edi Santosa SE	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
181	Dwi Erna Jayanti Binti Paeran	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
182	Indah Ruliyati Alias Aloysia Indah Ruliyati	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
183	Rires Riana Putri Binti Riyanto	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
184	Tri Yuni Lestari Binti Bambang Yuono	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
185	Resmi Dwi Natalia Binti Parlan	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
186	Lindawati Binti Supto Agus Harjito	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
187	Mundzir Maisaroh Binti Teguh Jasmadi	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
188	Mutiara Bella Mega Binti Urip Maryadi	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
189	Wartini Binti Wakidi	Perempuan	PKBH FH UAD	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
190	Irzat Dianto	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000



191	Salis Gustina Sari	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
192	Dwi Yanti Binti Beso Sasmito	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
193	Kawit	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
194	Agustina Andriyatni Binti Suprijayanto	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
195	Shokeh	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
196	Lidia Fitriyaningsih Binti Triyanto	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
197	Manek Cinde Lungit Binti Tatang Muhammad Natsir	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
198	Siti Khasiyah Binti Dremo Sanjaya	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
199	Boinem Binti Sudi Utomo	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
200	Maya Musti Nilasari Binti Kisdiyono alias Jumikir	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
201	Krisna	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
202	Salma Syahnatur Rosnia Binti Sanusi	Perempuan	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
203	Muhammad Badrodin Bin Supriyadi	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Perdata	Persidangan	3.000.000
204	Pawoko	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Pidana	Persidangan	3.000.000
205	Agung Purnomo Jati Bin Bekel Sosrosetiadi	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Pidana	Persidangan	3.000.000
206	Moch. Nuri Andriansa	Laki-Laki	PKBH FH UMY	Pidana	Persidangan	3.000.000
207	Tri Anto Bin Sukino	Laki-Laki	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
208	Suratri Binti Sutarjo	Perempuan	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
209	Jais Manto Bin Wajono	Laki-Laki	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
210	Tri Wahyuni Binti Baidi	Perempuan	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
211	Suharningsih Binti Sukardi Karjo Sumarto	Perempuan	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000



212	Pujiyanti Binti Mujiyono	Perempuan	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
213	Tutik Wariyanti	Perempuan	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
214	Joko Surawan Bin Nariyanto	Laki-Laki	LSBH FSH UIN Sunan Kalijaga	Perdata	Persidangan	3.000.000
215	Tri Warsono bin Parto Dimejo	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan	2.000.000
216	Tumilah binti Alm.Prapto Sutrisno	Perempuan	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan	2.000.000
217	FX Henry Efendi	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan	2.000.000
218	Ocvisia	Perempuan	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan	2.000.000
219	C. Wariyani	Perempuan	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
220	Saeful Bayu Suseno	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
221	Isparmi binti Rejo Wiyono	Perempuan	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Gugatan	2.000.000
222	Maria Kristiani	Perempuan	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Perdata	Persidangan	3.000.000



223	Abi Wantoro	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
224	Prasetyo Alias Peyek Bin Alm. Hadi Sumarto	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Persidangan	3.000.000
225	Prasetyo Alias Peyek Bin Alm. Hadi Sumarto	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
226	Sukamto Diharjo	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Persidangan	3.000.000
227	Anggit Susilo Bin Muji Widarto	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan	2.000.000
228	Heri Prawoto Bin Supriyanto	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan	2.000.000
229	Ana Nur Alfiyah Suparto	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan	2.000.000
230	Bejo Wahyudi Bin Harjo Prayitno	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
231	Primmychel Khirwa Amta	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
232	Rm Candra Inggu Tita Putra Ckn Bin Tavip Agung Yuwono (Alm)	Laki-Laki	LKBH Fakultas Hukum	Pidana	Penyidikan	2.000.000



			Universitas Janabadra			
233	Listiana	Perempuan	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
234	Sarjilah	Perempuan	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
235	AG Sudaryanto Mujiyono	Laki-Laki	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
236	Ranti	Perempuan	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Persidangan	3.000.000
237	Triyono	Laki-Laki	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
238	Hasyim Aswari	Laki-Laki	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
239	Nanik Wahyuningsih	Perempuan	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Persidangan	3.000.000
240	Sulaikawati	Perempuan	YPBH Peradi Bantul	Perdata	Persidangan	3.000.000
241	Vemas Tiya Pratama	Laki-Laki	YPBH Peradi Bantul	Pidana	Persidangan	3.000.000
242	Mat Hakim	Laki-Laki	YPBH Peradi Bantul	Pidana	Penyidikan	2.000.000
243	Hermoko Mulyawan	Laki-Laki	YPBH Peradi Bantul	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
244	Sri Lestari	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
245	Yuni Astutik	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
246	Wasono	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
247	Nur Azit Tetrawan	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
248	Suratman	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
249	Farida	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
250	Supatminingsih binti Bejo	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000



251	Sri Sungkowati	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
252	Ari Gayatri	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
253	Sukini	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
254	Nurhaslinda binti Surahmanto	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
255	Livia Ayuningtyas	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
256	Endah Retro Wulandari	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan	2.000.000
257	Isbanar	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan	2.000.000
258	Winarti	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan	2.000.000
259	Solekhah Septiani	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan	2.000.000
260	Suryaningrum Merdekawati	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Gugatan	2.000.000
261	Martin	Perempuan	PBHI Wilayah Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
262	Febri Yoga Pratama bin Sutarto	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
263	Ok Dimas Anandito	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
264	Juni Wahyu Subekti	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
265	Febriyanto Ferian Nughroho bin Juni Wahyu Subekti	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
266	Dedik	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
267	Ali Rasidin Hasan	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
268	Yoga Purnama	Laki-Laki	PBHI Wilayah Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
269	Masfufi	Laki-Laki	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000



270	Dinda Widasari	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
271	Mita Jayanti	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
272	Nurjanah	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan	2.000.000
273	Suratmi	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
274	Siti Qomariyah	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
275	Maryati	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
276	Eka Yuliana Saputri	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
277	Supriyanti	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
278	Sri Lestari	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
279	Ana Zulaika	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
280	Nurkhasanah	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
281	Sutrismi	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
282	Erni Klara Puspita Sari	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
283	Maryanti	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
284	Kartini	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
285	Fitria Rahmawati	Perempuan	YLBH APIK Yogyakarta	Perdata	Persidangan	3.000.000
286	Widi Rahayu	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Gugatan	2.000.000
287	Prwanti	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
288	Anita Turisyah	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000



289	Sri Widuri Indayani	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
290	Bernadetta Ary Sumarnie	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
291	Arif Hendri Wijaya	Laki-Laki	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
292	Ririn Wulandari	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
293	Sunaryati	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
294	Danu Sutendi	Laki-Laki	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
295	Eka Widiastuti	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
296	Puryanti	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
297	Novi Marganingsih	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
298	Mujinah	Perempuan	LK3 Sekar Melati	Perdata	Persidangan	3.000.000
299	Erna Pristiningsih	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Perdata	Gugatan	2.000.000
300	Shela Nur Karina	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
301	Nurhayati	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
302	Lia Anggita Kumalasari	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
303	Handang Putra Tarunaka	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Perdata	Gugatan	2.000.000
304	Ratna Dwi Tantri	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Perdata	Gugatan	2.000.000
305	Caswan Alias Aswan Bin Wasyudi	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
306	Fredi Rahmat Hermawan Bin Samudi	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
307	Poniyem Binti Kelik Kusbinganyono	Perempuan	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000



308	Damar Jati Maulana Bin Yanto Supriyanto	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
309	Vitnu Hidayat Bin Isruskandar	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
310	Didik Suprayitno Alias Soblok Bin Sugiono	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
311	Wahyu Akbar Styawan Bin Aris Walidi	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
312	Daffa Antar Panggayuh	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
313	Eka Budi Prasetyo Bin Suhardi	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
314	Muhammad Faiz Estanto Bin Haris Dwi Indriyanto Alm	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
315	Kinan Arya Pratama Bin Gede Prabowo	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
316	Dion Sista Utama Anak Dari Saiful Azhar	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
317	Arif Budiyanto Bin Kasno	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
318	Deni Julian Prasetia	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
319	Mahendra Wicaksana	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
320	Okcan Huda Ervana	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
321	Asbullah Nur Ramadan	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
322	Arif Widodo	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
323	Mohammad Aunurofix	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
324	Supriyadi	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
325	Miftakhul Fitro	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
326	Aldi Nurdiana	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000



327	Yoga Era Erlangga	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
328	Ardi Budi Susanto	Laki-Laki	RBH Yayasan AFTA	Pidana	Persidangan	3.000.000
329	Mahfud Attoriq	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
330	Yoza Mahesa Mahardika	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
331	Muhammad Jalil	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
332	Arif Nugroho	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000
333	Parna Als Noglom Bin Sugimin	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
334	Irul Setyawan Bin Sutrisno	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
335	Gunanto Bin Mupiyarno	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
336	Anton Sujarwo Bin Kuat Budi Santoso	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
337	Alvin Setya Nugroho	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
338	Joko Purnomo Bin Supangat	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
339	Daryono Alias Guik Bin Hardi Utomo	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	Penyidikan Persidangan
340	Bayu Hidayat	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	Penyidikan Persidangan
341	Totok Darmanto Bin Sukardi	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	Penyidikan Persidangan
342	MUJIYONO Anak Dari WAKIDI PRAPTO KAHONO	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
343	Reno Fandika Tomo Bin Suropto	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000
344	Agus Ariyono Bin Suprpto	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000
345	Jajuli Bin Kromontono	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
346	Aprika Prastowo Bin Alm Paijo	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
347	Firman Bin Jasmar	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000



348	Muhammad Arqhan Kurniawan Bin Iswanuri	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
349	Mujiyanto Bin Kadiran	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000
350	SARMINI	Perempuan	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
351	Sukiran	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Penyidikan	2.000.000
352	Eko Ronggo Waskito Bin Wibowo	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000
353	Andi Wicahyo Bin Mugiyo	Laki-Laki	LBH Sekawan	Pidana	Persidangan	3.000.000
354	Puji Astuti Binti Sukardiyono	Perempuan	LBH Sembada	Perdata	Persidangan	3.000.000
355	Maryanto Bin Bejo	Laki-Laki	LBH Sembada	Perdata	Gugatan	2.000.000
356	Andre Christie Septianto Bin Christijanto	Laki-Laki	LBH Sembada	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
357	Irnawati Binti Ngadimin	Perempuan	LBH Sembada	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
358	Tugiyanti Binti Saikun	Perempuan	LBH Sembada	Perdata	Gugatan	2.000.000
359	Elis Sani Siariyah Binti Ero Suhara	Perempuan	LBH Sembada	Perdata	Gugatan	2.000.000
360	Anita Yuliasuti Binti Zaenal Arifin	Perempuan	LBH Sembada	Perdata	Gugatan	2.000.000
361	Anatora Afif Hanafi Bin Dwi Purwanto	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
362	Badri Andri Irawan Bin Ngatijo	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
363	Maryadi Bin Aryo Jadi	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
364	Destra Nursahid	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
365	Al Fenda Ardevana Virgiawan	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
366	Anjar Andrian Saputro Bin Heniyanto	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
367	Damar Juliyan Bin Surajiman	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
368	Dion Dwi Ramadhan	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
369	Puadi Bin Jari	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000



370	Ahmad Dwi Prasetyo Als Ahmad Bin Ngadiyono Ngaderi	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
371	Mayaldi Krisandi Bin (Alm.) Nofrizal	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
372	Rheno Surya Atmaja Bin Ngadirin	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
373	Lei Arlin Pratama Bin Parino	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
374	Ramdan Bin Slamet Raharjo	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
375	Suhartini	Perempuan	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
376	Suprianto Bin Tagih (Alm)	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
377	Hoo Sien Hong	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
378	Mukhazim Bin Alm Muhibat	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
379	Cahyo Ardi Setiawan	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
380	Gani Setyantoro Bin Sutantara (Alm.)	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Persidangan	3.000.000
381	Sarmin Als Carmin Bin Darsito (Alm)	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
382	Dwi Nurdiyanto Bin Suroso	Laki-Laki	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
383	Wulandari Binti Sukir (Alm)	Perempuan	LBH Sembada	Pidana	Penyidikan	2.000.000
384	Velda Nurrestiyana	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
385	Uswatun Hasanah	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
386	Nurma Rahmatika	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Perdata	Gugatan	2.000.000
387	Astutiningsih	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Perdata	Gugatan Persidangan	5.000.000
388	Fajar Nugroho	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Perdata	Persidangan	3.000.000
389	Purwanti	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Perdata	Persidangan	3.000.000



390	Andika Afriyanto	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
391	Eko Nor Seto	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
392	Bintoro Dwi Kurniawan	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
393	Triyanto	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
394	Fatima Dwi Aryani	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
395	Erfat Kusmayudi	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
396	Sonny Handoko	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
397	Wiji Sunaryo	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
398	Riskian Arka Dafarudin	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
399	Muhammad Rafli Akbar Ashari	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
400	Slamet Mudi Utomo	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Persidangan	3.000.000
401	Sukemi	Perempuan	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
402	Joko Wandiro	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
403	Yuliyani Kusfebriyanto	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
404	Nindita Mahendra Surya	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
405	Desta Bernadianto	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
406	Bima Akbar Marcelino	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
407	Ignatius DAdan Nugraha	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
408	Putra Jati Ana	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000



409	Irvan Saputra	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
410	Purnama Aji Pamungkas	Laki-Laki	LBH Dharma Yudha	Pidana	Penyidikan	2.000.000
411	Indah Titik Akhiriyanti	Perempuan	YPBH Nyi Ageng Serang	Perdata	Persidangan	3.000.000
412	Carelina Krismianti	Perempuan	YPBH Nyi Ageng Serang	Perdata	Persidangan	3.000.000
413	Neny Lisnawati	Perempuan	YPBH Nyi Ageng Serang	Perdata	Persidangan	3.000.000
414	Lilis	Perempuan	YPBH Nyi Ageng Serang	Perdata	Persidangan	3.000.000
415	Yusuf Iskandar	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Penyidikan	2.000.000
416	Dwi Prastyo	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
417	Dimas Adi Prasetya	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
418	Satya Maulana	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
419	Farhan Nurhakim	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Penyidikan	2.000.000
420	Suroso	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
421	Riyan Edy Sartono	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Penyidikan Persidangan	2.000.000
422	Nur Rizki Kurniawan	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Penyidikan	2.000.000
423	Ilham Kurniawan Sandi	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Penyidikan	2.000.000
424	Fahrul Hidayat	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
425	Ngadiyo Podo	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
426	Suparyanto	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
427	Yan Purwo Saputro Bin Parto Utomo	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000



428	Taufik Cahyadi	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
429	Kethut Ariyanto	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
430	Leo Anggoro	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
431	Arya Widha Santoso	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
432	Ardiansyah Tri Aji Nugroho	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
433	Amrullah Sabon Igor	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
434	Muhammad Nur Haqiqi	Laki-Laki	YPBH Nyi Ageng Serang	Pidana	Persidangan	3.000.000
435	Janu Tri Pamungkas	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
436	Muhammad Rofiq Kurniadi	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
437	Yudhyta Cahya Prasetya	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
438	Andra Cahya Kusuma	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
439	Anggriawan	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
440	Ivan Kristanto Ardian Budi	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
441	Andi Hari Yuana	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
442	Rifqi Naufal Abiyyu	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
443	Fajar Duta Pamungkas	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
444	Imam Ikhwahyudin	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000
445	Muhammad Naufal Al Hafiz	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
446	Iwan Nurhidayat	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan Persidangan	5.000.000



447	Rulli Faidan Bin Rudy Hartono	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
448	Kamilus Andi Setyawan	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
449	Muhammad Iqbal	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
450	Septyan Aldiwinarko	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
451	Sepda Nur Ihwan Ubaydulloh	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
452	Sudiana Eka Putra	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
453	Wawan Rupawan	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
454	Ramadon	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
455	Eko Kristiono	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
456	Anjar Syahputra	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
457	Febriyanto Laksono	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
458	Didik Triwidyatmoko, S.E.	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
459	Yudha Prasetyo Nugroho	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
460	Novie Yudianto	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
461	Arif Astrianto	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
462	Samsul Arifin	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
463	Bima Setya Wibawa	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
464	Heri Agus Susanto	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000
465	Ongki Vernando Okta	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Persidangan	3.000.000



466	Andriyana	Perempuan	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
467	Andang Aprianto	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000
468	Tri Aris Munandar	Laki-Laki	LBH Tentrem D.I. Yogyakarta	Pidana	Penyidikan	2.000.000

b) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2023 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2023 untuk kegiatan bantuan hukum non litigasi setelah Addendum I dan Addendum II adalah sebesar Rp. 309.260.000 (tiga ratus sembilan dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 309.260.000 (tiga ratus sembilan dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau 100% (seratus persen) dari perhitungan SIDBankum.;
- Kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh 22 (dua puluh dua) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dengan jumlah 114 (seratus empat belas) permohonan yang lolos verifikasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) melalui aplikasi SIDBankum, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.191 Daftar Nama Bantuan Hukum Non Litigasi

NO	NAMA PEMOHON	LOKUS BANTUAN HUKUM	PBH PENDAMPING	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN YANG DICAIRKAN
1	Muhammad Rayhan	Desa Ngandong, Kelurahan Girikerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman	LKBH FH UII	Penyuluhan Hukum	Rp 2.970.000



2	Taufiq Wahyu Widodo	Balai Padukuhan Kelurahan Widodomartani, Ngemplak, Sleman	LBH Sembada	Penyuluhan Hukum	Rp 3.270.000
3	Yusril Rasyid	Jl. Bintaran Wetan No. 11, Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta	YLBH Sikap	Penyuluhan Hukum	Rp 3.270.000
4	Faizin	Kalurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman	PKBH FH UMY	Penyuluhan Hukum	Rp 1.070.000
5	Akhmad Yuliantara	Kantor Kemantren Danurejan Jl. Hayam Wuruk No.28, Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta	LBH Dharma Yudha	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.529.000
6	Prawata	Aula Balai Kalurahan Potorono, Banguntapan, Bantul	PKBH FH UAD	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.466.500
7	Rakhmawati Wijyaningrum	Gedung Serbaguna Kertopaten, Glondong, Wirokerten, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul	PKBH FH UAD	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.326.000
8	Wiji Astuti	Sabdodadi, Bantul	LBH Senopati	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.270.000
9	Nanang Nugroho	Padukuhan Jolosutro Kalurahan Srimulyo, Bantul	LKBH FH Universitas Janabadra	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.270.000
10	Heri Listyantoro	Padukuhan Gunungan, Desa Beji, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul	LBH Sekawan	Penyuluhan Hukum	Rp. 2.140.000
11	Miyadiana	Dukuh Segoroyoso II Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon pleret, Kabupaten Bantul	PKBH FH UAD	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.677.500
12	Kuat Sugito	Dusun Tegal Malang Dk Grujugan, Bantul	YLBH Sikap	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
13	Yusril Rasyid	Jl. Bintaran Wetan No. 11, Gunungketur, Kota Yogyakarta	YLBH Sikap	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
14	Andri Septiyanto	Kelurahan Balecatur, Sleman	PBHI	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.145.000
15	Ernawati Kusumaningsih	Kantor Kalurahan Trirenggo, Bantul	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.070.000
16	Haryanto	Kantor Kalurahan Karangtengah, Bantul	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.070.000
17	Lurah Bangunharjo	Kantor Kalurahan Bangunharjo, Bantul	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000



18	Marwan	Kantor Kalurahan Tirtonirmolo, Bantul	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
19	Durori	Kantor Kalurahan Sendangsari, Bantul	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
20	Abdul Aziz	Kantor Kalurahan Margorejo, Bantul	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
21	Titis Yudiarti	jalan Nyi Pembayun no 40, Prenggan, Kotagede, Kota Yogyakarta	LBH Dharma Yudha	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.699.000
22	Novie Bayu	Kantor Kepala Desa Jatirejo, Kulon Progo	YPBH Nyi Ageng Serang	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.270.000
23	Anggit Safrudin	Jl. Kelurahan, Karangwaru Lor TR II/206, Tegalrejo, Kota Yogyakarta	LK3 Sekar Melati	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
24	Nawangasaki	Jl Purbayan Kg 3 No.1190	LK3 Sekar Melati	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
25	Heru Suprpto	Pagerjurang, Kepuharjo, Sleman	LBH Harapan	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.070.000
26	Anggit Safrudin	Karangwaru Lor TR III/206, Kota Yogyakarta	LBH Dharma Yudha	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.442.000
27	Paryanti	Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul	LKBH FH Universitas Janabadra	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
28	Mayamil	Kantor Kelurahan Brontokusuman	RBH Yayasan AFTA	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
29	Basirudin	Kantor Kalurahan Banguntapan	PKBH FH UAD	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.590.000
30	Anwar Musadad	Balai Desa Karangwuni, Kulon Progo	YPBH Nyi Ageng Serang	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
31	Juwani	Kantor Desa Sidorejo, Kulon Progo	YPBH Nyi Ageng Serang	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
32	Wahyudi	Kantor Kalurahan Panggungharjo Jl. KH Ali Maksum, Panggungharjo, Sewon, Palembang, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul,	PKBH FH UAD	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.426.500
33	Agus S	Jl.Timoho No 40, Muja Muju, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta	LKBH FH Universitas Janabadra	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000



34	Duroni	Jl. Gesikan-Sedayu Km. 4, Benyo, Sendangsari, Pajangan, Bantul,	PBHI	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.675.000
35	Bambang Sarwono	Kalurahan Argomulyo Jl. Pedes-Godean Km.1	YPBH Peradi Bantul	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
36	Pipin	Karangturi, Baturetno, Banguntapan, Bantul	LBH Senopati	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
37	Pipin	Prangwedanan RT.03, Potorono, Banguntapan, Bantul	LBH Senopati	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
38	Samiono	Kelurahan Purwomartani	YLBH APIK	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
39	Sigit Rahmatulah	Kedai Kopi Randu Kuning. Jl. Ambarbinangun No. 245A, Brajan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.	YLPA	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
40	Lurah Wonokromo	kantor kalurahan Wonokromo	RBH AFTA	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
41	Taufiq Kamal	Kerto, Pleret, Pleret, Bantul	YLPA	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
42	Taufiq Kamal	Ruang Pertemuan Kalurahan Pleret, Kerto Pleret, Pleret Bantul	LKBH FH UII	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
43	Abdul Rosyid	Joglo Rumah Bapak Heri Winarko, Geplakan	PKBH FH UMY	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
44	Sumaryanto	Ambarketawang	PKBH FH UMY	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
45	Catur Sarjumiharta	Kleben, pandowoharjo	LBH Sembada	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
46	Supriyadi	Jl. Nyi Ageng Serang No.15-17	YPBH Peradi Bantul	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
47	Fitrah Resha	RT 02 Ngasem, Sewon	YLBHI LBH Yogyakarta	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.335.000
48	Taufiq Kamal	Kantor Kalurahan PleretJl. Jejeran - Pleret, Padukuhan Kerto, Kalurahan Pleret, Kecamatan Pleret,Kabupaten Bantul	PKBH FH UAD	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.653.500
49	Sudari	Balai Kalurahan Semoyo	YLKBH Handayani	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000



50	Lastri Wahyuni	Balai Kalurahan Nglanggeran	YLKBH Handayani	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
51	Endah Dwi Astuti	Balai Kalurahan Putat	YLKBH Handayani	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
52	Arif Wahyu	BALAI KALURAHAN BEJI	YLKBH Handayani	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
53	Wasdiyanto	BALAI KALURAHAN NGLEGI	YLKBH Handayani	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
54	Budi Parwanto	Karangduwet, Paliyan	LBH Sekawan	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
55	Lurah Argodadi	Kantor Kalurahan Argodadi	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.270.000
56		Balai Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul Jl. Sambi 7-Nglipar km 5	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
57		Balai Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul Jl. Raya Wonosari-Yogyakarta km 5,5, Bandung, Playen, Gunungkidul	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
58		Balai Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul JL. Wonosari Jogja KM.4	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
59		Jl.Wonosari - Pulutan km.1,6, Besari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul.	LBH Sekawan	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
60		Dukuh Nambongan, Mlati	YLBHI LBH Yogyakarta	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.681.000
61		RT 05 Blimbingsari Caturtunggal	YLBHI LBH Yogyakarta	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.654.000
62		Kantor Kalurahan Argosari	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.270.000
63		Kantor Kalurahan Balecatur	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
64		BANYUBENING II NO 2 BEJIHARJO	LBH Sekawan	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000



65		Baleharjo Wonosari	LBH Sekawan	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
66		Kantor Kalurahan Argorejo	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
67		Kalurahan Gari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
68		Kalurahan Karangtengah, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
69		Jl. Wanagama 1, Km.2, Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
70		Jl. Jogja-Wonosari, Padukuhan Gading IV, Kalurahan Gading, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul	LBH AI Kautsar	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
71		Jalan Kaliurang Km. 18	LBH Harapan	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
72		Kantor Kalurahan Ambarketawang	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
73		Kalurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman	LBH Sembada	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
74		Kantor Kalurahan Bangunjiwo	LBH Tentrem	Penyuluhan Hukum	Rp. 3.700.000
75	Dinar Amrita Hati		RBH AFTA	Drafting Dokumen	Rp. 300.000
76	Munjariyati Binti Rokhmad Ismudi		RBH AFTA	Drafting Dokumen	Rp. 300.000
77	Adi Budi Yanto		RBH AFTA	Drafting Dokumen	Rp. 300.000
78	Hari Setiyawan Bin Agus Suyatno		RBH AFTA	Drafting Dokumen	Rp. 300.000
79	PUTRI YULIANA		RBH AFTA	Drafting Dokumen	Rp. 300.000
80	RINI SAFITRI		RBH AFTA	Drafting Dokumen	Rp. 300.000



81	FAUZI APRIYADI		LBH Al Kautsar	Konsultasi Hukum	Rp. 200.000
82	Mochamad Sodik		PKBH FH UMY	Konsultasi Hukum	Rp. 200.000
83	Sarwoyo		LBH Sekawan	Konsultasi Hukum	Rp. 200.000
84	SITI FATIMAH		LBH Sekawan	Konsultasi Hukum	Rp. 200.000
85	Debi Politika Widhiastuti Suwarno Putri		LBH Harapan	Konsultasi Hukum	Rp. 200.000
86	Tri Wuryono		LBH Harapan	Konsultasi Hukum	Rp. 200.000
87	Supriyadi	Jl. Moh Yamin Kurahan	YPBH Peradi Bantul	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.270.000
88	Sriyono	Dusun Serpeng Lor, RT 002, RW 024, Kalurahan Pacarejo, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul	LBH Al Kautsar	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.140.000
89	Kasidi	Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno Banguntapan Bantul	LK3 Sekar Melati	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.270.000
90	Yuli Trisniati	Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan No.93, Glugo, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul	RBH AFTA	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.470.000
91	Runi Asiyah	Jati Kuning, Ngoro oro	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.510.000
92	Moch Ismail	Jl. Harjowinatan No. 19	LK3 Sekar Melati	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
93	Jagabaya Nglanggeran	Kampung Pitu, Nglanggeran Wetan, Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul	LBH Al Kautsar	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
94	Marzuki	Gambiran, Pakembinangun, Kec. Pakem, Kabupaten Sleman	LBH Harapan	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.500.000
95	Harris Syarif	Kantor kelurahan keparakan	LKBH FH UII	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
96	Hilmi Hakimudin	Kalurahan Pendowoharjo Jl. Bantul KM 8,8	YPBH Peradi Bantul	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000



97	Reni Wastuti	Siyono, Logandeng	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
98	Drs. Darsam	Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta	PKBH FH UMY	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
99	Handung Tri	Kiyaran, Wukirsari	LBH Harapan	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
100	Rusdiyanto	Semenrejo, Pulutan	LBH Sekawan	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
101	Suyanto	Dengok, Playen	LBH Sekawan	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
102	Achid Sugiyarto	Jl. Wonosari-Paliyan Km 11, Mengger, Karangasem, Paliyan	LBH Al Kautsar	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
103	Suherman	Balai Kalurahan Bunder	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
104	Ajad Sulaiman	Balai Kalurahan Patuk	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
105	Giyanto	Balai Kalurahan Terbah	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
106	Dalyuni	Balai Kalurahan Ngoro Oro	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
107	Sugit	Balai Kalurahan Pengkok	YLKBH Handayani	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.000.000
108	Permadani		PBHI	Pendampingan Di Luar Pengadilan	Rp 770.000
109	Susah		LBH Al Kautsar	Pendampingan Di Luar Pengadilan	Rp 770.000
110	Purnomo		PBHI	Pendampingan Di Luar Pengadilan	Rp 770.000
111	Kukuh Muktiyanto		PBHI	Pendampingan Di Luar Pengadilan	Rp 770.000



112	Fajar Setiawan		PBHI	Pendampingan Di Luar Pengadilan	Rp 770.000
113	Oktavian Jepri Saputra		PBHI	Pendampingan Di Luar Pengadilan	Rp 770.000
114			LKBH FH UII	Penelitian Hukum	Rp 2.000.000



Tabel 3.192 Capaian Anggaran Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non Litigasi TA 2023

NO.	NAMA OBH	BANKUM LITIGASI				BANKUM NON LITIGASI			
		PAGU SETELAH ADDENDUM	REALISASI	%	SISA	PAGU SETELAH ADDENDUM	REALISASI	%	SISA
1	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SENOPATI	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
2	Lembaga Bantuan Hukum AL KAUTSAR	Rp111.000.000	Rp111.000.000	100	Rp0	Rp32.010.000	Rp32.010.000	100	0
3	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	Rp79.000.000	Rp79.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
4	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak D.I.Yogyakarta	Rp57.000.000	Rp57.000.000	100	Rp0	Rp7.400.000	Rp7.400.000	100	0
5	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	Rp93.000.000	Rp93.000.000	100	Rp0	Rp21.140.000	Rp21.140.000	100	0
6	YLBHI LBH YOGYAKARTA	Rp1.000.000	Rp0	0	Rp1.000.000	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
7	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	Rp79.000.000	Rp79.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
8	LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	Rp40.000.000	Rp40.000.000	100	Rp0	Rp0	Rp0	0	0
9	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA	Rp55.000.000	Rp55.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
10	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI BANTUL	Rp50.000.000	Rp50.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
11	YAYASAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM HANDAYANI	Rp104.000.000	Rp104.000.000	100	Rp0	Rp32.010.000	Rp32.010.000	100	0
12	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SIKAP	Rp132.000.000	Rp132.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
13	PBHI WILAYAH YOGYAKARTA	Rp93.000.000	Rp93.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
14	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK YOGYAKARTA	Rp80.000.000	Rp80.000.000	100	Rp0	Rp3.700.000	Rp3.700.000	100	0
15	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) SEKAR MELATI	Rp72.000.000	Rp62.000.000	86,11	Rp10.000.000	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
16	RUMAH BANTUAN HUKUM YAYASAN AFTA	Rp93.000.000	Rp93.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0



17	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEKAWAN	Rp101.000.000	Rp101.000.000	100	Rp0	Rp21.340.000	Rp21.340.000	100	0
18	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEMBADA	Rp93.000.000	Rp93.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
19	LEMBAGA BANTUAN HUKUM DHARMA YUDHA	Rp79.000.000	Rp79.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
20	YAYASAN PUSAT BANTUAN HUKUM NYI AGENG SERANG	Rp72.000.000	Rp72.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
21	Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I Yogyakarta	Rp109.000.000	Rp109.000.000	100	Rp0	Rp42.280.000	Rp42.280.000	100	0
22	Lembaga Bantuan Hukum Harapan	Rp72.000.000	Rp72.000.000	100	Rp0	Rp10.670.000	Rp10.670.000	100	0
GRANDTOTAL		Rp1.715.000.000	Rp1.704.000.000	99,36	Rp11.000.000	Rp309.260.000	Rp309.260.000	100	0



BAB IV

Penutup

Informasi tentang kesimpulan Laporan Kinerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Indikator Kinerja Utama



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

1. Sasaran yang dicapai tahun 2023 terdapat 22 sasaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan 4 program yang terdiri dari :
 - 1) Program Dukungan Manajemen;
 - 2) Program Pembentukan Regulasi;
 - 3) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
 - 4) Program Pemajuan dan Penegakan HAM.
1. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat 59 indikator kinerja untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta yang telah ditetapkan tahun 2023.
2. Dari total 59 indikator kinerja, terdapat 1 indikator yang tidak tercapai, yaitu :
 - 1) Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum, Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah, target yang harus dicapai sebesar 5%, namun tidak bisa tercapai dikarenakan Target penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023 adalah Rp. 6.965.140.219 dan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.023.650.000,-. Namun jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP tahun 2022 terjadi penurunan penerimaan dimana pada tahun 2022 realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp. 8.739.350.000,-. Penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum ini dikarenakan pada tahun 2022, Indonesia sudah masuk dalam masa endemic Covid 19, sehingga



transaksi mengalami kenaikan, dikarenakan banyak Notaris yang mengambil cuti setelah pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah masuk dalam masa Endemi. Sementara di tahun 2023 Indonesia sudah masuk dalam kategori Normal. Dengan demikian, realisasi capaian PNBP Administrasi Hukum Umum di D.I. Yogyakarta tahun 2023 sebesar -8.2%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5%, atau capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2023 sebesar -163.8 %.

Tingkat pencapaian kinerja rata-rata dari 59 indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja dinyatakan berhasil dengan persentase rata-rata capaian sebesar 227,32%.

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta Tahun 2023 untuk 4 DIPA sebesar 99.65%. Sementara itu rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah untuk 4 DIPA dan Unit Pelaksana Teknis secara keseluruhan sebesar 99,27%. Dari 4 program pada Kantor Wilayah, rata-rata capaian kinerja keuangan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian tercapai realisasi keuangan sebesar 100,00%.
 - Kepastian pelayanan keimigrasian khususnya M-Paspor yang cepat, tepat, dan mudah diakses.
 - Meningkatnya jumlah penyedia pelayanan keimigrasian seperti UKK, MPP dan ULP, sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan tercapai realisasi keuangan sebesar 99,99%.
 - WBP memperoleh kepastian hukum.
 - Masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan Klien Pemasarakatan.
 - Klien Pemasarakatan memperoleh program pembimbingan yang terukur dan terarah dengan 4 program, yaitu : Kepribadian, Kemandirian, Hukum, dan Kemasyarakatan.
 - Masyarakat semakin mudah dan cepat dalam memperoleh pelayanan publik.
3. Program Administrasi Hukum Umum tercapai realisasi keuangan sebesar 99,88%.



- Legalitas bagi UMKM sebagai badan hukum.
 - Peluang UMKM untuk Go Publi (Export, E-Commerce).
 - Kepastian jaminan pengembangan usaha dari perbankan kepada UMKM.
 - Notaris dapat melakukan pelaporan mandiri secara online.
 - Kemudahan masyarakat dalam mengecek Lokasi Notaris karena aplikasi Siemon terhubung Satelit Map.
 - Kemudahan masyarakat dalam memilih dan menentukan notaris sesuai dengan kebutuhan dan lokus objek layanan.
 - Kepatuhan notaris terhadap praktik PMPJ dan kenotariatan meningkat.
 - WNA yang telah beralih status WNI dan menjadi investor memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat DIY dan meningkatkan perekonomian serta mengentaskan kemiskinan di DIY. Contoh adanya industri di Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.
 - Meningkatnya kepercayaan publik atas korporasi sehingga mampu mendorong investasi dan meningkatkan perekonomian di DIY.
4. Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual tercapai realisasi keuangan sebesar 99,89%.
- Telah terdaftar Merek Kolektif Jogja Mark, Jogja 100% dan Jogja Tradition sebagai merek internasional.
 - Mampu memperluas pangsa ekspor produk DIY serta peningkatan investasi dan perekonomian di wilayah DIY.
 - Peningkatan jumlah pendaftaran merek di DIY setiap tahunnya dan perlindungan KI bagi produk lokal DIY.
 - Perluasan pangsa pasar produk lokal, contoh : masuknya Bakpia Wiro 378 sebagai kudapan utama di hotel Tentrem Yogyakarta.
 - Produk kulit merek Abekani Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari DJKI sebagai UMKM Terbaik 2022.
 - Produk UMKM lokal yang memiliki merek terdaftar tersedia di spot Bandara YIA sehingga lebih dikenal masyarakat.
 - Meningkatnya nilai jual produk yang telah mendapatkan sertifikasi indikasi geografis. Contoh : Gula Kelapa Kulon Progo sebelum IG Rp. 12.000 sesudah 18.000, Batik Nitik Yogyakarta harga sebelum IG Rp. 1.700.000 Harga sesudah IG Rp. 2.300.000, dan Salak Pondoh Sleman Harga sebelum IG Rp. 8.000 Harga sesudah IG Rp. 15.000.



- Mengangkat potensi daerah dan menambah pendapatan masyarakat pemilik produk IG tersebut.
 - Meningkatnya angka pendaftaran Paten tahun 2021.
 - Meningkatnya angka pendaftaran Hak Cipta tahun 2022.
 - Meningkatnya angka pendaftaran Merek tahun 2023.
 - Meningkatnya angka kepatuhan pembayaran biaya tahunan paten.
 - Meningkatnya hilirisasi produk paten Perguruan Tinggi.
5. Program Pembentukan Hukum tercapai realisasi keuangan sebesar 100,00%.
 6. Program Pembinaan Hukum Nasional tercapai realisasi keuangan sebesar 99,57%
 7. Program Pemajuan Hak Asasi Manusia tercapai realisasi keuangan sebesar 99.99%.
 8. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM tercapai realisasi keuangan sebesar 100%.
 9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM tercapai realisasi keuangan sebesar 99,57%

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
 - b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan-



kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan.

- c. Memberikan layanan informasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
- a. Adanya koordinasi yang baik antara Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah dan Para Organisasi Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - b. Adanya persamaan persepsi yang sama antara Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum;
 - c. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.
6. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
- a. Dalam menetapkan target kinerja dan perjanjian kinerja, perlu dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi real pada tiap Kantor Imigrasi;
 - b. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu kekonsistenan masing-masing seksi dan sub bagian untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi;
 - c. Seluruh aparaturnya Keimigrasian harus melakukan pembenahan birokrasi, baik secara internal maupun eksternal;
 - d. Melakukan inovasi di bidang pelayanan publik Keimigrasian, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan;
 - e. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik;
 - f. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi



pelayananKeimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong D.I. Yogyakarta menjadi kota yang lebih maju dan bermartabat serta diperhitungkan di jajaran dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Lampiran



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 21,687,394,000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 21,687,394,000,-

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	86 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.113.000.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.113.000.000,-

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
 Direktur Jenderal
 Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
 NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
 Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
 NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan

Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	45,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	70,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	50

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	68
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	70
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	70
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	75

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 21.968.378.000
Pogram Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya di UPT Pemasarakatan	Rp. 90.286.154.000

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

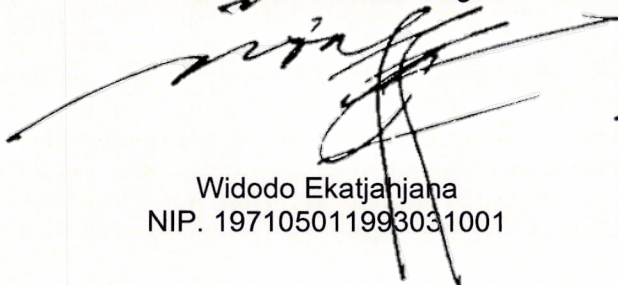
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

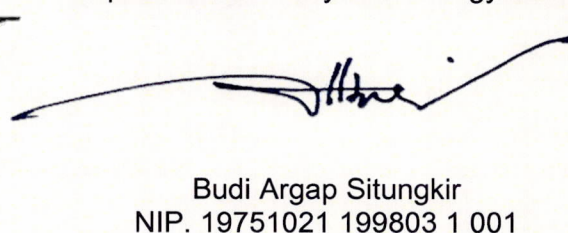
Yogyakarta, 6 Januari 2021

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

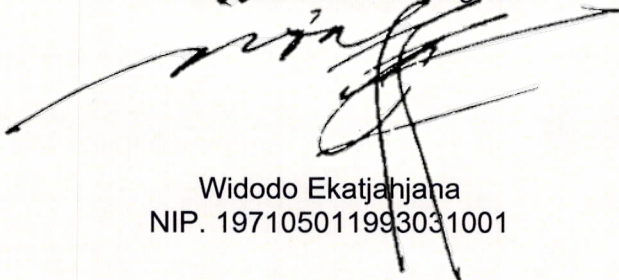
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.351.486.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.351.486.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 10.239.421.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 10.239.421.000,-

Yogyakarta, 6 Januari 2021

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 6 Januari 2021

Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,32

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	631 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
2.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.367.171.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 1.367.171.000,-

Jakarta, 6 Januari 2021

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 196511281991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa
Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2021

Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H.R. Benny Riyanto

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 290.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 290.000.000,-

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



H.R. Benny Riyanto
NIP. 196204101987031003

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 19751021 199803 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

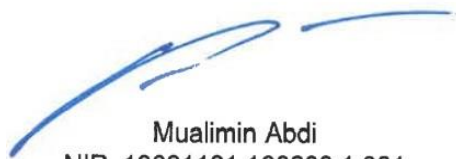
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Mualimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	75,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	45,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	25%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 239,895,000
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 239,895,000


Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia



Muallimin Abdi
NIP. 19621121 198203 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

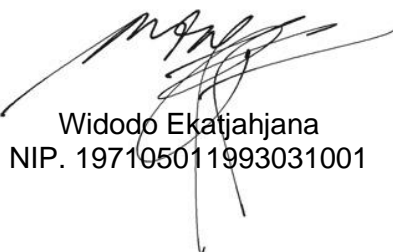
Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Yogyakarta, 6 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

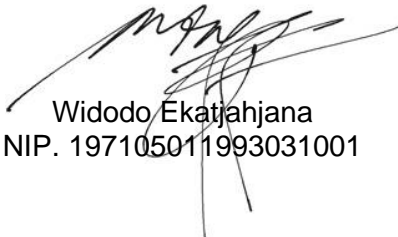
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 156.957.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 156.957.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.682.674.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.682.674.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Widodo Ekatihjana
NIP. 197105011993031001

Yogyakarta, 6 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Yogyakarta, 6 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iwan Kurniawan
Jabatan : Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

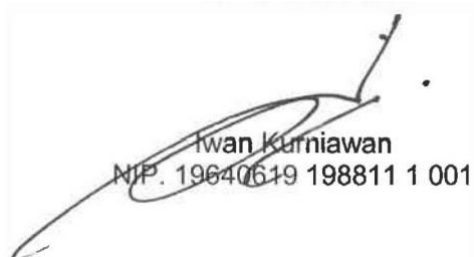
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

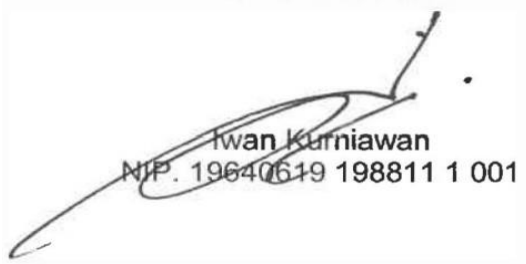
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pemanfaatan rekomendasi hasil analisis kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	1. Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia	80 %
		2. Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	81 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 261.246.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 261.246.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan HAM



Iwan Kurniawan
NIP. 19640619 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta


Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.


Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi.	87,0
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	94 %
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	94 %
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 21,860,741,000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 21,860,741,000,-

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	2. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	88 %
2.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	88%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 2.429.950.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.429.950.000,-

Jakarta, 02 Januari 202302

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 19690918 199403 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DI YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DI Yogyakarta


Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DI YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80 (Indeks)
2.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna	50,0 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)	80,0 %
		3. Persentase menurunnya residivis	1,0 %
		4. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90,0 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80,0 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83 (Nilai Indeks)
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56 (Nilai Indeks)
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5 (Nilai Indeks)
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	60 (Nilai Indeks)
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	74 (Nilai Indeks)
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	80 (Nilai Indeks)
		6. Indeks Pelayanan Tahanan	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80 (Nilai Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 (Indeks)
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 21.388.640.000
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp. 83.600.456.000


Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan



Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah DI Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DI YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DI Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah DI Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

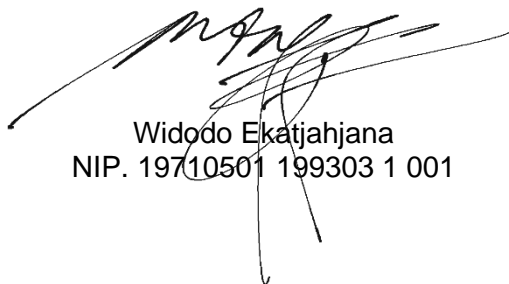
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

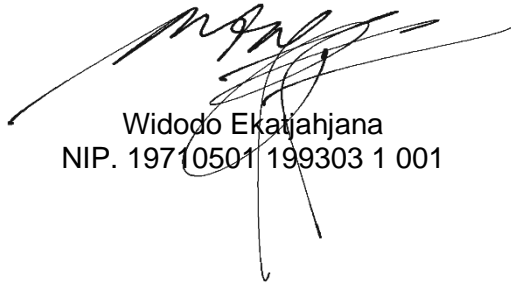
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.153.302.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 3.153.302.000,-

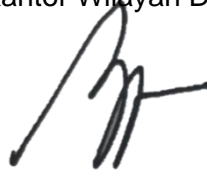
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,34 (Indeks)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah kementerian hukum dan HAM	1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	732 Layanan
		2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
2	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.140.998.000,-
1.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.140.998.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual



Razilu
NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa
Yogyakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)


No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	25 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 320,000,000 ,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 320,000,000 ,-

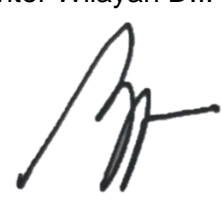
Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan



Dhahana Putra
NIP. 19690909 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa
Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Mualimin Abdi
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

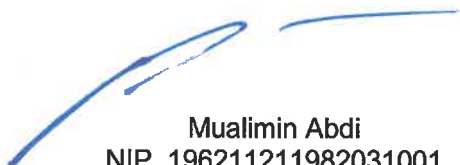
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Mualimin Abdi
NIP. 196211211982031001


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	70,0%
		2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	40,0%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	20%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 229.395.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Rp. 229.395.000,-

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Muallimin Abdi
NIP. 196211211982031001



Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 6 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

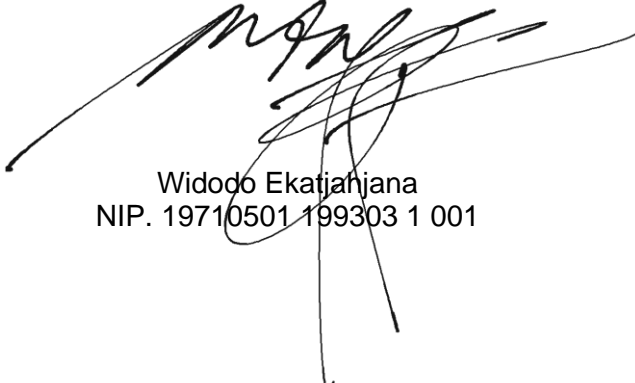
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,2 (Indeks)
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82,0%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80,0%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	21%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	15%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	77 (Indeks)
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.75 (Indeks)

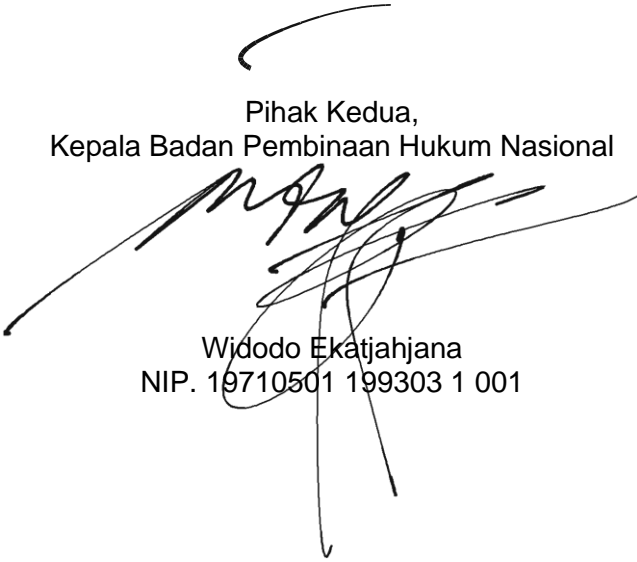
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan Serta Pemantauan dan Peninjauan / Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 (Indeks)
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%


Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 156.957.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 156.957.000,-
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.360.324.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.360.324.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta


Widodo Ekatjahjana
NIP. 19710501 199303 1 001


Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agung Rektono Seto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Agung Rektono Seto
NIP. 19701202 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sri Puguh Budi Utami
Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
D.I. YOGYAKARTA DENGAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Persentase KTI yang disitasi	20%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal	20 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 260.893.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 260.893.000,-

Jakarta, 6 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia



Sri Puguh Budi Utami
NIP. 196207021987032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta



Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
D.I. YOGYAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
D.I. Yogyakarta

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

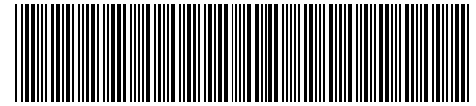
Jakarta, 6 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.01.2.409181/2023**



DS:0113-9283-6304-2009

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 21.860.741.000 (DUA PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.01.WA Program Dukungan Manajemen
013.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Jumlah Uang

Rp. 21.860.741.000
Rp. 21.860.741.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	21.860.741.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 21.860.741.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.01.WA	Program Dukungan Manajemen			21.860.741.000
Kegiatan	:	1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			21.860.741.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	20.072.947.000
Rincian Output	:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	227.915.000
		02	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	Layanan	274.834.000
		03	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	144.232.000
		04	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	19.700.000
		05	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	100.260.000
		06	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	19.306.006.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10,00	Unit, m2, Paket	139.000.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	10,00	Unit	139.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	214,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	649.508.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	214,00	Orang	649.508.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	999.286.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	369.114.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	288.956.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	198.735.000
		04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1,00	Dokumen	142.481.000

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

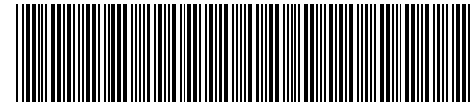
ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023

I B. SUMBER DANA



DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	21.860.741.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	21.860.741.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0	d. Hibah Dalam Negeri IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0	e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :			f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



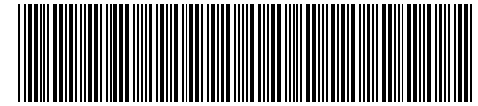
DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	15.323.801	6.397.940	139.000	-	-	21.860.741		
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	15.323.801	6.397.940	139.000	-	-	21.860.741		
1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	15.323.801	6.397.940	139.000	-	-	21.860.741		
1558.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	15.323.801	4.749.146	-	-	-	20.072.947	04 . 51	
01	RM	15.323.801	4.749.146	-	-	-	20.072.947	030	
1558.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	-	139.000	-	-	139.000	04 . 51	
01	RM	-	-	139.000	-	-	139.000	030	
1558.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	649.508	-	-	-	649.508	04 . 51	
01	RM	-	649.508	-	-	-	649.508	030	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
1558.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	999.286	-	-	-	999.286	04 . 51	
01 RM		-	999.286	-	-	-	999.286	030	
JUMLAH		15.323.801	6.397.940	139.000	-	-	21.860.741		

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409181) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

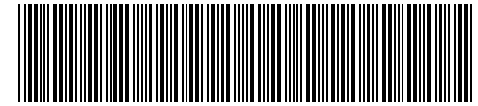
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.548.660	1.568.519	1.832.504	2.672.674	1.602.261	2.889.953	1.708.156	1.586.407	1.741.606	1.578.646	1.593.161	1.538.194	21.860.741
		BELANJA PEGAWAI	1.094.558	1.094.558	1.094.558	2.189.116	1.094.558	2.189.116	1.094.558	1.094.558	1.094.558	1.094.558	1.094.558	1.094.547	15.323.801
		BELANJA BARANG	454.102	473.961	598.946	483.558	507.703	700.837	613.598	491.849	647.048	484.088	498.603	443.647	6.397.940
		BELANJA MODAL	0	0	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000
	013.01.WA.1558	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1.548.660	1.568.519	1.832.504	2.672.674	1.602.261	2.889.953	1.708.156	1.586.407	1.741.606	1.578.646	1.593.161	1.538.194	21.860.741
		51 BELANJA PEGAWAI	1.094.558	1.094.558	1.094.558	2.189.116	1.094.558	2.189.116	1.094.558	1.094.558	1.094.558	1.094.558	1.094.558	1.094.547	15.323.801
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	454.102	473.961	598.946	483.558	507.703	700.837	613.598	491.849	647.048	484.088	498.603	443.647	6.397.940
		53 BELANJA MODAL	0	0	139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.000

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023
IV A. B L O K I R**



DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409181] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

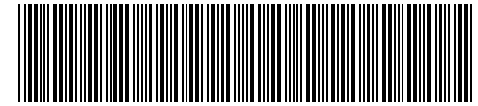
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.01.2.409181/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:0113-9283-6304-2009

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409181] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

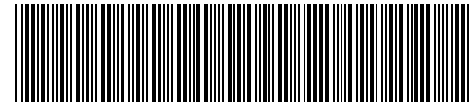
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Sekretaris Jenderal

ttd.
Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H.



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.409180/2023**



DS:1402-0064-2073-9123

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 2.429.950.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.429.950.000
Rp. 2.429.950.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.429.950.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 2.429.950.000

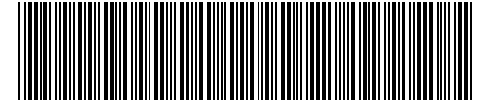
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.429.950.000
Kegiatan	:	5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.429.950.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase peningkatan PNPB Administasi Hukum Umum di wilayah			
		2. 01	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah			
		3. 02	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5251.AEA	Koordinasi	8,00	kegiatan	287.684.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	8,00	kegiatan	287.684.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.069.086.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.069.086.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara, Berkas Perkara	6.540.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan perkara pada kantor wilayah	1,00	Perkara	6.540.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	1.066.640.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	7,00	Lembaga	1.066.640.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023

I B. SUMBER DANA



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	2.429.950.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.429.950.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

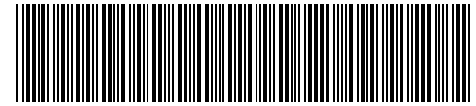
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	2.429.950	-	-	-	2.429.950		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.429.950	-	-	-	2.429.950		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.429.950	-	-	-	2.429.950		
5251.AEA	Koordinasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	287.684	-	-	-	287.684	04 . 51	
04	PNBP	-	287.684	-	-	-	287.684	030	
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	1.069.086	-	-	-	1.069.086	04 . 51	
04	PNBP	-	1.069.086	-	-	-	1.069.086	030	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	6.540	-	-	-	6.540	04 . 51	
04	PNBP	-	6.540	-	-	-	6.540	030	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	1.066.640	-	-	-	1.066.640	04 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	1.066.640	-	-	-	1.066.640	030	
JUMLAH		-	2.429.950	-	-	-	2.429.950		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409180) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

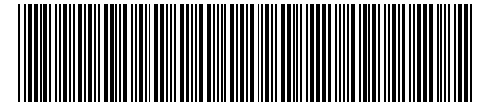
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	164.225	300.156	244.740	321.819	251.780	241.218	312.499	279.536	175.586	138.391	0	2.429.950
		BELANJA BARANG	0	164.225	300.156	244.740	321.819	251.780	241.218	312.499	279.536	175.586	138.391	0	2.429.950
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	164.225	300.156	244.740	321.819	251.780	241.218	312.499	279.536	175.586	138.391	0	2.429.950
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	164.225	300.156	244.740	321.819	251.780	241.218	312.499	279.536	175.586	138.391	0	2.429.950

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023
IV A. B L O K I R**



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409180] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

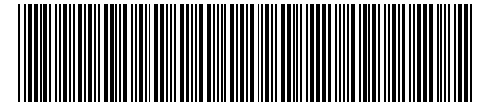
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.03.2.409180/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:1402-0064-2073-9123

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409180] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

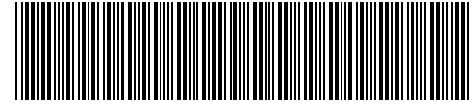
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.409182/2023**



DS:3886-5048-0000-9080

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409182) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 869.208.000 (DELAPAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Jumlah Uang
Rp. 869.208.000
Rp. 869.208.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 869.208.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 869.208.000

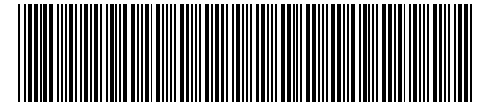
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



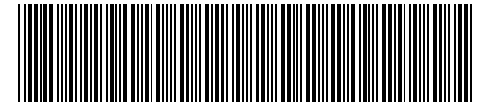
DS:3886-5048-0000-9080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409182) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	869.208.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	869.208.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkeuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3886-5048-0000-9080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409182) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	299.086.000	
Rincian Output		:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10.00	kegiatan	299.086.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	60,00	orang	295.104.000	
Rincian Output		:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	60.00	orang	295.104.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	275.018.000	
Rincian Output		:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	275.018.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

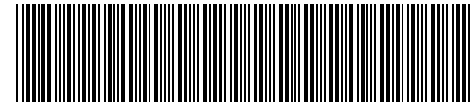
ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023

I B. SUMBER DANA



DS:3886-5048-0000-9080

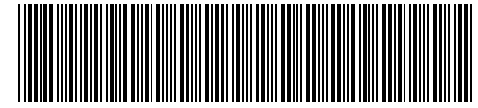
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409182) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	869.208.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	869.208.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3886-5048-0000-9080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409182) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409182	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	869.208	-	-	-	869.208		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	869.208	-	-	-	869.208		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	869.208	-	-	-	869.208		
5252.AEA	Koordinasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	299.086	-	-	-	299.086	04 . 51	
01	RM	-	299.086	-	-	-	299.086	030	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	295.104	-	-	-	295.104	04 . 51	
01	RM	-	295.104	-	-	-	295.104	030	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	275.018	-	-	-	275.018	04 . 51	
01	RM	-	275.018	-	-	-	275.018	030	
JUMLAH		-	869.208	-	-	-	869.208		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3886-5048-0000-9080

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409182) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

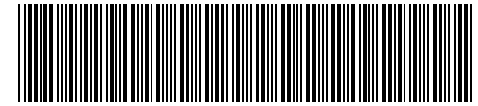
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409182	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	72.720	147.288	89.604	61.506	66.082	106.208	60.220	54.436	86.738	71.718	52.688	869.208
		BELANJA BARANG	0	72.720	147.288	89.604	61.506	66.082	106.208	60.220	54.436	86.738	71.718	52.688	869.208
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	72.720	147.288	89.604	61.506	66.082	106.208	60.220	54.436	86.738	71.718	52.688	869.208
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	72.720	147.288	89.604	61.506	66.082	106.208	60.220	54.436	86.738	71.718	52.688	869.208

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023
IV A. B L O K I R**



DS:3886-5048-0000-9080

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409182] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

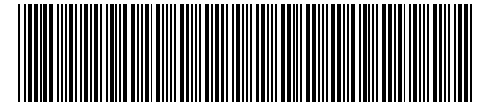
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409182/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:3886-5048-0000-9080

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409182] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

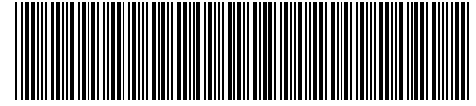
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.409183/2023**



DS:0918-4094-4825-8025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 1.136.825.000 (SATU MILIAR SERATUS TIGA PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.136.825.000
013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.136.825.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 1.136.825.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 1.136.825.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0918-4094-4825-8025

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.136.825.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.136.825.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah			
		2. 02	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5254.AEA	Koordinasi	26,00	kegiatan	753.341.000
Rincian Output	:	01 AEA.002	Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	26,00	kegiatan	753.341.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan	13,00	operasi, Hari Operasi	325.474.000
Rincian Output	:	01 BHB.U01	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah	8,00	operasi	151.304.000
		02 BHB.U02	Operasi Mandiri di Wilayah	2,00	operasi	54.840.000
		03 BHB.U03	Operasi Gabungan di Wilayah	2,00	operasi	93.320.000
		04 BHB.U04	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	operasi	26.010.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	2,00	laporan	58.010.000
Rincian Output	:	01 BKA.001	Pengawasan Orang Asing	2,00	laporan	58.010.000

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2023

I B. SUMBER DANA



DS:0918-4094-4825-8025

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	1.136.825.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.136.825.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0918-4094-4825-8025

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409183	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	1.136.825	-	-	-	1.136.825		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.136.825	-	-	-	1.136.825		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.136.825	-	-	-	1.136.825		
5254.AEA	Koordinasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	753.341	-	-	-	753.341	04 . 51	
04	PNBP	-	753.341	-	-	-	753.341	030	
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	325.474	-	-	-	325.474	04 . 51	
04	PNBP	-	325.474	-	-	-	325.474	030	
5254.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	58.010	-	-	-	58.010	04 . 51	
04	PNBP	-	58.010	-	-	-	58.010	030	
JUMLAH		-	1.136.825	-	-	-	1.136.825		

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0918-4094-4825-8025

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409183) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

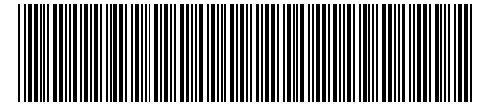
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409183	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	75.188	94.830	132.403	132.019	132.132	132.048	132.175	131.461	56.389	56.466	61.714	1.136.825
		BELANJA BARANG	0	75.188	94.830	132.403	132.019	132.132	132.048	132.175	131.461	56.389	56.466	61.714	1.136.825
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	75.188	94.830	132.403	132.019	132.132	132.048	132.175	131.461	56.389	56.466	61.714	1.136.825
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	75.188	94.830	132.403	132.019	132.132	132.048	132.175	131.461	56.389	56.466	61.714	1.136.825

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2023
IV A. B L O K I R**



DS:0918-4094-4825-8025

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409183] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

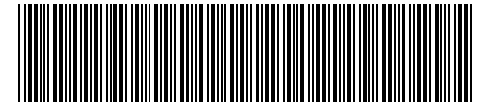
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.06.2.409183/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:0918-4094-4825-8025

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409183] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

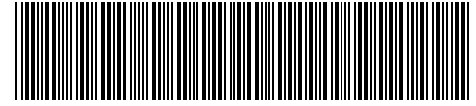
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.07.2.409184/2023**



DS:6703-0041-6499-7498

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 2.140.998.000 (DUA MILIAR SERATUS EMPAT PULUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.07.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.07.BF.5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 2.140.998.000
Rp. 2.140.998.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.140.998.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 2.140.998.000

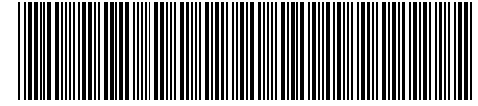
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6703-0041-6499-7498

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.140.998.000
Kegiatan	:	5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.140.998.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah			
		2. 01	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual			
		3. 02	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah			
		4. 02	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah			
		5. 03	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5253.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.000,00	Orang	2.003.289.000
Rincian Output		:	01 BDC.001 Diseminasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	800.00	Orang	1.251.305.000
		:	02 BDC.002 Edukasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	200.00	Orang	197.636.000
		:	03 BDC.003 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	1000.00	Orang	554.348.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5253.BKB Pemantauan produk	5,00	laporan	137.709.000
Rincian Output		:	01 BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	5.00	laporan	137.709.000

Jakarta, 30 November 2022
Pit. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

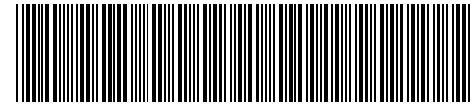
ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2023

I B. SUMBER DANA



DS:6703-0041-6499-7498

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	2.140.998.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.140.998.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

Pagu

Ekuivalen Rupiah

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6703-0041-6499-7498

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409184	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	2.140.998	-	-	-	2.140.998		
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.140.998	-	-	-	2.140.998		
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.140.998	-	-	-	2.140.998		
5253.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	2.003.289	-	-	-	2.003.289	04 . 51	
04	PNBP	-	2.003.289	-	-	-	2.003.289	030	
5253.BKB	Pemantauan produk (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	137.709	-	-	-	137.709	04 . 51	
04	PNBP	-	137.709	-	-	-	137.709	030	
JUMLAH		-	2.140.998	-	-	-	2.140.998		

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6703-0041-6499-7498

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409184) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

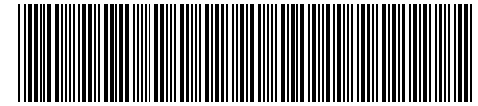
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409184	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	42.026	261.204	227.384	138.052	412.465	375.478	420.170	44.832	67.698	67.598	42.026	42.066	2.140.998
		BELANJA BARANG	42.026	261.204	227.384	138.052	412.465	375.478	420.170	44.832	67.698	67.598	42.026	42.066	2.140.998
	013.07.BF.5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	42.026	261.204	227.384	138.052	412.465	375.478	420.170	44.832	67.698	67.598	42.026	42.066	2.140.998
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	42.026	261.204	227.384	138.052	412.465	375.478	420.170	44.832	67.698	67.598	42.026	42.066	2.140.998

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2023
IV A. B L O K I R**



DS:6703-0041-6499-7498

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409184] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

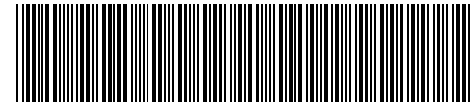
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.07.2.409184/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:6703-0041-6499-7498

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Kekayaan Intelektual
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409184] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

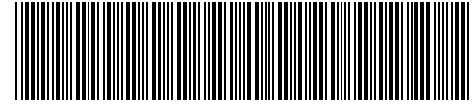
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

ttd.
Ir. RAZILU, M.Si.
NIP 196511281991031002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.409185/2023**



DS:8080-0015-6025-7413

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 320.000.000 (TIGA RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp. 320.000.000
013.08.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 320.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 320.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 320.000.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8080-0015-6025-7413

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			320.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			320.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan			
		2. 01	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	19,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	273.846.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	19,00	Rekomendasi Kebijakan	273.846.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	25,00	Orang	46.154.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	25,00	Orang	46.154.000

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2023

I B. SUMBER DANA



DS:8080-0015-6025-7413

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	320.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	320.000.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8080-0015-6025-7413

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

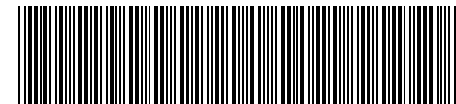
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409185	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	320.000	-	-	-	320.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	320.000	-	-	-	320.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	320.000	-	-	-	320.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	273.846	-	-	-	273.846	04 . 51	
01	RM	-	273.846	-	-	-	273.846	030	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	46.154	-	-	-	46.154	04 . 51	
01	RM	-	46.154	-	-	-	46.154	030	
JUMLAH		-	320.000	-	-	-	320.000		

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8080-0015-6025-7413

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409185) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

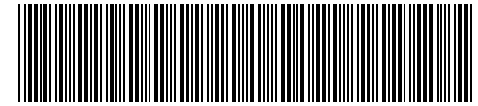
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409185	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.000	30.000	40.408	25.075	34.733	46.750	37.875	28.175	17.534	23.250	21.200	0	320.000
		BELANJA BARANG	15.000	30.000	40.408	25.075	34.733	46.750	37.875	28.175	17.534	23.250	21.200	0	320.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	15.000	30.000	40.408	25.075	34.733	46.750	37.875	28.175	17.534	23.250	21.200	0	320.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	15.000	30.000	40.408	25.075	34.733	46.750	37.875	28.175	17.534	23.250	21.200	0	320.000

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2023
IV A. B L O K I R**



DS:8080-0015-6025-7413

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409185] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

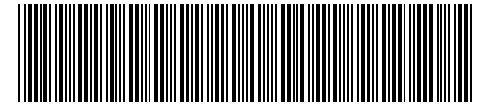
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.08.2.409185/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:8080-0015-6025-7413

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409185] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

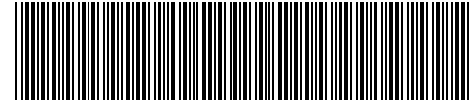
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.I.P., S.H., M.Si.
NIP 196909091993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.09.2.409186/2023**



DS:5814-8908-8051-8288

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 239.895.000 (DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.09.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
013.09.BG. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 239.895.000
Rp. 239.895.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 239.895.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 239.895.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			239.895.000
Kegiatan	:	5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah			239.895.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
		2. 01	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah			
		3. 02	jumlah kab/kota peduli HAM			
		4. 03	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	14.190.000
Rincian Output	:	01 ABD.003	Rekomendasi Analisis Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	14.190.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	48.103.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di wilayah	1,00	layanan	48.103.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	134.502.000
Rincian Output	:	01 BDB.002	Pembinaan Lembaga Publik Berbasis HAM di Wilayah	3,00	Lembaga	134.502.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	43.100.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Pengumpulan Data dan Pendampingan Kab/Kota Peduli HAM	1,00	kegiatan	43.100.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023

I B. SUMBER DANA



DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

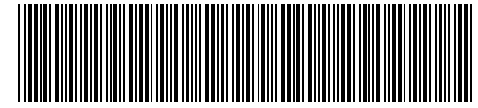
Halaman : I B. 1

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	239.895.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	239.895.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



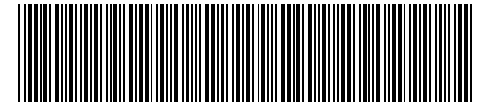
DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409186	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	239.895	-	-	-	239.895		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	239.895	-	-	-	239.895		
5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	-	239.895	-	-	-	239.895		
5255.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	14.190	-	-	-	14.190	04 . 51	
01	RM	-	14.190	-	-	-	14.190	030	
5255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	48.103	-	-	-	48.103	04 . 51	
01	RM	-	48.103	-	-	-	48.103	030	
5255.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	134.502	-	-	-	134.502	04 . 51	
01	RM	-	134.502	-	-	-	134.502	030	
5255.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	43.100	-	-	-	43.100	04 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	43.100	-	-	-	43.100	030	
JUMLAH		-	239.895	-	-	-	239.895		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409186) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

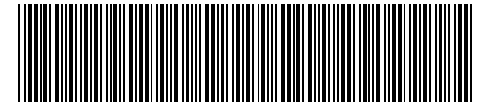
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409186	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	21.550	19.700	19.120	35.070	25.210	27.426	23.820	35.257	10.150	13.848	8.744	239.895
		BELANJA BARANG	0	21.550	19.700	19.120	35.070	25.210	27.426	23.820	35.257	10.150	13.848	8.744	239.895
	013.09.BG.5255	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	0	21.550	19.700	19.120	35.070	25.210	27.426	23.820	35.257	10.150	13.848	8.744	239.895
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	21.550	19.700	19.120	35.070	25.210	27.426	23.820	35.257	10.150	13.848	8.744	239.895

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023
IV A. B L O K I R**



DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409186] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

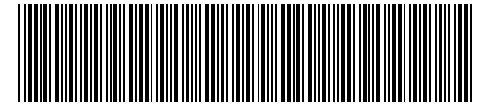
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.09.2.409186/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:5814-8908-8051-8288

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Hak Asasi Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409186] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

ttd.
Dr. MUALIMIN ABDI, SH., MH
NIP 196211211982031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.10.2.409187/2023**



DS:1199-0300-9710-6008

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 2.517.281.000 (DUA MILIAR LIMA RATUS TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.517.281.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 2.517.281.000

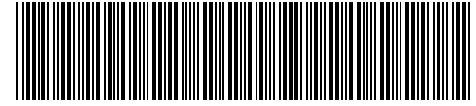
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023



DS:1199-0300-9710-6008

Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	156.957.000
BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	156.957.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	2.360.324.000
BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp.	2.360.324.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



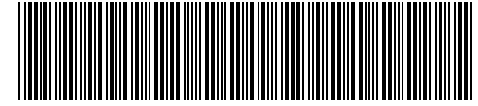
DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			156.957.000
Kegiatan	:	5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			156.957.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	41.711.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	41.711.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	115.246.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	115.246.000
Program	:	013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.360.324.000
Kegiatan	:	4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah			2.360.324.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		2. 02	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
		3. 03	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum			
		4. 04	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah			
		5. 05	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7,00	Kelompok Masyarakat	133.134.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Fasilitasi Kelompok Desa Sadar hukum	5,00	Kelompok Masyarakat	102.350.000
		02 BDD.002	Layanan Penyuluhan Hukum	2,00	Kelompok Masyarakat	30.784.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		22,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	137.883.000
Rincian Output		:	01	BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	22,00	Lembaga	137.883.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4841.BMA	Data dan Informasi Publik		6,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	110.547.000
Rincian Output		:	01	BMA.001	Fasilitasi JDIHN	5,00	layanan	93.192.000
		:	02	BMA.002	Layanan Perpustakaan Hukum	1,00	layanan	17.355.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		210,00	Orang	1.680.000.000
Rincian Output		:	01	QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	210,00	Orang	1.680.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat		28,00	Kelompok Masyarakat, Kegiatan	298.760.000
Rincian Output		:	01	QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	28,00	Kegiatan	298.760.000

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023



DS:1199-0300-9710-6008

I B. SUMBER DANA

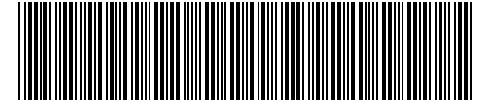
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	2.517.281.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	2.517.281.000		(2) RPLN	US\$		0 Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0 Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0 Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
							8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



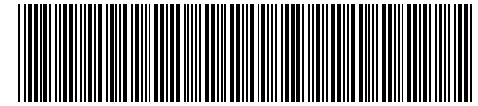
DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409187	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	2.517.281	-	-	-	2.517.281		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	156.957	-	-	-	156.957		
5256	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	156.957	-	-	-	156.957		
5256.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	41.711	-	-	-	41.711	04 . 51	
01	RM	-	41.711	-	-	-	41.711	030	
5256.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	115.246	-	-	-	115.246	04 . 51	
01	RM	-	115.246	-	-	-	115.246	030	
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.360.324	-	-	-	2.360.324		
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	-	2.360.324	-	-	-	2.360.324		
4841.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	133.134	-	-	-	133.134	04 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	133.134	-	-	-	133.134	030	
4841.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	137.883	-	-	-	137.883	04 . 51	
01 RM		-	137.883	-	-	-	137.883	030	
4841.BMA	Data dan Informasi Publik (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	110.547	-	-	-	110.547	04 . 51	
01 RM		-	110.547	-	-	-	110.547	030	
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	1.680.000	-	-	-	1.680.000	04 . 51	
01 RM		-	1.680.000	-	-	-	1.680.000	030	
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	298.760	-	-	-	298.760	04 . 51	
01 RM		-	298.760	-	-	-	298.760	030	
JUMLAH		-	2.517.281	-	-	-	2.517.281		

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409187) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409187	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	91.041	287.879	219.058	305.417	352.035	70.661	203.890	371.074	282.706	269.750	63.770	2.517.281
		BELANJA BARANG	0	91.041	287.879	219.058	305.417	352.035	70.661	203.890	371.074	282.706	269.750	63.770	2.517.281
	013.10.BB.5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	0	7.664	28.775	9.000	31.875	28.125	29.073	22.445	0	0	0	0	156.957
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	7.664	28.775	9.000	31.875	28.125	29.073	22.445	0	0	0	0	156.957
	013.10.BF.4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	0	83.377	259.104	210.058	273.542	323.910	41.588	181.445	371.074	282.706	269.750	63.770	2.360.324
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	83.377	259.104	210.058	273.542	323.910	41.588	181.445	371.074	282.706	269.750	63.770	2.360.324

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
IV A. B L O K I R**



DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409187] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

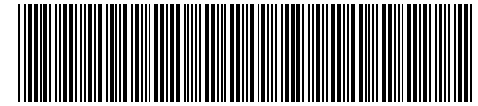
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.10.2.409187/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:1199-0300-9710-6008

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [10] Badan Pembinaan Hukum Nasional
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409187] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

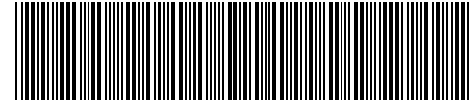
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP 197105011993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.11.2.409188/2023**



DS:1330-9630-5680-0789

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 261.246.000 (DUA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.11.WA Program Dukungan Manajemen

013.11.WA. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp.	261.246.000
Rp.	261.246.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 261.246.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 261.246.000

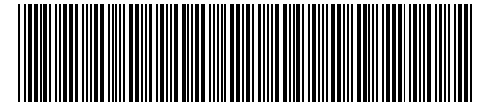
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1330-9630-5680-0789

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			261.246.000
Kegiatan	:	5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			261.246.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi hasil analisis kebijakan hukum dan asasi manusia di wilayah sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan			
		2. 02	Hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	261.246.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3,00	Rekomendasi Kebijakan	199.330.000
		02 ABD.002	Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	61.916.000

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP 196406191988111001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2023

I B. SUMBER DANA



DS:1330-9630-5680-0789

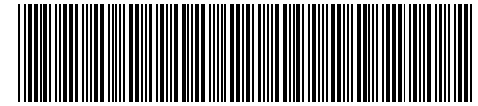
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	261.246.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	261.246.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1330-9630-5680-0789

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409188	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	-	261.246	-	-	-	261.246		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	261.246	-	-	-	261.246		
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	-	261.246	-	-	-	261.246		
5248.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	261.246	-	-	-	261.246	04 . 51	
01	RM	-	261.246	-	-	-	261.246	030	
JUMLAH		-	261.246	-	-	-	261.246		

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP.,S.H., M.Si.
NIP 196406191988111001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1330-9630-5680-0789

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (11) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (409188) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

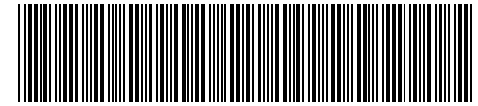
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409188	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.908	261.246
		BELANJA BARANG	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.908	261.246
	013.11.WA.5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.908	261.246
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758	21.908	261.246

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP.,S.H., M.Si.
NIP 196406191988111001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2023
IV A. B L O K I R**



DS:1330-9630-5680-0789

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409188] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

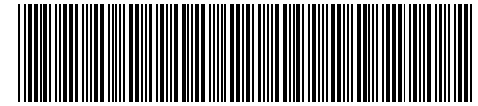
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP.,S.H., M.Si.
NIP 196406191988111001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.11.2.409188/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:1330-9630-5680-0789

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [11] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [409188] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM

ttd.
Iwan Kurniawan, Bc.IP.,S.H., M.Si.
NIP 196406191988111001



**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Gedongkuning 146 Yogyakarta 55171
Telpon (0274) 378431 Faximile (0274) 378432
Website www.jogja.kemenkumham.go.id

